



Desentralisasi Pengelolaan
Wilayah Pesisir
di Amerika Serikat:
Contoh bagi Indonesia

oleh: Maurice Knight

Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir di Amerika Serikat:

Contoh bagi Indonesia

Maurice Knight



Departemen Kelautan dan Perikanan
Jl. M.T. Haryono Kav. 52-53
Jakarta 12770
Telp. (021) 791 80303
Fax. (021) 791 80163

**Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir
di Amerika Serikat:
Contoh bagi Indonesia**

Oleh: Maurice Knight

Persiapan dan pencetakan dokumen ini didanai oleh Proyek Pesisir/CRMP sebagai bagian dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (NRM) USAID-BAPPENAS dan USAID-CRC/URI Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (CRMP)

Dicetak di Jakarta, Indonesia

Kutipan:

Knight, M., (2001). Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir di Amerika Serikat: Contoh bagi Indonesia. Penerbitan khusus Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA.

xi +94 halaman

ISBN 979-9336-19-8

Nomor Training Report CRC: TR-00/05-5

Tim editor : Dietrich G. Bengen, Kun S. Hidayat

Tata letak : Yayak M. Saat

Fotografi : Imaji Indonesia (foto cover), Maurice Knight, Heidi Schuttenberg

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini membahas penemuan dan pelajaran berharga tentang pengelolaan pesisir terpadu (PPT) dari studi wisata internasional (SWI) ke Amerika Serikat, yang dilakukan oleh sekelompok pejabat senior Pemerintah Indonesia baik dari tingkat nasional maupun propinsi pada tanggal 11 – 22 September 2000. Proyek Pesisir, Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Indonesia dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia/ USAID, adalah pihak yang memberi sponsor pada SWI. Pusat Sumber Daya Pesisir dari Universitas Rhode Island (organisasi pelaksana Proyek Pesisir) melaksanakan penyelenggaraan SWI di Amerika Serikat. SWI mengambil manfaat dari kesempatan yang diberikan karena perubahan peta politik di Indonesia. Hal yang juga penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir adalah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang peningkatan otonomi daerah yang dilanjutkan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, kementerian pertama yang mengurus laut dan pesisir.

Menurut UU No. 22/1999, Indonesia telah meninggalkan paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang telah berlangsung selama 50 tahun belakangan ini dan melangkah pada suatu paradigma baru, yaitu desentralisasi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat setempat yang berhubungan langsung dengan sumber daya tersebut. SWI menggambarkan bagaimana Amerika Serikat mengembangkan desentralisasi program pengelolaan pesisirnya yang menurut sejarah Amerika bertitik tolak 30 tahun lalu. Dari sini SWI dinilai oleh pesertanya sebagai pengalaman yang amat tepat dan sangat terencana yang menunjukkan pilihan-pilihan baru dalam pengelolaan pesisir tepat, pada saat ide-ide tersebut merupakan hal yang amat bagus dan bisa diterapkan di Indonesia.

Meskipun kedua negara sangat berbeda ditinjau dari segi mana pun, Amerika Serikat telah bergulat dengan masalah serupa dengan yang dihadapi Indonesia dalam hal desentralisasi pengelolaan sumber daya pesisir. Kemiripan ini semakin nyata di mata peserta studi wisata ketika mereka mengikuti jadwal SWI lebih lanjut. Pengalaman ini mencapai puncaknya saat peserta SWI menemukan korelasi antara “pengembangan program pengelolaan pesisir” yang ada di Amerika Serikat dengan “kebutuhan pengembangan program pesisir” di Indonesia. Pelajaran utama yang ditangkap oleh peserta SWI disajikan dalam dokumen ini. Berikut adalah sejumlah kesimpulan utama yang didapat oleh peserta SWI.

Pelajaran mengenai Kontribusi Undang-undang dalam Desentralisasi dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

- Kunci perlindungan efektif dan pemanfaatan lahan pesisir dan sumberdaya air merupakan peran serta pemerintah daerah dan penduduk setempat dalam menentukan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya tersebut.
- Peran pemerintah pusat adalah menghimbau pemerintah daerah dan penduduk setempat dalam melaksanakan wewenang penuh atas daerah pesisir. Pemerintah daerah dan penduduk setempat harus menyusun peraturan tertentu untuk program wilayah pesisir dan pemanfaatan air, kebijakan bersama, kriteria, standar, metoda dan proses sehubungan dengan peraturan pemanfaatan pesisir di daerah dan di luar batas daerah tersebut.
- Perundangan pengelolaan wilayah pesisir nasional terpadu dapat secara efektif membina pemahaman penduduk setempat di tingkat propinsi, kabupaten, dan desa, melalui perangkat insentif

secara finansial dan hukum untuk tingkat propinsi, dan program kabupaten yang sesuai dengan permintaan sertifikasi.

- Peraturan dan perundangan pengelolaan wilayah pesisir tingkat propinsi dapat berperan efektif dalam mempromosikan standar pemahaman pada tingkat kabupaten dan di bawahnya, melalui perangkat insentif finansial dan hukum, dan sekaligus memastikan koordinasi antar kabupaten tentang masalah pembangunan.
- Tujuan peraturan dan perundangan pengelolaan wilayah pesisir tingkat kabupaten adalah untuk memperkuat masyarakat dalam mengelola sumberdaya pesisir secara bijak dengan menyusun peraturan yang jelas, dan sekaligus membuat standar minimum pelaksanaan dalam perencanaan pesisir dan pemanfaatan sumberdaya.
- Permintaan sertifikasi nasional untuk program pesisir tidak boleh memaksakan peraturan tertentu, namun memandu proses-proses sebagai berikut: a) pengumpulan informasi dan penetapan definisi; b) membina pembentukan lembaga dan organisasi, membentuk prosedur; dan c) mengembangkan permintaan rancangan efektif dan proses.
- Peraturan dan perundangan pengelolaan pesisir nasional terpadu harus menjelaskan otoritas dan yurisdiksi dalam hal penggunaan lahan pesisir dan pemanfaatan air ditinjau dari sisi lokal, propinsi dan nasional, dan harus menyesuaikan penataan lembaga demi keterpaduan dan koordinasi antar departemen/sektor dan antar propinsi yang terkait dengan pemanfaatan tersebut.
- Perencanaan spasial merupakan perangkat program pesisir tingkat kabupaten dan perundangan nasional harus menetapkan standar minimum untuk membentuk rencana spasial menyeluruh (rencana penggunaan lahan) di wilayah pesisir yang memberikan prioritas untuk pemanfaatan pesisir (misalnya penggunaan yang sesuai).
- Standar minimum untuk sertifikasi perencanaan pengelolaan zona pesisir lokal harus menentukan identifikasi wilayah tertentu, pembangunan perencanaan pengelolaan khusus untuk wilayah tersebut (misalnya: cagar alam laut, habitat sensitif atau kritis, dan lain-lain), dan menyediakan perlindungan sumber daya yang lebih banyak di wilayah tersebut, selain itu juga menyediakan keperluan pertumbuhan ekonomi pesisir yang sesuai.
- Kerjasama secara nasional, propinsi, kabupaten dan lokal mengenai sumberdaya kelautan menyediakan kesempatan yang sangat besar untuk koordinasi yang efektif dan pertumbuhan pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia.
- Kepentingan nasional dan daerah dalam sumber daya kelautan dan pengelolaan pesisir terpadu akan berubah dan peraturan pengelolaan zona pesisir nasional harus mencakup mekanisme untuk menyesuaikan dengan prioritas yang fleksibel, seperti penilaian secara periodik dan otorisasi ulang.
- Peraturan pengelolaan zona pesisir nasional merupakan perangkat penting untuk pengadaan dana pengelolaan pesisir.
- Pemerintah propinsi maupun lokal harus memastikan tersedianya dana yang cukup untuk kegiatan pengelolaan pesisir dan anggaran lokal yang mencerminkan pentingnya kebutuhan pengelolaan pesisir.
- Diterapkannya peraturan dan monitoring merupakan syarat tercapainya keefektifan pengelolaan pesisir yang berkesinambungan dan harus ditujukan pada tiap tingkatan pemerintahan.
- Perundangan nasional terpadu harus memastikan berlakunya suatu proses transparan dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pesisir dan pengambilan keputusan dalam pembangunan.
- Program pengelolaan pesisir tingkat pusat maupun lokal harus mencakup mekanisme yang menjamin adanya keikutsertaan masyarakat secara tepat dan efektif dalam pengambilan keputusan pengelolaan pesisir, sehingga kerjasama pengelolaan sumberdaya pesisir dapat tercapai secara efektif.
- Perencanaan dan implementasi pengelolaan pesisir harus disusun sesuai dengan kapasitas lembaga dan organisasi.

Ucapan Terima Kasih

Peserta SWI, staf Proyek Pesisir, Pusat Sumberdaya Pesisir Universitas Rhode Island dan mereka yang terlibat dalam penyusunan jadwal dan komitmen yang mendukung terlaksananya studi wisata. Oleh sebab itu, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua usaha dan kerja keras mereka.

Perencanaan dan koordinasi, dan juga dukungan riil, diberikan oleh Universitas Rhode Island dan Pusat Sumber Daya Pesisir. Studi wisata ini mendapat dukungan dari gagasan awal Brian Needham, Pejabat Bagian Program Indonesia di Coastal Resources Center Universitas Rhode Island, yang menyusun rencana awal perjalanan studi wisata. Stephen Olsen, Direktur, dan Lynne Zeitlin Hale, Asisten Direktur Coastal Resources Center, keduanya berperan penting dalam mendapatkan kerjasama dan peran serta dari pejabat-pejabat tingkat tinggi yang biasanya sulit didapat untuk studi wisata seperti ini. Dr. Corothers, Rektor Universitas Rhode Island, dengan murah hati menjamu makan malam di kediamannya untuk menyambut peserta studi wisata di Amerika dan Rhode Island. Pada kesempatan yang sama ditandatangani pula Memorandum Kesepahaman antara Universitas Rhode Island dengan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Brian Crawford menyiapkan informasi penjelasan yang terinci bagi seluruh pihak tuan rumah dan membantu dalam perencanaan wisata. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan pada Senator Rhode Island Jack Reed dan Lincoln Chafee yang mensponsori presentasi Menteri Sarwono Kusumaatmadja pada Departemen Luar Negeri AS dan pada Jaringan Akuatik Wanita yang menyelenggarakan acara ini.

Jasa Heidi Schuttenberg, peserta program magang pada Coastal Resources Center, sebagai koordinator studi wisata secara keseluruhan sungguh tak ternilai. Tanpa jerih payahnya, urusan logistik dan komitmen lanjut dari organisasi tuan rumah AS dan orang-orangnya, SWI tidak mungkin bisa mencapai tujuannya dengan baik. Kontribusi Heidi dalam laporan ini sangat penting dalam hal mendokumentasikan rapat-rapat dan menyusun kesimpulan sebagai pelajaran penting bagi Indonesia. Ruth Validofsky dan Cindy Moreau mengerjakan semua urusan keuangan dan akunting dan menyesuaikan dengan kebutuhan USAID dan Rhode Island. Chip Young melaksanakan urusan publikasi dan koordinasi acara dengan sempurna. Kim Kaine juga layak mendapat pujian untuk dukungannya dalam administrasi dan logistik studi wisata.

Banyak pihak di luar Rhode Island yang juga berperan penting dalam mendukung terlaksananya studi wisata ini. Di Washington, D.C., Dr. Margareth Davidson, Bud Ehler, Dr. Arthur Patterson dan Lynne Mersfelder di NOAA, dan juga Richard Volk dan Alan Hardiss dari Biro G/Lingkungan Hidup USAID dengan gembira meluangkan waktu dan tenaga mereka untuk memastikan bahwa semua rapat dapat mencapai hasil yang berguna bagi peserta. Joanne Delaney dari NOAA yang memimpin penyelenggaraan rapat-rapat di Cagar Alam Laut Nasional Florida Keys. Billy Causey dan Dr. John Clark, penulis buku, dengan senang hati menyediakan waktu dalam jadwal mereka untuk bergabung dengan peserta dan ikut dalam percakapan terperinci mengenai topik-topik yang khusus menarik minat peserta. Dr. Sylvia Earle dari National Geographic Explorer di Residence menyambut peserta studi dengan senang hati dan berdiskusi dengan mereka mengenai pentingnya program penelitian dalam penyusunan data ilmiah pengelolaan pesisir dan kelautan dan pendidikan masyarakat. Steve Tilley dan Tim Puget Sound Water Quality menunjukkan komitmen yang luar biasa demi pengelolaan pesisir di Indonesia dengan menjadwalkan kunjungan di negara bagian Washington.

Di Indonesia, persiapan wisata dan logistik dikoordinasikan melalui Kantor Proyek Pesisir-Jakarta. Ucapan terimakasih saya sampaikan pada Esthy Jonathan atas bantuannya menyiapkan perjalanan yang sulit dan rumit, pengurusan visa dan izin, berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia, USAID

dan Coastal Resources Center/ University of Rhode Island. Fred Pollock dan Priyanto Santoso dari USAID Indonesia berperan sangat penting dalam memberikan dukungan yang luwes yang diperlukan untuk perjalanan SWI di AS. Yang terakhir, namun tetap sama pentingnya, ucapan terimakasih kami sampaikan pada Dr. Ian Dutton yang melaksanakan perencanaan awal studi wisata, mewujudkan perjalanan studi wisata, membantu dalam implementasi SWI di AS, dan mengedit *draft* akhir laporan ini.

Informasi yang terkandung dalam laporan ini disusun selama dua pekan melalui rapat-rapat dan pembicaraan yang padat. Tentu saja banyak detil terpaksa dihilangkan dan tak urung hal ini pasti tak luput dari kesalahan. Meskipun demikian, kami harapkan laporan ini dapat memberikan ringkasan dari pengalaman SWI dan pelajaran yang diterima untuk merangsang diskusi kreatif demi masa depan pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia.

Maurice Knight

Senior Policy Advisor

Coastal Resources Center, University of Rhode Island

Daftar Singkatan

| | |
|----------------|--|
| CBNRM | Community Based Natural Resources Management (Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat) |
| CRC | Coastal Resources Center (Pusat Sumber Daya Pesisir, Universitas Rhode Island) |
| CRMC | Coastal Resources Management Council (Badan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir) |
| CRMP | Coastal Resources Management Project (Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir/ USAID) |
| CZMA | United States Coastal Zone Management Act (Undang-undang Pengelolaan Zona Pesisir AS tahun 1972 atau UUPZP) |
| FKNMS | Florida Keys National Marine Sanctuary (Cagar Alam Laut Nasional Florida Keys) |
| ICM | Integrated Coastal Management (Pengelolaan Pesisir Terpadu) |
| INCUNE | Indonesia Coastal Universities Network (Jaringan Perguruan Tinggi Kelautan Indonesia) |
| IPB | Institut Pertanian Bogor |
| IST | International Study Tour (Studi Wisata Internasional atau SWI) |
| Law 22/1999 | Undang-undang tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah RI |
| Law 25/1999 | Undang-undang tahun 1999 mengenai Desentralisasi Fiskal RI |
| LoPS | Life of Project Strategy (Strategi Kelangsungan Proyek) |
| MOU | Memorandum of Understanding (Memorandum Kesepahaman) |
| NEP | National Estuary Program (Program Estuari Nasional) |
| NMFS | National Marine Fisheries Service (Lembaga Perikanan Laut Nasional) |
| NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration (Lembaga Nasional Administrasi Kelautan dan Atmosfer) |
| NOS | National Ocean Service (Badan Kelautan Nasional) |
| NRDA | National Resources Damage Assessment (Badan Pengkajian Kerusakan Sumberdaya Alam) |
| NMSP | National Marine Sanctuaries Program (Program Cagar Alam Laut Nasional) |
| OPA | Oil Pollution Act (Undang-undang Pencemaran Limbah Minyak) |
| Proyek Pesisir | Nama Indonesia untuk CRMP |
| RFAC | Regional Fisheries Advisory Council (Badan Penasehat Perikanan Daerah) |
| SAMP | Special Area Management Plan (Rencana Pengelolaan Wilayah Khusus) |
| URI | University of Rhode Island (Universitas Rhode Island) |
| USAID | United States Agency for International Development (Lembaga Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional) |
| NERR | National Estuarine Research and Reserve (Lembaga Penelitian dan Pelestarian Estuari Nasional) |
| USEPA | United States Environment Protection Agency |

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Ringkasan Eksekutif dan Pelajaran | iii |
| Ucapan Terimakasih | v |
| Daftar Singkatan | vii |
| Daftar Isi | ix |
| Lampiran | x |
| 1.0 Pengantar | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Program Nasional | 2 |
| 1.3 Program Negara Bagian dan Daerah | 2 |
| 1.4 Wilayah Pengelolaan Khusus | 2 |
| 1.5 Peranserta Masyarakat | 3 |
| 1.6 Monitoring Riset, Penerapan dan Pengawasan | 3 |
| 1.7 Masalah Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi | 3 |
| 1.8 Laporan | 4 |
| 2.0 Ikhtisar Pengelolaan Pesisir di AS dan Kegiatan SWI Terkait | 5 |
| 2.1 Federalisme Amerika Serikat: Pembentukan Undang-undang Pengelolaan Zona Pesisir tahun 1972 dan Evolusi Program Pengelolaan Zona Pesisir AS | 5 |
| 2.2 Undang-undang Pengelolaan Zona Pesisir AS | 7 |
| 2.3 Keberhasilan Sertifikasi Sukarela Berdasar UUPZP | 9 |
| 2.4 Tanggapan Negara dan Lokal atas UUPZP Melalui Program Pengelolaan Pesisir Terpadu | 9 |
| 2.5 Desain Studi Wisata dan Komentar-komentar tentang Pertukaran Informasi: | 11 |
| • Washington, D.C. | 11 |
| • Akuarium Baltimore, Maryland | 15 |
| • Florida Selatan | 15 |
| • Rhode Island | 18 |
| • Negara Bagian Washington | 23 |
| 3.0 Transferabilitas Ke Indonesia | 27 |
| 4.0 Pelajaran Bagi Desentralisasi Pengelolaan Zona Pesisir | 29 |
| 4.1 Latar Belakang: Desain Program SWI | 29 |
| 4.2 Pelajaran yang Dipetik | 30 |
| 4.2.1 Riset dan Pengembangan | 30 |
| 4.2.2 Kebijakan dan Kondisi Yang Memungkinkan | 32 |
| 4.2.3 Kelembagaan dan Penguatan | 35 |
| 4.2.4 Diseminasi (penyebaran) Informasi, Pendidikan dan Keunggulan | 39 |
| 5.0 Kesimpulan dan Rekomendasi Program | 41 |
| 5.1 Ringkasan Temuan | 41 |
| 5.2 Rekomendasi Program sebagai hasil dari Studi Wisata ke AS | 42 |

Lampiran

| | |
|---|----|
| Lampiran A | 45 |
| Pernyataan Minat Kerjasama Kelautan dan Pesisir antara NOAA dan Departemen Kelautan Dan Perikanan | |
| Lampiran B | 49 |
| Memorandum Kesepahaman antara Universitas Rhode Island dan Departemen Kelautan dan Perikanan | |
| Lampiran C | 53 |
| Memorandum Kesepahaman antara Rhode Island Coastal Resources Management Council dan Propinsi Lampung | |
| Lampiran D | 57 |
| Memorandum Kesepahaman antara Puget Sound Water Quality Action Team dan Propinsi Kalimantan Timur | |
| Lampiran E | 61 |
| Biografi Peserta Indonesia | |
| Lampiran F | 65 |
| Evaluasi oleh Peserta SWI | |
| Lampiran G | 69 |
| Jadwal Harian Studi Wisata | |
| Lampiran H | 81 |
| Pidato Menteri Sarwono Kusumaatmadja di Washington, D.C. | |
| Lampiran I | 89 |
| Daftar Dokumen dan Kepustakaan | |

1.0 Pengantar

1.1 Latar Belakang

Laporan ini berisi temuan dan kesimpulan yang didapat selama studi wisata internasional pengelolaan pesisir terpadu ke Amerika Serikat yang diikuti oleh sejumlah pejabat pemerintah Indonesia tingkat pusat dan propinsi. Studi wisata ini diselenggarakan sebagai bagian tak terpisahkan dari *Coastal Resources Management Project* (CRMP), yaitu Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Indonesia/USAID yang di Indonesia dikenal dengan nama Proyek Pesisir. Tujuan dari studi wisata ini adalah:

1. Menggali pengalaman Amerika Serikat dalam desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan kemungkinan diterapkannya dalam konteks Indonesia;
2. Menyampaikan perkembangan di Indonesia kepada lembaga-lembaga AS dan implikasinya pada bantuan luar negeri AS dan hubungannya dengan pengelolaan pesisir dan kelautan; dan
3. Membentuk jaringan profesional antara kedua negara.

Bukti keberhasilan tujuan tersebut dapat dilihat dari pikiran-pikiran para peserta studi wisata dan pembentukan kerjasama formal dengan para rekan mereka di AS melalui tiga Memorandum Kesepahaman (MoU) dan satu Pernyataan Minat atau *Letter of Interest* (Lampiran A-D). Tujuan utama SWI adalah memberikan kontribusi pada pengelolaan pesisir terpadu yang lebih kokoh melalui implementasi di Indonesia dengan prinsip dan perangkat seperti yang didapat selama studi wisata. Laporan ini merekam prinsip-prinsip dan perangkatnya, dan merangkai pelajaran yang dapat diterapkan untuk mendukung penerapan program pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia.

Studi wisata ini dirancang sebagai bagian tak terpisahkan dari program dua jalur lokal dan nasional (*dual-track local and national program*) dari Proyek Pesisir. Jadwal SWI dipercepat oleh kesempatan yang muncul berkat adanya perhatian pemerintah baru pada desentralisasi dan pembentukan kementerian yang berfokus pada pesisir dan kelautan: Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Jadwal ini juga dirancang untuk kebutuhan Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (BAPPEDA) dan kementerian baru dalam menyusun visi akan peran dan tanggung jawab pemerintah pada tingkat yang berbeda-beda serta *stakeholders* di bawah suatu sistem desentralisasi pengelolaan pesisir.

Perubahan politik yang terjadi belakangan ini menyebabkan perubahan kelembagaan yang dramatis di Indonesia dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam, menciptakan kesempatan yang menantang bagi demokratisasi dan desentralisasi wewenang, dan sekaligus juga merupakan tuntutan yang signifikan bagi visi Indonesia untuk memindahkan pengelolaan dan perencanaan sumberdaya pesisir (Dahuri dan Dutton, 2000). Perubahan ini menguatkan relevansi pengalaman Amerika Serikat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan bagi Indonesia. Melalui perjalanan 10 hari ke Washington, D.C., Florida Selatan, Rhode Island, dan Negara Bagian Washington, studi wisata menyuguhkan pengalaman AS pada peserta dari Indonesia. Pengalaman ini dijabarkan secara singkat pada bagian 1.2-1.7 berikut ini.

1.2 Program Nasional

Selama SWI, peserta terlibat dalam diskusi yang menitikberatkan pada urgensi Undang-undang Pengelolaan Zona Pesisir Nasional tahun 1972 (UUPZP) dalam menyusun agenda pengelolaan pesisir nasional di AS. UUPZP disimpulkan dalam usaha pemerintah pusat, daerah dan penduduk setempat dalam menekankan perhatian, usaha dan sumber dana mereka pada pengelolaan zona pesisir. Penekanannya terutama pada bagaimana hukum nasional dirancang untuk mengajak pemerintah pusat, daerah, suku Indian dan masyarakat umum untuk melaksanakan hak dan wewenang mereka secara utuh dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya pesisir yang sesuai. Hal ini mencakup penjelasan peran khusus dari tingkat pemerintahan yang berbeda, memastikan standar minimum lewat sertifikasi program secara sukarela dan menjamin kesempatan untuk peran serta masyarakat.

Sertifikasi dari program pengelolaan zona pesisir semua negara bagian dan daerah merupakan karakteristik penting dari program terpadu AS. Permintaan sertifikasi sukarela atas program negara bagian dan daerah berdasarkan UUPZP dapat secara luas dikategorikan sebagai proses yang berhubungan dengan informasi dan pengertian, lembaga dan organisasi, prosedur dan perencanaan. Dengan menetapkan proses dan elemen yang harus dimasukkan pada tiap kategori, pemerintah pusat AS menjamin pendekatan yang tertib dan efektif untuk desentralisasi pengelolaan pesisir. Selain itu, pemerintah federal AS memberikan struktur insentif yang cukup mendorong seluruh negara bagian untuk ikut secara sukarela dalam program sertifikasi nasional. Insentif yang diberikan berupa finansial dan yurisdiksi (berdasarkan konsistensi federal, negara bagian dan daerah dengan rancangan pesisir yang disetujui).

1.3 Program Negara Bagian dan Daerah

Peserta studi mempelajari program negara bagian dan daerah yang menawarkan implementasi desentralisasi pengelolaan zona pesisir yang baik dan beraneka ragam. Pilihan yang ada mencakup pembagian wewenang antara lembaga negara bagian dan daerah serta mekanisme koordinasi antar lembaga. Terdapat penekanan khusus pada profil perencanaan tata guna tanah daerah dan peran serta masyarakat dalam program negara bagian dan daerah menuju pemerintahan yang berwibawa dalam penentuan kebijakan pengelolaan pesisir. Peserta SWI bertemu dengan para pemimpin yang terlibat dalam masalah bagaimana pemerintah pusat AS berkoordinasi dengan pemerintah negara bagian dan daerah dan masyarakat dalam mencapai kebutuhan masing-masing. Kasus-kasus ini menunjukkan cara penyelesaian masalah yang, bila tidak di luar kewenangan pemerintah negara bagian dan masyarakat, bisa diselesaikan tanpa bantuan pemerintah federal.

Peserta juga mempelajari peran pemerintah pusat dalam membantu mekanisme penggalangan dana pemerintah federal-negara bagian, dan peran pemerintah negara bagian dalam mendukung skema pendanaan negara bagian-daerah. Ini meliputi juga bagaimana masalah dana dinilai, dikumpulkan dan dibagikan (misalnya ongkos naik kapal pesiar yang berlabuh di Key West adalah US\$ 3.00 per penumpang).

1.4 Wilayah Pengelolaan Khusus

Beberapa wilayah pengelolaan khusus dilaksanakan melalui Program Cagar Alam Laut Nasional (MSP), Program Kuala Nasional (NEP) dan melalui perencanaan spasial lokal. Diskusi membahas peran lembaga pemerintah pusat dan negara bagian mengenai koordinasi program, pendanaan, perencanaan

dan penerapan. Bagian penting dari diskusi ini adalah peran dari UUPZP dalam menyusun identifikasi wilayah-wilayah pengelolaan khusus yang menuntut tingkat kekhususan lebih tinggi dalam hal melindungi sumberdaya yang rapuh dan kritis dan habitat di wilayah tersebut. Di Amerika Serikat, pengelolaan lahan dan perencanaan spasial merupakan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karenanya, identifikasi dari wilayah pengelolaan khusus dan pembinaannya rencananya pengelolaan wilayah khusus selalu melibatkan pemerintah daerah dan penduduk di dalamnya, dan dalam kasus program NEP dan MSP, pemerintah daerah melalui proses yang transparan mengikutsertakan semua masyarakat.

1.5 Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat, universitas, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan pesisir dan kelautan merupakan sesuatu yang selalu terjadi dalam program pengelolaan zona pesisir di AS. Peran pemerintah pusat dan negara bagian dalam menjamin terciptanya proses peran serta yang luas dalam pengelolaan pesisir selalu ditampilkannya dalam setiap kunjungan. Secara teratur peserta SWI diberi kesempatan menyaksikan keefektifan kerja sama pengelolaan sumberdaya pesisir yang diiraihi melalui peran serta masyarakat. Pertemuan yang diikuti oleh peserta SWI, dewan masyarakat dan LSM menunjukkan peran penting masyarakat dalam menyelenggarakan dan menyuarakan aspirasi mereka sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir.

1.6 Monitoring Riset, Penerapan Peraturan dan Pengawasan

Diskusi difokuskan pada topik-topik seperti memonitor riset, penerapan peraturan dan pengawasan struktur organisasi, strategi operasional untuk melaksanakan pengumpulan data yang terkoordinasi, pembuatan peta sumberdaya dan basis data antar lembaga-lembaga.

1.7 Masalah Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi

Masalah infrastruktur dan pembangunan ekonomi berkenaan dengan perencanaan pengelolaan pesisir, perizinan dan pemanfaatan pesisir secara kontinyu ditekankan oleh tuan rumah AS. Pentingnya kesadaran bahwa investasi infrastruktur selalu berlanjut pada pembangunan dan efeknya pada lingkungan hidup merupakan masalah kunci dalam pembicaraan dengan pembuat rencana (contoh: bertambah besarnya kapasitas pemrosesan air limbah Key West berakibat pada meningkatnya angka populasi). Seperti juga di Indonesia, wilayah paling menarik bagi pembangunan di zona pesisir AS merupakan tempat yang paling peka dalam masalah ekosistem. Isu-isu seperti pembangunan ekonomi, pariwisata, ancaman kerusakan pesisir, pencemaran, dan hak kepemilikan tanah merupakan topik diskusi yang umum dilakukan antara peserta SWI Indonesia, organisasi tuan rumah AS dan perorangan. Proses kerjasama pengelolaan yang efektif sering diperlukan untuk membuat keputusan dalam pembangunan ekonomi yang sesuai (pembangunan berkesinambungan) dan investasi infrastruktur terkait. Keputusan ini penting dalam menghadapi atau menghindari kesulitan seperti erosi pantai yang parah, kehilangan nyawadan harta benda karena bencana alam, dan rusaknya habitat kritis secara ekonomi. Semua ini merupakan problem serius sebagai akibat dari pembangunan ekonomi dan infrastruktur di zona pesisir AS dan dibahas dalam sistem pengelolaan pesisir terpadu AS.

1.8 Pembuatan Laporan

Bagian berikut dari laporan ini merjabarkan lebih lanjut mengenai pelajaran yang diterima dan detail pertemuan dan diskusi yang bermanfaat, dalam rangka menyusun pelajaran utama bagi Indonesia dari pengalaman AS dalam pengelolaan pesisir.

Bagian 2.0 berisi ikhtisar mengenai pengelolaan pesisir di AS seperti dijelaskan dalam pertemuan dan diskusi SWI, dan menerangkan organisasi SWI sebagai suatu organisasi.

Bagian 3.0 sampai 6.0 membicarakan pelajaran yang diberikan berkaitan dengan hasil pengelolaan yang paling utama yang ingin dicapai oleh DKP dan propinsi-propinsi dan yang sedang diusahakan oleh Proyek Pesisir dan Coastal Resources Center/Universitas Rhode Island melalui dukungan USAID.

Bagian 7.0 membahas pengalaman utama yang didapat oleh peserta SWI seperti disampaikan dalam pikiran-pikiran/ pembicaraan formal dan informal sepanjang studi wisata.

Bagian 8.0 berisi rekomendasi yang muncul sepanjang perjalanan studi yang ditujukan pada rekan pengelolaan pesisir pada semua tingkatan pemerintahan. Bahan tambahan mengenai SWI disampaikan pada Lampiran A—I seperti dicantumkan dalam Daftar Isi.

Ikhtisar Pengelolaan Pesisir di AS dan Kegiatan SWI Terkait

2.1 Federalisme AS: Undang-undang Pembangunan Pengelolaan Zona Pesisir tahun 1972 dan Perubahan Program Pengelolaan Zona Pesisir AS

Pemerintah Amerika Serikat merupakan pemerintahan berdasar sistem federal yang berhasil menempatkan pengawasan pemerintah negara bagian dan daerah. Pemerintah pusat memegang kendali, atau paling tidak masih memiliki pengaruh, atas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan akses yang wajar dan distribusi kepentingan umum tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan masalah lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial.

Setelah Perang Dunia II berakhir, ekonomi dan populasi AS berkembang dengan cepat. Secara keseluruhan tingkat usia rata-rata penduduk menjadi semakin muda dan ekonomi pasca perang membuat kondisi keuangan penduduk Amerika menjadi pasti. Selain itu, pendidikan dan kesadaran akan kekuatan dan proses politik semakin kuat. Peran televisi dan media lain semakin tinggi dalam membentuk kepedulian akan suatu masalah, termasuk masalah lingkungan hidup.

Mengikuti jejak pembangunan merupakan fenomena lain yang signifikan dalam masyarakat saat itu. Evolusi gerakan lingkungan hidup AS, menguatnya kekuatan politik LSM-LSM lingkungan dan kelompok-kelompok masyarakat pada tahun enam puluhan dan tujuh puluhan menjadi penting. Sejumlah kelompok sudah berdiri lama dan bergerak berdasarkan peraturan khusus yang dibentuk saat organisasi tersebut didirikan. Kelompok lainnya baru dibentuk dengan tujuan eksplisit mempengaruhi kebijakan dalam hal lingkungan hidup. Secara alami organisasi-organisasi itu berbeda fokus satu sama lain berdasarkan sumberdaya, keanggotaan dan lokasinya di negara tersebut. Beberapa LSM dan organisasi lain memfokuskan pada zona pesisir sebagai tanggapan atas tekanan yang kian meningkat dari masyarakat dan pembangunan.

Perhatian Pemerintah Amerika pada zona pesisir bermula pada tahun 1966, ketika pembentukan Kongres AS mengenai Komisi Ilmu Kelautan, Rekayasa dan Teknologi (Komisi IKRT). Komisi ini bertugas menyusun rekomendasi bagi kongres mengenai masalah-masalah utama tentang kebijakan kelautan. Meskipun demikian, fokus perhatian dari komisi ini adalah masalah pesisir di Amerika Serikat. Mengingat bahwa pengelolaan tata guna tanah di AS secara historis merupakan urusan pemerintah daerah, laporan Komisi IKRT 1969 dengan gamblang merekamkan perlunya pendekatan nasional yang lebih proaktif mengenai pengelolaan zona pesisir, mengingat pentingnya jaminan ekonomi bagi bangsa Amerika:

“Pesisir Amerika Serikat merupakan, dalam banyak segi, keistimewaan geografis nasional yang paling tak ternilai. Pesisir merupakan titik bertemunya daratan dan lautan tempat di mana sebagian besar dari perdagangan dan industri negara kita dilaksanakan. Perairan lepas pantai merupakan wilayah yang secara biologis paling produktif.”

[Undang-undang Pengelolaan Zona Pesisir AS tahun 1972]

Laporan Komisi menemukan bahwa nilai zona pesisir terancam berkurang karena tekanan populasi yang meningkat, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan dalam pembangunan perumahan, tempat rekreasi dan pembangunan industri segala tingkat: kecil, menengah dan besar. Dalam laporannya komisi ini menyimpulkan bahwa zona pesisir itu sendiri merupakan sumberdaya nasional dan bahwa pemerintah pusat memiliki “kewajiban pada generasi sekarang dan masa depan” dalam konservasi dan pembangunan ekonomi yang sesuai pada zona pesisir.

Pada tahun 1970 Amerika Serikat menanggapi semua aspirasi tersebut dengan membuka jalur baru dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup dan membentuk Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (United States Environmental Protection Agency atau USEPA).

Kongres AS melanjutkannya dengan menyusun sejumlah peraturan yang terus menerus mengubah pengelolaan lingkungan hidup di Amerika. Salah satu yang paling berarti adalah Undang-undang Pengelolaan Zona Pesisir tahun 1972 (UUPZP) atau Coastal Zone Management Act (CZMA). Undang-undang ini disusun untuk “melestarikan, melindungi, membangun, dan bila mana mungkin, mengembalikan atau meningkatkan, sumberdaya dalam zona pesisir negara demi generasi masa kini dan penerusnya” (UUPZP, 16 USCA 1451-1464).

Lembaga yang bekerja sama dengan UUPZP adalah Program Daerah Estuaria Nasional (National Estuarine Program/NEP) dan Lembaga Penelitian dan Pelestarian Daerah Estuaria Nasional (National Estuarine Research and Reserve/NERR). Pada tahun 1987, amandemen UU Air Bersih memberi wewenang pada USEPA membentuk Program Daerah Estuaria Nasional. Kantor Bidang Air USEPA menjalankan program ini dan sampai hari ini sudah memiliki 28 program di seantero negara berdasarkan konservasi lapangan dan rencana pengeloaan teluk dan estuaria. Dalam berpartisipasi dalam NEP gubernurnegara bagian menyerahkan paket nominasi pada USEPA (sebagai balasan untuk pengiriman proposal) dan setuju untuk menyerahkan dana negara bagian-federal dengan persentase sebesar 25%-75% untuk program yang disetujui. NERR digunakan sebagai laboratorium lapangan dalam menyediakan pemahaman yang lebih besar mengenai daerah estuari, apa fungsinya dan bagaimana tempat itu dipengaruhi oleh kegiatan manusia.

Kantor Pengelolaan Kelautan dan Pesisir (OCRM) yang merupakan bagian dari Kantor Kelautan Nasional (NOS) NOAA memberikan bantuan finansial pada negara bagian dan teritorial untuk membangun dan melaksanakan program pesisir dan merancang NERR. Program pesisir bertujuan dan membantu mengurus tata guna tanah di zona pesisir dan sekaligus juga melindungi sumberdaya pesisir. Peran kepemimpinan NOAA pada tingkat pemerintahan federal mencakup pengintegrasian dan koordinasi kemampuan UUPZP dan lembaga federal lainnya dan sektor swasta dalam menjalankan pengurusan sumberdaya pesisir dan aplikasi terukur dari kebijakan pemerintah federal.

NERR saat ini meliputi 22 situs pelestarian di 18 negara bagian dan teritorinya seluas 440.000 are terdiri dari daerah kuala, lahan basah dan hulu. Tujuan sistem pelestarian ini adalah menyiapkan wilayah contoh dari habitat dan ekosistem bagi laboratorium alam penelitian. Tujuan riset NERR adalah meningkatkan pemahaman akan fungsi ekosistem dan tingkat spesies dan menciptakan kesempatan bagi penyuluhan umum tentang masalah daerah kuala. Kerjasama antara pemerintah federal-negara bagian diharapkan dapat menambah luas cakupan wilayah NERR. Gubernur negara bagian memilih wilayah-wilayah yang bisa dipertimbangkan dan NOAA menetapkan wilayah mana yang akan digabungkan dalam NERR, berdasarkan kriteria kritis pesisir wilayah tersebut atau habitat daerah kualitasnya dan kesesuaiannya untuk riset jangka panjang dan manfaatnya untuk pendidikan. Begitu suatu wilayah terdaftar dalam sistem, negara bagian harus menjamin bahwa undang-undang negara tersebut cukup melindungi wilayah NERR untuk riset dan pendidikan.

Dalam rangka pembentukan perangkat pada tingkat negara bagian dan daerah, CZMP NOAA mendorong negara bagian dan teritori untuk menyusun program sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sementara itu, CZMP menjamin bahwa mereka akan secara simultan menghadapi masalah-masalah bahaya pesisir, erosi pesisir, penurunan kualitas air, rusaknya lahan basah, meningkatnya kepeduliandan peranserta masyarakat, serta pembangunan dan revitalisasi pantai. Saat ini program pesisir dari 32 negara bagian dan teritori yang disetujui meliputi 99 persen dari lautan di wilayah AS dan garis pantai Great Lake. Negara-negara bagian dan teritori ini merupakan rekan kerja dalam pengelolaan zona pesisir bagi pemerintah federal dan penguasa lokal lainnya.

2.2 Undang-undang Pengelolaan Zona Pesisir AS tahun 1972 (UUPZP)

Program pengelolaan zona pesisir nasional merupakan suatu hal yang paling berarti dalam UU Pengelolaan Zona Pesisir tahun 1972 dan telah mengubah perilaku dan pembangunan wilayah pesisir AS secara luar biasa. Namun UUPZP tidak diterapkan melalui peraturan pemerintah yang disesuaikan dengan standar yang terperinci, sebagaimana yang biasa dijalankan pada peraturan federal lainnya. Dalam hal ini, Kongres AS menentukan:

“Kunci perlindungan yang lebih efektif dan pemanfaatan sumberdaya tanah dan air di zona pesisir adalah menghimbau negara bagian untuk menjalankan wewenang mereka seutuhnya atas tanah dan perairan di zona pesisir dengan membantu negara bagian, bersama-sama dengan pemerintah federal dan pemerintah daerah dan pihak lain yang juga berkepentingan dalam membangun program pemanfaatan tanah dan air di zona pesisir, termasuk juga menyatukan kebijakan, kriteria, standar, metoda dan proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan lahan dan air melebihi kepentingan lokal.” [UU Pengelolaan Zona Pesisir AS tahun 1972, Bagian 302 (1)]

Dalam menghimbau negara bagian menegakkan wewenang mereka atas sumberdaya pesisir, UUPZP juga berbeda dengan Statuta Kongres lainnya. Peranserta merupakan suatu hal yang sifatnya sukarela, dan negara bagian diberi fleksibilitas luas dalam rancangan program dan pelaksanaannya namun masih bisa mendapatkan sertifikasi federal untuk program mereka. Sebagai contoh, rancangan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasar program federal dapat didasarkan pada pengawasan negara bagian secara langsung, atau lokal atau daerah atas perairan dan wilayah pesisir.

UUPZP tidak mencoba mengendalikan detail rancangan dan pelaksanaan dari program pengelolaan pesisir negara bagian dan daerah. Sebaliknya kongres menetapkan bahwa syarat-syarat minimum untuk sertifikasi didasarkan pada proses. UUPZP menetapkan bahwa rangkaian proses tersebut berpusat pada kategori tertentu dari kegiatan yang dirasa penting bagi kongres dalam pembuatan keputusan yang transparan dan dapat diikuti. Kategori dari syarat-syarat dapat dijelaskan secara bebas sebagai berikut:

- **Pengertian Zona Pesisir**

Bagian penting dari UUPZP adalah pengertian zona pesisir. Bukannya menjelaskan secara konkrit mengenai zona pesisir, melainkan menerangkan zona pesisir secara umum sebagai laut teritorial dan daratan yang berbatasan “sampai pada batas yang diperlukan untuk mengawasi pantai, pemanfaatan atasnya yang memiliki akibat langsung dan signifikan pada perairan pesisir” dan ekosistem. Akibatnya, tiap negara bagian mengartikan pengertian ini berkaitan dengan kondisi lokal dan menetapkan batas-batas ‘zona pesisir’ berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing.

- **Syarat-syarat informasional dan definisional**

Syarat-syarat ini menentukan standar minimum berkenaan dengan pengumpulan informasi (misalnya pengetahuan). Contohnya, pada jenis dan batas sumberdaya pesisir, sumber-sumber yang menimbulkan tekanan pada sumberdaya, identifikasi wilayah dengan perhatian khusus (misalnya, habitat kritis atau wilayah yang menjadi perhatian nasional), dan daftar wilayah yang tertutup untuk penduduk. Juga tercakup syarat-syarat pengertian batas-batas zona pesisir secara jelas, menetapkan pemanfaatan daratan dan air yang sesuai dan layak, dan pengertian lainnya yang berguna bagi pelaksanaan program.

- **Syarat-syarat Kelembagaan dan Organisasi**

Agar memenuhi syarat sertifikasi nasional, setiap program harus menetapkan dengan jelas wewenang hukum dan penyusunan organisasi (mekanisme penerapan) di mana negara bagian dapat menjalankan program pengelolaan zona pesisirnya. Ini meliputi, antara lain, suatu pendaftaran yurisdiksi yang bakal saling bersinggungan, dan bagaimana cara menyelesaikan atau digunakan untuk mendukung program pengelolaan pesisir. Untuk hal-hal tertentu, pembuat UU negara bagian perlu dilibatkan untuk memberikan perjanjian kelembagaan berdasarkan hukum.

- **Syarat-syarat Prosedural**

Untuk sertifikasi nasional program pengelolaan zona pesisir setempat, program tersebut harus mencakup koordinasi dan prosedur yang jelas yang menjamin kerjasama antar departemen dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan sumber daya pesisir. Normalnya hal ini meliputi permintaan dan pembuatan dokumen memorandum kesepahaman yang sesuai yang dibuat antara pemerintah federal, negara bagian atau badan setempat dan disetujui oleh badan pemerintah yang berwenang atau pembuat UU.

- **Perencanaan**

Proses perencanaan harus dibentuk dengan prioritas pemanfaatan wilayah tertentu di zona pesisir. Hal ini melibatkan pembuatan daftar sumber daya dan mengidentifikasi wilayah konservasi, rekreasi, ekologi, historis dan estetika dan membuat rencana pelestarian wilayah tertentu. Sertifikasi juga memerlukan penentuan wilayah yang rusak secara signifikan dan erosi dengan rencana terkait untuk menangani kerusakan tersebut. Yang sangat penting, rencana menerima sertifikasi nasional harus meliputi suatu proses untuk "pertimbangan yang sesuai dengan kepentingan nasional" seperti kegiatan penentuan tempat fasilitas energi dan prioritas pembangunan nasional lainnya.

- **Pendanaan**

UUPZP menyediakan Program Dana Bantuan Pembangunan Pengelolaan untuk merangsang negara-negara bagian menjalankan rencana program pengelolaan pesisir mereka. Awalnya, ketentuan pemberian bantuan dana ini adalah dengan perbandingan 4:1 antara federal dan negara bagian. Suatu negara bagian tidak diperbolehkan menerima lebih dari 4 dana bantuan, dan pemberian dana yang berturut-turut hanya diperbolehkan bila ada hasil yang signifikan dalam rencana pengelolaan pesisir. Bantuan secara administratif juga disediakan berdasarkan formula yang serupa, asalkan sejumlah persyaratan tertentu dipenuhi, termasuk dana pendamping dari negara bagian. Sampai tahun 1990 banyak wilayah pesisir masuk dalam rencana pengelolaan pesisir. Akibatnya Program Pemberian Dana Bantuan Peningkatan Zona Pesisir memaksa negara bagian untuk memfokuskan pada cara peningkatan program mereka di beberapa wilayah. Wilayah ini termasuk perlindungan lahan basah pesisir, pengelolaan pada wilayah bahaya, akses publik, pengawasan pencemaran laut dan sampah, perencanaan pengelolaan wilayah tertentu dan perencanaan sumberdaya laut.

2.3 Keberhasilan Sertifikasi Sukarela Berdasar UUPZP

UUPZP telah mencetak keberhasilan yang luar biasa dalam hal kesukarelaan negara bagian menyerahkan program mereka pada pemerintah federal untuk diperiksa dan disertifikasi. Sampai tahun 1999, sebesar 99 persen wilayah pantai dan pesisir AS pada teritori yang layak mengelola sumberdaya pesisir telah mendapat pengakuan oleh pemerintah federal melalui program pengelolaan pesisir terpadu. Saat ini, pemerintah federal dan negara bagian memfokuskan pada perbaikan komponen program yang berkaitan langsung pada kesehatan dan kualitas hidup ekosistem pesisir bagi generasi kini dan masa mendatang.

Ada dua alasan utama mengapa sejumlah negara bagian dengan sukarela menyerahkan program mereka untuk diperiksa dan disertifikasi. Pertama, insentif pendanaan (bantuan dana) yang diberikan dengan dasar pembagian-biaya (*cost sharing*) dengan negara bagian yang membina program pengelolaan pesisir menurut panduan sertifikasi pemerintah pusat. Lebih penting lagi, berdasarkan UUPZP, pemerintah federal memberikan jaminan konsistensi federal pada negara-negara bagian dengan program tersertifikasi.

Jaminan Syarat Konsistensi Federal UUPZP menyatakan bahwa, hanya dengan pengecualian tertentu, kegiatan lembaga federal dan kegiatan yang didanai, disponsori, atau diizinkan oleh pemerintah federal akan selalu konsisten dengan negara bagian atau rencana pengelolaan zona pesisir yang dibuat lokal yang disetujui oleh pemerintah federal. Selain itu, berdasarkan UUPZP, setelah pemerintah federal menyetujui rencana negara bagian, pemerintah federal tidak bisa menambahkan persyaratan yang baru di masa depan sebagai syarat dalam perpanjangan sertifikasi pemerintah federal, kecuali pada kasus yang berpengaruh terhadap negara secara luas. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan lokal dan kepengurusan sumberdaya pesisir dan mendorong pemerintah federal untuk menyesuaikan dengan nilai dan harapan di tingkat lokal, sehubungan dengan pemanfaatan lahan pesisir dan air. Klausul konsistensi federal membantu, dan dalam banyak kasus meminta, kerjasama dan koordinasi antara lembaga negara bagian dan badan-badan federal.

Sementara kesukarelaan merupakan salah satu alasan keberhasilan UUPZP, ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan, ditinjau dari perspektif federal. Beberapa kali disebutkan oleh tuan rumah SWI di tingkat nasional, bahwa pemerintah pusat memiliki kemampuan praktis yang rendah untuk mengawasi implementasi dan administrasi program pesisir negara bagian dan lokal. Setelah program disertifikasi, kecil kemungkinan pemerintah federal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal atau dalam tinjauan aspek pengelolaan program. Pejabat federal menyatakan bahwa hal ini bisa membantu perkembangan seluruh ICMP Amerika Serikat.

2.4 Tanggapan Negara Bagian dan Lokal terhadap UUPZP Melalui Program Pengelolaan Pesisir Terpadu

Zona pesisir AS dan teritori umumnya meliputi tanah dan perairan sejauh tiga mil ke arah laut, ke batas daratan yang mungkin berbatasan dengan batas secara politik (misalnya batas daratan dari semua pesisir *county/kabupaten*), batas administratif (misalnya jalan raya terdekat), batas fungsional (misalnya batas ekosistem penting) atau sejumlah kombinasi dari batas tersebut. UUPZP hanya mensyaratkan bahwa batas zona pesisir ditetapkan dan mengizinkan pemerintah negara bagian dan lokal memutuskan metoda yang tepat sesuai dengan kondisi lokal.

Banyak negara bagian memakai pendekatan berjenjang untuk menetapkan zona pesisir, biasanya

dua jenjang. Jenjang satu mencakup wilayah “yang paling berinteraksi dengan pantai” atau “zona yang paling terpengaruh”. Jenjang dua meliputi sisa zona yang dianggap tidak langsung berinteraksi dengan zona pesisir. Perizinan dalam Jenjang satu biasanya mensyaratkan setiap pemanfaatan pembangunan yang diusulkan dirancang sebagai “pemanfaatan bergantung pada pesisir” sebelum dianggap sesuai untuk zona dekat pesisir. Jenjang dua kemudian mempertimbangkan untuk pemanfaatan berizin pembangunannya yang tidak terlalu bergantung pada lokasi yang berbatasan dengan pantai. Dalam pertemuan antara peserta SWI dan Komisi Pesisir Rhode Island, negara bagian yang lebih kecil dari yang lain, diungkapkan tentang tiga jenjang pendekatan. Ini mencakup “zona pengaruh utama, kedua: zona yang dipisahkan oleh batas daratan dari *county*/kabupaten pesisir, dan ketiga: yang meliputi seluruh negara bagian dalam zona pesisir”. Di Florida dan Hawaii seluruh negara bagian juga dirancang sebagai zona pesisir, kecuali bagi tanah-tanah federal dan tanah suku Indian.

Berdasarkan UUPZP, struktur pengelolaan untuk mendapat sertifikasi nasional tidak ditentukan. Pendekatan yang dipakai bervariasi, mulai dari kontrol langsung keseluruhan daratan dan perairan pesisir yang ditetapkan, sampai perjanjian regional di antara badan-badan hingga pengelolaan bersama. Umumnya, negara bagian tidak mengelola zona pesisir mereka sebagai satu bagian yang berdampak, yang mencakup seluruh unit. Biasanya otoritas pengelolaan zona pesisir dibagi antara negara-negara bagian dan otoritas lokal dengan pendelegasian sebagian tinjauan pengelolaan pesisir dan otoritas perizinan. Di beberapa negara bagian, unit lokal merupakan kabupaten atau pemerintahan kotamadya, yang lain merupakan komisi wilayah pengelolaan khusus yang mengelola wilayah yang berbatasan secara politis (misalnya, membagi suatu negara bagian menjadi zona regional yang diatur secara individual). Meskipun begitu, pada semua kasus, suatu badan pengendali memegang kontrol atas program-program lokal melalui suatu mekanisme.

Ada penggunaan luas hubungan administratif negara bagian-lokal di pesisir dan teritori Amerika Serikat. Biasanya wewenang *county*/kabupaten atau *municipal*/kotamadya (kota atau kotapraja) menyusun program pengelolaan zona pesisir lokal dengan bantuan teknis dari tingkat negara bagian. Setelah program lokal ini disetujui, sebagian wewenang perizinan dan penerapannya diserahkan ke tingkat lokal dengan kendali longgar dari badan pengendali negara bagian.

Di Florida kerjasama seperti ini meliputi juga badan pemerintah federal dalam persekutuan yang saling menguntungkan antara badan negara bagian dan lokal. Di Key West, pembangunan yang terus menerus berakibat buruk pada terumbu karang sebagai akibat pembuangan limbah manusia. Terumbu karang ini merupakan satu-satunya terumbu karang di AS yang berbatasan dengan daratan dan memiliki nilai tak terkirakan dalam hal pariwisata dan keuntungan lain. Jumlah penduduk setempat yang kecil (kira-kira hanya 80.000 orang) membuat mereka tak mampu membiayai pembangunan fasilitas pengolahan limbah senilai US\$ 50 juta. Suatu kesepakatan dicapai dengan pemerintah federal yang menetapkan terumbu karang Key West sebagai Cagar Alam Kelautan Nasional. Kemudian dana pemerintah federal diserahkan untuk mendanai perlindungan dan pengelolaan terumbu karang, termasuk untuk membangun fasilitas pengolahan limbah.

Pemanfaatan Rencana Pengelolaan Daerah Khusus (Special Area Management Plans/SAMPs) sangat luas dan ada pada program pengelolaan pesisir di hampir semua negara bagian. SAMPs digunakan untuk melindungi serangkaian fungsi habitat dan ekosistem hutan bakau dan lahan basah di Florida, hingga Puget Sound dan perairannya di Negara Bagian Washington. SAMPs juga kadang dipakai dalam melindungi hak-hak Suku Indian. Di Wilayah Perairan Puget Sound Negara Bagian Washington, negara bagian bekerja dengan pejabat federal menetapkan daratan Suku Indian Nisqually sebagai suaka alam nasional. Hal ini memberi hak-hak pemanfaatan khusus pada Indian Nisqually, sekaligus melindungi perairan dalam hal pengaruh kualitas air di Puget Sound. SAMPs beraneka ragam, dengan

bermacam struktur, penjelasan yang beragam dan serangkaian unsur program. SAMPs juga bisa disebut sebagai cagar alam laut, wilayah perlindungan kelautan atau lahan basah, suaka alam atau wilayah dengan perhatian khusus. Mereka memberikan kekhususan lebih tinggi dalam hal pemanfaatan wilayah tertentu.

Konsistensi pemerintah federal, negara bagian dan lokal berperan penting dalam program pengelolaan pesisir negara bagian yang disertifikasi oleh federal. Ini mensyaratkan agar kegiatan dan gerakan federal, negara bagian dan lokal harus konsisten dengan persyaratan dan kebijakan dalam program pengelolaan zona pesisir negara bagian yang disetujui. Seperti yang dipelajari oleh peserta SWI selama rapat-rapat di Washington, NOAA berperan dalam menjamin konsistensi antara program pesisir negara bagian dan lokal oleh badan federal, proyek yang disponsori oleh badan federal, proyek yang diberi izin oleh badan federal dan proyek yang didanai oleh dana federal.

Di setiap negara bagian, badan pengendali pengelolaan pesisir meninjau kegiatan federal untuk memastikan kesesuaiannya. Jika tidak sesuai, badan pengendali pengelolaan pesisir menghubungi badan yang mengurus tindakan yang melanggar dan memberitahu NOAA. Dengan cara ini konflik yang potensial bisa diselesaikan atau dihindari. Membantu terjadinya konsistensi, dan menyelesaikan konflik antara badan federal dan negara bagian, merupakan satu layanan paling utama NOAA bagi negara bagian dengan program tersertifikasi.

Beberapa unsur program di negara-negara bagian perlu mendapat catatan khusus. Di Rhode Island, pelanggaran atas rencana pengelolaan pesisir dicatat dalam surat tanah pemilikannya. Ini membatasi gerakan pemilik selama pelanggaran masih berlaku, misalnya, dalam permohonan hipotek.

Contoh lain tentang program yang secara efektif memelihara tata pemerintahan tradisional berpusat desa yang menggabungkan peraturan pengelolaan pesisir terpusat adalah American Samoa's Village Liaison/Facilitator Program. Tempat ini tidak termasuk dalam acara kunjungan SWI. Di sini, setiap desa memilih penghubung desa, sementara program pengelolaan pesisir memilih fasilitator. Hal ini mendorong diskusi mengenai masalah-masalah dan penyelesaian konflik di dalam dan antara hukum tradisional yang di Indonesia mirip dengan yang dikenal sebagai hukum adat.

Yang utama di antara program negara bagian adalah pendekatan yang telah menyumbangkan keterlibatan efektif masyarakat/penduduk setempat, keberhasilan pengelolaan bersama, atau proses penetapan keputusan bersama, proses penyelesaian konflik dan proses koordinasi dan harmonisasi (termasuk konsistensi program pengelolaan zona pesisir oleh badan negara bagian). Tiap negara bagian dan teritori berbeda cara pelaksanaannya. Negara bagian dan program yang dikunjungi memberikan beberapa gagasan dalam penyusunan kelembagaan yang digunakan.

2.5 Desain Studi Wisata dan Komentar Terpilih mengenai Pertukaran Informasi

Lokasi kunjungan SWI dipilih sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan peserta dalam kerangka kerja dan tujuan Proyek Pesisir. Berikut adalah daftar lokasi-lokasi yang dikunjungi dengan tema umum dan tujuan tiap lokasi.

• Washington, D.C., 12 – 15 September 2000

Tujuan utama SWI adalah memberikan gambaran pada peserta Indonesia mengenai bagaimana praktek dan pelaksanaan program pengelolaan pesisir terpadu. Maka pada awal studi wisata SWI

mencantumkan pertemuan-pertemuan dengan para manajer dan pimpinan pengelolaan pesisir yang bekerja di tingkat nasional. Diskusi terfokus pada program nasional AS tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan dan menyelenggarakan suatu forum bagi peserta Indonesia untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi dan kesempatan yang mulai terbuka di Indonesia kepada komunitas pembangunan internasional di Washington. Agenda studi menekankan pada mekanisme hukum dan finansial yang digunakan dalam meraih tujuan pengelolaan pesisir nasional, melalui upaya terpadu dengan rekan negara bagian dan lokal dan inisiatif pengelolaan wilayah khusus, seperti cagar alam laut dan program daerah kuala nasional. Distribusi wewenang di antara badan negara dan pengaturan koordinasi antar badan dibahas, juga struktur organisasi dan strategi operasional bagi pelaksanaan program nasional.

Pertemuan-pertemuan dengan NOAA mengungkapkan detail penting tentang pekerjaan mereka. Menurut staf NOAA, sebesar US\$ 60 juta dana federal setiap tahun dibagikan pada negara bagian melalui program NOAA. Dari jumlah itu, sebanyak US\$ 20 juta dipakai untuk program CZMP. Kebanyakan negara bagian kemudian menyamakan dana ini dari anggaran belanja negara bagian. Dana yang diserahkan untuk penelitian pesisir tidak termasuk dalam anggaran ini. Hal-hal tambahan lainnya termasuk:

- NOAA bekerja dan memelihara pengawasan dan monitoring di zona pesisir;
- Organisasi ini bekerja demi efisiensi dalam monitoring dan pengelolaan;
- NOAA mengusahakan kerjasama publik-swasta,
- NOAA menanam modal dalam penelitian ilmiah dan berfokus pada kebutuhan penduduk pesisir dan kelautan lewat program yang dirancang untuk pengelolaan dan pembangunan pesisir dan kelautan,
- Kantor Kelautan Nasional NOAA dibagi menjadi dua kantor: 1) Wilayah Pengelolaan Khusus (SMAs), termasuk wilayah perlindungan; dan 2) Pengelolaan Pesisir Keseluruhan dan Umum.

NOAA menjalankan sistem Wilayah Perlindungan Laut di sekeliling batas negara AS berdasarkan dekrit presiden. Proses pembentukan sistem ini mencakup inventaris wilayah yang ada, identifikasi kelemahan sistem dan wilayah yang terlewat, pembangunan pengelolaan berbasis ilmiah untuk wilayah tersebut, dan mengikutsertakan masyarakat dan penduduk setempat dalam keputusan penetapan wilayah perlindungan. Termasuk ke dalam kriteria tersebut adalah sumberdaya terumbu karang, yang dilindungi berdasarkan dekrit presiden.

Sebuah pelajaran penting yang dibicarakan oleh kepala program pengelolaan pesisir NOAA adalah kesulitan dalam mendorong negara bagian memperbaiki kualitas program pengelolaan zona pesisir mereka tanpa otoritas untuk melakukan inspeksi terbatas dan evaluasi. NOAA memiliki keterbatasan. Otoritasnya hanya sampai kepada perencanaan yang diserahkan oleh negara bagian dan sudah disetujui, karenanya perbaikan sulit dilaksanakan. Saat ini NOAA sedang berusaha meningkatkan otoritasnya dan memperbaiki indikator-indikator untuk menilai seberapa jauh program pengelolaan pesisir dijalankan dan sejauh mana mereka mencapai tujuan. Hal ini merupakan suatu hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan untuk program pengelolaan pesisir terpadu Indonesia di tingkat nasional.

Penemuan penting dalam program pengelolaan zona pesisir AS adalah kontribusi pencemaran sumber tidak beraturan (*non-point*) pada kerusakan perairan pesisir dan habitatnya. Sebenarnya, diketahui bahwa pencemaran tidak beraturan, yaitu pencemaran yang tidak berasal dari satu sumber saja seperti limbah air dari saluran jalan raya atau limbah pertanian, berpotensi lebih besar dalam menyebabkan kerusakan perairan pesisir dan habitatnya dibanding pencemar beraturan. Karena itu, pada tahun 1990 disusun Undang-Undang Air Bersih (Clean Water Act) yang memungkinkan NOAA dan Badan

Perlindungan Lingkungan Hidup AS (USEPA) bersama-sama menjalankan kontrol terhadap pencemaran di wilayah pesisir dari sumber non-point melalui UUPZP.

Selain pertemuan yang membahas tentang pengelolaan pesisir, diskusi juga diadakan dengan staf U rusan Perikanan Laut Nasional (NMFS) NOAA menyangkut pengelolaan perikanan dan kebutuhan akan data dan pembuatan keputusan berbasis ilmiah dalam hal pengelolaan perikanan. Pengalaman AS dengan badan penasehat perikanan regional (RFACs) dibahas dan juga tinjauan mengenai cara badan ini memelihara stok ikan. RFACs digarisbawahi sebagai suatu program AS yang tidak berhasil mencapai misinya merjamin tingkat ketersediaan ikan. Karena perubahan keanggotaan badan, badan ini didorong untuk lebih memaksimalkan produksi ikan.

Staf NMFS juga membicarakan prosedur pemberian lisensi penangkapan ikan di AS, sebagian besar diurus oleh negara bagian sendiri. Perusahaan penangkapan ikan yang berharap bisa beroperasi di lebih dari satu negara bagian harus memiliki lisensi penangkapan ikan ganda. Sistem lisensi ini juga berlaku bagi pemancingan rekreasi dari negara bagian ke negara bagian lain. Namun, pengawasan terhadap kapal penangkap ikan komersial yang besar menunjukkan bahwa mereka berlayar keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk menangkap ikan sebelum memasuki wilayah negara bagian lainnya. Tidak ada persyaratan lisensi federal kecuali untuk menangkap ikan di wilayah ZEE.

Satu masalah terbesar yang dihadapi oleh staf NMFS adalah kurangnya informasi untuk membuat kebijaksanaan yang akurat untuk pengelolaan perikanan. Akibatnya, melalui perundangan federal NMFS diharapkan mengelola sed iaan ikan berdasar prinsip pencegahan.

Menanggapi pertanyaan Menteri Sarwono Kusumaatmadja mengenai bagaimana NOAA mendapatkan dukungan dalam Kongres AS, kepala program pengelolaan pesisir NOAA menjawab bahwa konstituen Kongres AS datang dari konstituen setempat termasuk penduduk, LSM, kelompok sektor swasta dan lainnya. Usaha NOAA bermula dari murid sekolah dan terus berlanjut melalui ikatan media lokal dan nasional, dan juga memberikan program pada tingkat lokal yang memberi keuntungan pada komunitas lokal seperti Program Sea Grant. Akhirnya, NOAA berpendapat bahwa dukungan nasional datang melalui usaha lokal. Tambahan lagi, NOAA mengkaitkan hasil di tingkat lokal dengan sumber keuangan yang tersedia untuk kegiatan tingkat lokal.

Program Sea Grant yang dimulai tahun 1966 merupakan suatu cara menjembatani kekosongan antara pembangunan dan konservasi sumber daya laut AS. Saat ini, Program Sea Grant tersedia di 29 universitas. Cita-cita besarnya adalah membantu pembangunan dan meningkatkan perekonomian yang kompetitif melalui teknologi global. Program Nasional Universitas Sea Grant, melalui riset terpadu, transfer teknologi dan program penyuluhannya, menyumbang bagi kelangsungan pembangunan sumberdaya kelautan, memperkuat komunitas pesisir dan bisnis pesisir, dan bekerja sama dengan bisnis teknologi tinggi untuk menerapkan teknologi berbasis riset.

Program Sea Grant meliputi tiga bidang utama: 1) Teknologi maju untuk produk dan proses komersial; 2) Produksi makanan laut; dan 3) Pembangunan ekonomi pesisir. Universitas Sea Grant berkontribusi dalam ekonomi Amerika Serikat yang sehat dan berkembang, infrastruktur kelautan yang praktis dan modern dan serangkaian produk pesisir dan kelautan yang berbasis pembangunan dan aplikasi teknologi canggih. Rancangan semacam universitas Sea Grant merupakan suatu hal yang kompetitif dan hanya dibuat satu untuk tiap negara bagian. Selain itu, Universitas Sea Grant sering membantu bisnis lokal dalam pemenuhan peraturan dan pemerintah setempat dengan membuat dan mengeluarkan perundangan yang sesuai. Aspek yang sangat penting dari Program Universitas Sea Grant adalah bahwa mereka dapat menerima dan beroperasi dengan dana selain dari NOAA, karenanya

dapat menjalin kontak dengan departemen lain dan sumber-sumber lainnya untuk menjalin usaha pesisir dan kelautan.

Meskipun tidak secara langsung menjadi bagian dari UUPZP, aspek lain yang juga menarik dari UU Amerika Serikat berkenaan dengan pembangunan pesisir dan kelautan adalah Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam (NRDA). Peraturan yang mendukung NRDA dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri AS pada tahun 1986 dan mencantumkan ancaman hukuman bagi perusahaan dan lembaga lain yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang besar dan serius akibat perbuatan mereka, khususnya dalam hal pembuangan unsur-unsur berbahaya atau beracun ke lingkungan hidup. Hal ini diikuti dengan UU Pencemaran Minyak (OPA) tahun 1990. OPA dibuat untuk memaksa perusahaan dan lainnya agar bertanggung jawab atas pemulihan kembali sumber daya dan kondisi lingkungan seperti keadaan semula setelah pembuangan limbah minyak dalam jumlah besar. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab harus memberi ganti rugi atas kerusakan ekonomi dan lingkungan selama periode perbaikan. Kedua perundangan itu menjamin perbaikan atas kerusakan lingkungan oleh pihak yang bertanggung jawab dan sering digunakan di wilayah pesisir dan kelautan (misalnya, limbah minyak Exxon-Valdez di Alaska).

Pertemuan juga diadakan antara Laksamana Muda Busran Kadri, Dirjen Monitoring, Pengawasan dan Penerapan dan Kapten Dave Westerholm, Chief of Emergency Response di Kantor Penjaga Pantai AS (USCG) di Washington, D.C. Hal ini memberi kesempatan berinteraksi langsung dan berdiskusi mengenai otoritas penjaga pantai dan tugas-tugas di wilayah pesisir. Termasuk juga kegiatan penjaga pantai berkenaan dengan pencarian dan penyelamatan, bantuan navigasi, perlindungan lingkungan laut dan keadaan darurat, keamanan laut, penerapan hukum berkaitan dengan perikanan dan penyelundupan, mobilitas (pemecah es) di wilayah utara AS dan otoritas pertahanan nasional dalam keadaan perang. USCG juga bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan laik laut dan program kontrol pelabuhan untuk kapal asing dalam teritori AS, termasuk kapal pengangkut pengungsi. Aspek penting dalam tanggung jawab USCG meliputi juga kemampuan merangani limbah minyak dan limbah berbahaya yang mendukung badan lain dalam penanganan darurat kelautan dan pesisir.

Pertemuan dengan Departemen Luar Negeri AS diadakan (untuk lebih detail baca Lampiran G, Agenda Harian SWI) di mana staf Departemennya menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk mematuhi perjanjian dan traktat internasional, terutama dalam melindungi penyuluhan, pelanggaran terhadapnya berdampak ekonomi negatif potensial dalam hal ekspor produk perikanan Indonesia ke AS. Hal ini penting karena sertifikasi tahunan harus dipunyai oleh negara-negara yang mengekspor produk kelautan tertentu. Staf Departemen Luar Negeri AS menawarkan kesediaannya membantu usaha Indonesia mendapatkan sertifikasi tersebut, khususnya berkaitan dengan perangkat penolak penyuluhan atau TED, seperti juga sertifikasi berikutnya mengenai akuarium dan penangkapan serta pengapalan ikan karang.

Masih di Washington, peserta SWI bertemu dengan Hattie Babbitt, Deputy Administrator USAID. Pertemuan ini membicarakan keberhasilan kerjasama Indonesia dan AS di masa lalu, dan khususnya enam area penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia setelah krisis moneter dan pembangunan selanjutnya. Keenam area ini meliputi transisi demokratisasi, pemulihan ekonomi, pengelolaan lingkungan, kesehatan dan gizi, bantuan pangan, dan pengadaan lapangan kerja. Ms. Babbitt menekankan kepentingan global dari biodiversitas Indonesia dan ekologi. Dia menegaskan komitmen USAID dalam mendukung usaha Indonesia menuju pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, terutama selama tekanan pada lingkungan meningkat dan tekanan akibat krisis moneter. Ms. Babbitt menekankan bahwa komitmen ini terlihat nyata melalui dukungan USAID pada pekerjaan yang sedang berjalan melalui kerjasama dengan Pusat Sumber Daya Pesisir Universitas Rhode Island. Kelompok

ini juga membahas pentingnya kelanjutan hubungan antara AS- Indonesia.

• **Akuarium Baltimore, Maryland, 15 September 2000**

Akuarium Nasional di Baltimore (NAB) menjadi tuan rumah seminar bagi para anggota delegasi dengan titik perhatian pada pemahaman proses revitalisasi perairan desa dan peran fasilitas penyuluhan publik seperti akuarium. Selama seminar, Direktur Akuarium, David Pittenger, dan staf seniornya, Dr. Valerie Chase, Glenn Page dan Nancy Hotchkiss menjelaskan peran kunci yang dimainkan NAB baik dalam menyumbang pembangunan ulang perairan Baltimore maupun sebagai sarana pendidikan nasional terkemuka dan perluasan fasilitas. Saat ini NAB merupakan akuarium tersukses Amerika Utara, meskipun harus terus menerus memperbaharui dirinya agar selalu relevan pada pasar pengunjung yang terus berubah dan layak jual secara komersial. Peserta mencatat banyak persamaan antara NAB dengan Akuarium Seaworld di Jakarta. Namun mereka juga mencatat bahwa dalam kasus NAB, lebih besar peran akuarium sebagai pendidikan publik "ex-situ" (luar ruang) dan dalam riset dan pelatihan.

Keberhasilan NAB yang diakui dalam mempromosikan revitalisasi pusat kota Baltimore telah menghasilkan sejumlah keuntungan, banyak di antaranya yang sebelumnya tidak terduga (misalnya, berkurangnya kejahatan, meningkatnya kebanggaan warga negara, dan lain-lain). Selama mendiskusikan keuntungan ini, staf NAB menjelaskan perankatalistik dari perancang akuarium dalam bekerja dengan pemerintah setempat untuk mencapai konsep pembangunan yang terpadu, termasuk sistem pelayanan terpadu untuk masalah parkir, taman, dan lain-lain. Peserta mencatat bahwa integrasi demikian sulit sekali diterapkan di Indonesia. Suatu analogi yang menarik dibandingkan dengan akuarium Seaworld (yang dibangun di atas tanah reklamasi, jauh dari pusat kota dan yang mungkin sebenarnya bisa dibangun di jantung kota tua, di daerah Kota, Jakarta) jika pendekatan yang serupa dari NAB dapat ditiru.

Dalam konteks serupa, peserta juga tertarik dengan peran penting yang dimainkan oleh NAB dalam membantu pengembangan kurikulum pendidikan kelautan nasional dan materinya. Staf NAB menjelaskan bahwa lewat jaringan profesional yang beragam, NAB mampu memberikan sumberdaya utama, sekaligus akses terhadap informasi dan para ahli (misalnya tentang terumbu karang) yang tidak tersedia di Baltimore. Melalui proses kemitraan di berbagai tingkat dengan bermacam-macam organisasi lokal, nasional dan internasional, NAB memegang peran kepemimpinan dalam pendidikan kelautan yang tidak ditemukan di Indonesia.

• **Florida Selatan, 15-18 September 2000**

Cagar Alam Laut Nasional Florida Keys (FKNMS) merupakan suatu contoh pengalaman AS dalam pengelolaan cagar alam laut nasional dan bagaimana peran badan pemerintah federal dan negara bagian berperan sehubungan dengan koordinasi, pendanaan, perencanaan, dan implementasi program. Peserta SWI melakukan diskusi terperinci mengenai perencanaan pengelolaan pesisir yang mempromosikan pembangunan berkesinambungan dengan memperhatikan pariwisata, mengelola ancaman kerusakan pesisir dan polusi, menekankan kegiatan dengan relevansi khusus pada konteks pulau-pulau kecil. Cagar alam tidak hanya melindungi sistem pesisir dan kelautan namun juga menjadi surga bagi Rusa (Key Deer) yang dilindungi dan spesies rawa yang peka.

Populasi Florida Keys adalah sekitar 90.000 penduduk dan pengunjung sekitar 2,5 juta orang tiap tahun, dengan devisa sekitar 1,2 miliar dolar setahun. Dengan menarik lebih dari satu juta pengunjung setiap tahun, FKNMS memiliki kesempatan besar untuk mendapat keuntungan untuk membantu pendanaan cagar alam. Kapal pesiar yang berlabuh di cagar alam ini ditarik biaya pengguna lingkungan sebesar 3 dolar per penumpang (ada rencana untuk menaikkan ongkos ini). Penetapan biaya dilakukan

melalui perjanjian langsung dengan perusahaan pemilik kapal pesiar sehingga transparan. Biaya lainnya dimasukkan dalam harga kamar hotel yang memberikan kelebihan keuntungan untuk cagar alam.

Sebelum membangun FKNMS, kabupaten ini bertanggung jawab untuk mengelola seluruh wilayah Keys yang terdiri dari serangkaian pulau-pulau kecil. Dan lagi, wewenang pembuatan keputusan berlokasi di ibukota kabupaten di luar Keys. Setelah FKNMS dibangun, otoritas pembuat keputusan lebih terfokus pada kebutuhan khusus Keys dan melakukan fungsinya melalui pengelolaan bersama antara wewenang lokal, negara bagian dan federal. FKNMS merupakan suatu contoh unik dari kerjasama negara bagian-federal dalam mengelola pulau-pulau kecil, suatu masalah kunci dan relevan bagi Indonesia. Hal ini terkadang menciptakan kesulitan pengelolaan, namun pada akhirnya akan menghasilkan pengaturan yang lebih kompeten mengenai sumber daya pesisir dan kelautan melalui kombinasi keahlian negara bagian-federal.

FKNMS menyajikan contoh yang menarik dan penting dari cara pemerintah federal menyadari nilai suatu sumberdaya yang tidak terletak di bawah yurisdiksinya, dan mengambil langkah proaktif dan progresif bersama dengan otoritas lokal untuk melestarikan dan melindungi sumberdaya tersebut. Sebelum pembangunan FKNMS, limbah dari pembangunan perumahan yang meluas telah memasuki wilayah pesisir yang berdampak serius terhadap ikan dan sumberdaya terumbu karang di wilayah tersebut. Meskipun begitu, biaya untuk memperluas kapasitas pengolahan air limbah sangat mahal dan di luar kemampuan penduduk. Bekerja sama dengan pejabat lokal dan negara bagian dan penduduk setempat, pemerintah federal merancang daerah Florida Keys selatan sebagai cagar alam laut yang memberikan pendanaan federal bagi perluasan kapasitas pengolahan air limbah. Demikianlah, lewat kerjasama federal-negara bagian-lokal, sumberdaya di Florida Keys dapat dilindungi. Juga disusun aturan pengelolaan, bantuan penerapan dan pendanaan, yang semakin melestarikan nilai yang amat besar daerah tersebut.

Pendorong pendirian FKNMS adalah berlabuhnya tiga kapal besar pada terumbu karang Keys dalam waktu yang berdekatan sehingga mengakibatkan kerusakan yang cukup besar. Setelah rencana pengelolaan dibuat, masyarakat mempunyai waktu sembilan bulan untuk meninjau dan memberi pendapat. Ini termasuk kerja dari 18 anggota komite penasehat masyarakat yang menginformasikan rencana tersebut dan mengatur langkah-langkah penyuluhan. Badan penasehat ini menjadi bagian penyusunan rencana manajemen. Pendidikan merupakan komponen utama dari program FKNMS. Seluruh murid kelas 8 diberi kesempatan mengerjakan tugas sekolah dan makalah mengenai terumbu karang. Dengan demikian murid-murid diajar untuk menghargai dan memahami pentingnya Keys sebagai suatu ekosistem terpadu dan mesin perekonomian wilayah tersebut.

LSM bekerja sama mendukung FKNMS Sahabat Cagar Alam (Friends of the Sanctuary), suatu LSM lokal, memberikan dana untuk proyek tertentu dan membantu dalam penyuluhan. Konservasi Alam mengatur pengelola di luar batas cagar alam, dan LSM lainnya bekerja langsung dengan pemerintah dalam pencarian dana dan bantuan lainnya. Peserta SWI terutama tertarik pada kontribusi ekonomi pada FKNMS dan dengan segera menemukan kemiripan antara FKNMS dan Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara.

Anggota LSM setempat menjalankan patroli mereka sendiri dengan tujuan mendidik pengunjung yang mungkin tidak mengetahui pentingnya mematuhi peraturan cagar alam. Ketika pelanggar sudah diketahui identitasnya, relawan LSM mendatangi pelaku pelanggaran tersebut dan memberitahu kesalahan mereka dan mengapa mereka harus mematuhi peraturan. Kepatuhan pada peraturan memainkan peran penting dalam memelihara sumberdaya cagar alam.

Selain itu, badan penegakan hukum setempat tidak selalu menerapkan hukuman atau denda pada pelanggar peraturan cagar alam. Seringkali, pelanggaran dilihat sebagai cara mendidik masyarakat akan peraturan cagar alam dan lebih lanjut akan membantu mereka memahami peraturan (misalnya, pemancing, pemilik perahu, perenang, dan lain-lain). Bilamana denda dikenakan pada pelanggar, jumlah keseluruhannya akan disalurkan pada program proaktif seperti penyuluhan. Unsur penting pendukung penegakan hukum dan pengawasan adalah perahu yang ditangkap karena penangkapan ikan ilegal dalam wilayah cagar alam disita dan digunakan oleh pengelola cagar alam untuk patroli dan pengawasan cagar alam. Sembilan puluh lima persen fungsi penegakan peraturan dipegang oleh negara bagian.

Satu acara yang paling menarik pada jadwal kunjungan ke Florida Selatan adalah kunjungan ke kantor Dewan Kabupaten Monroe di Big Pine Key. Pengikut SWI dapat berbicara langsung dengan perencana kabupaten mengenai proses dan perangkat yang dipakai dalam membuat rencana pembangunan di Keys dan merancang Rencana Lengkap Kabupaten Monroe yang meliputi perencanaan kabupaten hingga tahun 2010. Unsur perencanaan meliputi tata guna tanah di masa mendatang, konservasi, transportasi, pelabuhan dan bandara, perumahan, air bersih, pengelolaan limbah, rekreasi, koordinasi antar lembaga dan peran serta publik. Peserta SWI terutama tertarik pada perencanaan tata guna tanah atas pulau kecil Keys dan diberi kesempatan melihat-lihat peta dan dokumen pendukung berkenaan dengan pembangunan terkendali dari Keys. Hal ini mencakup peta akuisisi tanah kabupaten yang menandai tanah yang kritis bagi kelangsungan pengembangan Keys (seperti wilayah perairan) yang direncanakan akan dibeli pemerintah kabupaten. Para perancang mengakui sulitnya perencanaan FKNMS karena berbagai kepentingan dan penduduk setempat yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Namun mereka juga mengakui pentingnya perencanaan zona pesisir yang seharusnya dibuat 20 tahun yang lalu.

Satu catatan menarik, para perancang juga memberitahu mengenai dukungan dan kerjasama antar negara bagian. Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup (DEP) Florida menyimpan dan memperbaharui setiap lima tahun sekali peta sumberdaya alam zona pesisir negara (seantero wilayah negara bagian ditetapkan sebagai zona pesisir) yang meliputi inventaris wilayah alami. DEP mengunjungi setiap kandidat proyek dan memanfaatkan data pada peta untuk memutuskan proyek. Departemen Urusan Penduduk (DCA) memastikan terlaksananya tinjauan berkaitan dengan konsistensi federal dan bekerja sebagai fasilitator antara lembaga dan juga pemerintah setempat bila terjadi konflik keputusan dan harmonisasi. Memorandum Perjanjian dibentuk antara berbagai badan negara bagian dan sejumlah agensi federal untuk menjamin keseimbangan. Ada cukup pembagian informasi antar lembaga negara. Badan regional mengembangkan rencana yang harus dipatuhi oleh pemerintah setempat dalam membuat rancangan pengelolaan pesisir mereka. UU Pengelolaan Pesisir Florida menuntut diadakannya dengar pendapat dengan masyarakat dan menjamin interaksi antara pemerintah dan publik/ penduduk setempat dan memfasilitasi kerjasama pengelolaan sumberdaya.

Kunjungan terakhir dalam jadwal Florida Selatan adalah ke Laboratorium Kelautan MOTE NOAA. Di sini, riset dilaksanakan khusus menyangkut fungsi ekosistem pesisir dan kelautan. Mereka disertakan dalam pelaksanaan penanaman terumbu karang dan rehabilitasinya. Laboratorium Kelautan MOTE mengukur tingkat degenerasi terumbu karang yang peka pada serangkaian tekanan seperti kondisi dan suhu laut. Informasi yang dibuat sangat bernilai dalam memahami bagaimana menangani kerusakan kondisi terumbu karang di seluruh dunia. Laboratorium MOTE NOAA dirancang sedemikian rupa sebagai suatu laboratorium yang berdiri sendiri untuk menekan biaya pemeliharaan dan penggajian karyawannya. Sekarang laboratorium ini menjadi terkenal akan riset dan kontribusinya pada ilmu kelautan.

Sepanjang jadwal kunjungan di Florida, kelompok SWI ditemani oleh James F. Murley, Direktur Pusat Gabungan Masalah Lingkungan dan Penduduk Universitas Florida Atlantic. Dr. Murley melengkapi dengan gambaran mengenai masalah pesisir setempat dan bagaimana penyelesaian dengan cara hukum dan proses kesukarelaan.

Satu aspek yang juga penting dalam perjalanan ke Florida adalah hubungan dengan manajer hotel di Florida Selatan yang menekankan pentingnya desain dan konstruksi yang tepat dalam wilayah pesisir. Semua unsur dari arsitektur hingga lanskap semua dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya sekaligus meminimalkan dampak dan biaya pemeliharannya.

• Rhode Island, 18-20 September 2000

Di Rhode Island, peserta SWI disuguhkan analisa lengkap dari perkembangan program pengelolaan negara bagian. Ini merupakan hal penting karena sejumlah penduduk lapisan atas dalam Program Pengelolaan Pesisir Rhode Island rupanya memiliki pengaruh cukup kuat pada implementasi awal Program Pengelolaan Pesisir NOAA di Washington, D.C. Pengaruh besar dari pengalaman Rhode Island mengalir ke tingkat nasional. Ketika konsentrasi terpusat pada program pengelolaan pesisir negara bagian, mereka yang memiliki pengalaman nasional mampu memberikan perspektif luas pada pengelolaan pesisir desentralisasi di AS. Perhatian khusus diberikan bagi proses perizinan dan persyaratan yang dipakai dalam mengelola pembangunan pesisir. Perspektif hukum atas kepemilikan tanah dan hak pakai juga ditunjukkan pada konteks meraih tujuan pengelolaan pesisir. Diskusi yang paling utama membahas sejarah pengembangan program pengelolaan pesisir Rhode Island.

Program pesisir Rhode Island terlaksana melalui sejumlah usaha-usaha pendahuluan sebelum akhirnya dijadikan undang-undang oleh Badan Pembuat UU Negara Bagian. Masalah utama dalam memulai program pengelolaan zona pesisir Rhode Island adalah kurangnya kapasitas pemerintah, universitas dan sektor swasta. Rencana puncak menempatkan tanggung jawab pengelolaan program di tangan Badan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir tau Coastal Resources Management Council (CRMC). Dalam mengatasi kelemahan kapasitas dari sejumlah lembaga pemerintahan negara bagian dan sektor lainnya, perancang awalnya dibantu oleh Coastal Resources Center (CRC) di Universitas Rhode Island (URI). CRC/URI merupakan salah satu lembaga perintis riset pengelolaan pesisir terkemuka dan membantu pusat-pusat di AS yang memberikan keahlian teknis yang diperlukan dalam menyusun perencanaan. Yang terutama, rancangan mengharuskan tanggung jawab dibagi antara serangkaian departemen pemerintah dan badan LSM. Ini merupakan faktor penting keberhasilan program.

Ada beberapa alasan sebelum UU tersebut akhirnya diterima. Termasuk di antaranya industri perikanan yang hancur karena terlalu besarnya jumlah ikan yang ditangkap pada awal abad ini, industri berbasis akuakultur hancur karena menurunnya kualitas air di pesisir, dan hilangnya sejumlah besar nyawa dan harta benda karena badai yang disebabkan oleh pembangunan tanpa batas di zona pesisir. Sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan orang masih mengenang kejadian-kejadian tersebut. Akhirnya, karena pemerintah setempat mengusahakan izin penambangan minyak di Narragansett Bay, dukungan didapatkan untuk pemberlakuan UU negara bagian. Diberlakukannya UU ini sangat signifikan bagi Rhode Island. Tidak saja karena ini memberikan kewenangan untuk melarang penambangan minyak pada salah satu teluk paling indah di Amerika. Namun juga negara bagian bisa menolak pembangunan yang bisa mengubah secara radikal zona pesisir alami di Rhode Island, yang akibatnya bisa mengurangi potensi pendapatan dari pariwisata dan kegiatan lain.

Setelah program disetujui, masih ada banyak kendala untuk mencapai pemenuhan secara luas. Sejumlah tindakan kritical, yang semuanya dibutuhkan demi kesuksesan program pengelolaan zona

pebisnis Rhode Island. Rekan-rekan baik di dalam maupun di luar pemerintahan dan masyarakat dan sektor swasta, dibutuhkan untuk persetujuan program dan implementasinya. Program tidak mungkin bisa sukses tanpa pembagian tanggung jawab. Staf pengelolaan zona pesisir Rhode Island secara teratur menyampaikan pesan yang sama sekian waktu lamanya sebelumnya kepada mitra potensialnya menyadari keuntungan program tersebut. Pengulangan dan pemasaran tema pengelolaan pesisir selama beberapa waktu, seperti hubungan langsung antara daratan dan perairan di zona pesisir, mendidik masyarakat akan masalah dan perlunya tindakan untuk melestarikan zona pesisir. Ditambah dengan skema penilaian lingkungan untuk perusahaan yang bergerak di zona pesisir (misalnya, pemberitaan pada masyarakat mengenai pelaku yang baik dan jelek) dan mekanisme lain yang secara teratur menerangkan pentingnya program pengelolaan pesisir.

Pengembangan program yang diterangkan secara transparan akan menimbulkan proses yang jujur. LSM memegang peran penting dalam mewakili nilai-nilai masyarakat. Rekan dalam badan lain mampu menyumbangkan pengetahuan mengenai peraturan yang tengah berlaku dan sumberdaya yang bisa membantu dalam pelaksanaannya di kemudian hari.

Namun tetap saja, menurut pejabat negara bagian, alasan utama membuat Program Pengelolaan Pesisir Rhode Island adalah keuntungan finansialnya. Saat ini sekitar 5-10 juta turis per tahun mengunjungi Rhode Island, sebagian besar menuju area rekreasi dengan pemandangan indah yang ditawarkan wilayah pesisir Rhode Island. Melestarikan sumberdaya tersebut, dan juga menjaga akses masyarakat menuju ke sana, telah mendatangkan arus devisa yang menjadi kontribusi signifikan pada ekonomi negara bagian baik melalui pengeluaran langsung atau tidak langsung, dan juga lewat pajak tertentu seperti pajak hotel. Di Rhode Island, 69 persen dari jumlah penduduk tinggal di kota-kota pesisir. Penduduk ini juga ingin melindungi lingkungan mereka dan rencana pesisir menyediakan perlindungan bagi lingkungan pesisir.

Badan pendiri pengelolaan zona pesisir Rhode Island, CRMC, terdiri dari 17 anggota dari pemerintah negara bagian dan lokal. Peran dan tanggung jawab CRMC meliputi penilaian kondisi pesisir, menyelenggarakan rencana jangka panjang, mengkoordinasikan kegiatan dan tindakan pemerintah, dan memberi kewenangan izin negara bagian dan lokal. CRMC memberikan panduan gamblang pada penduduk setempat mengenai pemanfaatan apa yang diizinkan di zona pesisir sehingga pemilik tanah memahami persyaratan dan keputusan perizinan dilakukan secara transparan. Selain itu, CRMC adalah agen Rhode Island untuk koordinasi dengan badan pemerintah lainnya berkenaan dengan kegiatan di zona pesisir. Ini mencakup badan negara bagian dan badan federal seperti Korps (Zeni) Angkatan Darat AS sehubungan dengan perizinan kualitas air dan konstruksi utama lainnya dan kegiatan di pesisir Rhode Island. Sebagai contoh, Departemen Pengelolaan Lingkungan Hidup Rhode Island menyusun kriteria dari standar USEPA. Sebaliknya CRMC menyusun standarnya dari Departemen Perdagangan dan NOAA.

Untuk kegiatan-kegiatan yang lingkungannya lebih kecil di zona pesisir, CRMC memegang kewenangan untuk mengeluarkan izin. Perizinan ini dipandu melalui peraturan penetapan penggunaan tanah (*land use zoning*) yang menetapkan dengan jelas manfaat apa yang diperbolehkan di area tertentu di daerah pantai. Perlu waktu pemberitahuan pada masyarakat bagi semua kegiatan di pesisir untuk memastikan adanya peran serta masyarakat. Kebanyakan izin yang dikeluarkan oleh CRMC didasarkan pada "temuan dampak yang tidak signifikan" atau FONSI. Izin FONSI biasanya memerlukan waktu tiga sampai lima hari untuk diproses. Permintaan untuk izin yang lebih luas memerlukan waktu lebih lama tergantung besarnya proyek, tingkat kepentingan masyarakat pada proyek tersebut serta luas dan kesulitan dari potensinya. Pengembang biasanya diajak dalam proses perencanaan CRMC sebelum permintaan izin untuk bantuan pemenuhan. Selama proses ini, anggota CRMC dan

pengembang (*developer*) bekerja bersama untuk mengurangi dampak akibat proyek dan memahami masalah pengelolaan pesisir.

Meski ada usaha yang jelas untuk menginformasikan pada masyarakat dan membuat proses perizinan aksesibel, proses yang awalnya diterapkan oleh CRMC sangat tidak praktis dan lamban. Keputusan perizinan yang sederhana diputuskan terlalu lama dan perizinan yang besar dengan dampak yang potensinya lebih besar tidak mendapatkan cukup informasi untuk diputuskan secara bijak. Proses penilaian dampak lingkungan yang dipakai tidak bisa diterapkan, keputusannya sering tidak konsisten, lamban dan tidak mempertimbangkan dampak kumulatifnya.

Undang-Undang Rhode Island direvisi untuk merampingkan proses tinjauan dan perizinan. Ini meliputi berbagai perizinan yang berbeda-beda untuk kegiatan yang berbeda-beda pula, penetapan wilayah dari seluruh zona pesisir untuk meningkatkan transparansi; prosedurnya disederhanakan sehingga setiap orang bisa dengan mudah memahaminya. Usaha kedua ini mekanis, sederhana, transparan dan sangat berguna dalam mengelola pembangunan dan pemanfaatan zona pesisir Rhode Island. Undang-Undang ini meliputi juga syarat untuk menanggapi secara cepat dan transparan terhadap keluhan dan pengaduan, pelanggaran dicatat pada surat kepemilikan tanah untuk mencegah pemilik menghipotekkan tanahnya, dan dampak kumulatif dimasukkan pada tinjauan perizinan. Ketentuan baru di perundang-ditulis dalam bahasa yang lebih terbuka untuk menjamin fleksibilitas terhadap jangkauan masalah yang belum ditemukan dalam proses perizinan. Staf CRMC Rhode Island juga menunjukkan pentingnya perencanaan dan penetapan wilayah tata guna tanah, yang dikembangkan melalui proses transparan dan debat publik, untuk mengelola dampak pembangunan pesisir dan mengembalikan nilai ekonomis dari wilayah pesisir.

Saat ini, lebih dari 50 persen dana untuk CRMC datang dari sumber dana federal (1,3 juta dolar dari dana federal dan 1 juta dolar dari Negara Bagian Rhode Island). Universitas-universitas biasanya menyediakan berbagai layanan gratis dan rata-rata 300.000-400.000 dolar digunakan untuk dukungan konsultasi pada CRMC.

Pengawasan pekerjaan sangat penting untuk mengukur kesuksesan program CRM Rhode Island. Partisipasi masyarakat merupakan satu indikator untuk mengukur kesuksesan. Sejumlah ukuran kesuksesan dapat ditentukan dengan memeriksa apakah rencana pengelolaan zona pesisir diikuti, efisiensi proses perizinan, tingkat kelangsungan dana, kehadiran pada dengar pendapat publik dan sejumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat.

Yang lebih sulit adalah pengawasan ekosistem langsung dalam hal peningkatan atau penurunan kualitas. Saat ini, indikator seperti kualitas air dan data kerusakan akibat badai memberi indikasi keberhasilan program. Juga, jumlah pertemuan antar lembaga yang berkaitan dengan air merupakan indikator lain (misalnya, berenang, naik perahu, air minum, memancing, dan lain-lain). Ada juga program pengawasan kooperatif berdasarkan UUPZP yang menyediakan tinjauan reguler terjadwal bagi seluruh implementasi program pengelolaan zona pesisir negara bagian di AS. Tim tinjauan ini mengikutsertakan satu orang dari pemerintah federal dan satu orang dari program negara bagian lain. Dengan cara ini, negara bagian akan merasa bahwa tinjauan dilaksanakan secara seimbang sekaligus pembelajaran antar negara bagian ditingkatkan.

Bagaimanapun juga, dalam hal pengawasan keseluruhan, wakil Rhode Island dengan cepat mengetahui perlunya riset demi pemahaman lebih baik atas rejim alami (*natural regime*) dari zona pesisir Rhode Island dan hubungan antara kejadian-kejadian ekosistem dan perilaku manusia. Teknologi baru menjadikan pengawasan lebih gampang dilaksanakan dan keputusan pengelolaan pesisir harus selalu

diperbaharui dengan basis ilmiah. Kemudian dibuat rekomendasi agar program pengelolaan zona pesisir yang baru melakukan tinjauan setiap lima tahun untuk menjamin bahwa pembuatan keputusan dan pengelolaan didasarkan pada data ilmiah terbaru.

Setelah mempelajari masalah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pesisir, tim SWI mempelajari pengalaman Rhode Island dalam pengelolaan perikanan. Secara keseluruhan mereka menemukan bahwa program pengelolaan perikanan di Rhode Island dan AS mengalami kegagalan. Program perikanan sangat demokratis; manajemen menjadi proses alokasi dan bukannya proses konservasi berbasis ilmiah berkaitan dengan tersedianya hasil secara terus menerus. Peran masyarakat (misalnya perencanaan dengan sistem dari bawah ke atas) dianggap sebagai mekanisme yang menjamin pengelolaan sumber daya perikanan yang sesuai – ternyata tidak. Masyarakat lebih tertarik pada peningkatan produksi ikan dari tahun ke tahun. Perencana Rhode Island mencatat bahwa Kanada memiliki pendekatan dari atas ke bawah (misalnya, kontrol dari pusat yang kuat) yang juga memiliki masalah dalam hal pengelolaan yang salah dalam hal perikanan dan kemudian hancur. Kemiripan dari semua program ini adalah kurangnya basis ilmiah pada perencanaan pengelolaan perikanan.

Peserta SWI juga diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan daerah pariwisata Newport, Rhode Island dan para wakil pengembangan bisnis. Kegiatan pengembangan pasar mereka didanai oleh pajak penginapan yang khusus diperuntukkan bagi promosi tujuan wisata dan bisnis ke Rhode Island. Biaya lain seperti tarif pelabuhan dan penambatan menghasilkan pemasukan. Rencana pemasaran yang terpisah dibuat oleh kelompok-kelompok individu, bukan oleh rencana pemasaran tunggal yang diberlakukan untuk sejumlah kelompok.

Contohnya, turis keluarga, golf dan rekreasi lainnya, seminar bisnis, kapal pesiar dan yacht pribadi, dan segmen pasar potensial lainnya, semua diteliti satu per satu dan secara khusus dijadikan target dalam kampanye pemasaran. Selain itu, pembangunan ekonomi melalui pemasaran pariwisata terpadu melibatkan kerjasama dengan bagian lain dari pemerintah seperti perancang transportasi yang menjamin akses yang cukup sampai ke wilayah-wilayah yang sudah diperuntukkan untuk pembangunan pariwisata. Hasilnya sangat dramatis. Dalam waktu 10 tahun, melalui perencanaan terpadu dan pendekatan pemasaran, pariwisata di luar waktu liburan meningkat 20 persen. Enam puluh persen turis Rhode Island datang dari radius 350 kilometer (200 mil) dari Newport.

Lewat pembicaraan dengan penyelenggara pariwisata, peserta SWI mengetahui bahwa bumbupenting pada pembangunan pariwisata adalah mendapatkan apa yang spesial (misalnya produk apa yang dapat dijual) di lokasi tertentu dan kemudian memanfaatkannya pada kampanye pemasaran yang spesifik. Jenis produk pariwisata yang ada menentukan segmen pasar yang dapat diraih. Dalam mendukung usaha tersebut, mengukur kepuasan turis (pelanggan) dan menanggapi hasilnya juga merupakan bagian penting dalam mengeksploitasi produk pariwisata.

Selain itu, pada usaha pengembangan pariwisata langsung melalui kegiatan pemasaran, Rhode Island, dan khususnya kota seperti Newport, telah melaksanakan usaha pengembangan pantai yang ekstensif. Melalui program revitalisasi pantai, wilayah seperti pelabuhan Newport dan wilayah pantai teluk sekarang menjadi daya tarik utama untuk turis baik pada musim panas maupun dingin. Keberhasilan revitalisasi pantai sangat jelas dilihat dari jumlah turis yang datang ke Rhode Island hanya untuk menikmati kafe di pantai Newport dan kenikmatan lainnya.

Peserta studi wisata juga mengunjungi Asosiasi Ilmu Terapan/Applied Science Association (ASA), sebuah perusahaan konsultasi ilmiah kelautan yang khusus bergerak pada model penyebaran polusi dan dampaknya terhadap lingkungan kelautan dengan menggunakan komputer. ASA adalah

perusahaan swasta yang didirikan 20 tahun yang lalu oleh mantan pengajar dan staf Departemen Ocean Engineering Universitas Rhode Island untuk mengembangkan riset teoritis yang dibuat di Universitas dan dibawa ke pasar sebagai teknologi terapan.

ASA memberikan jasa konsultasi baik bagi industri swasta maupun Pemerintah Federal AS. Presentasi di depan peserta SWI memfokuskan pada pekerjaan ASA dengan Penjaga Pantai AS dan Pusat Penilaian Dampak (DAC) National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Dasar dari pekerjaan ASA dengan kedua kelompok pemerintah adalah model komputeryang mensimulasi gerakan tumpahan minyak di lingkungan laut pada kondisi yang berbeda-beda. Sistem ini menghubungkan model hidrodinamis dengan algoritma yang menggambarkan gerakan minyak secara tiga dimensi di bawah pengaruh angin, arus air, jenis minyak, dan parameter penting lain. Model-model tersebut dihubungkan dengan Sistem Informasi Geografis (GIS, entah ArcView, MapInfo, atau sistem yang lebih sederhana) dan suatu pengguna antarmuka dengan basis Microsoft Windows untuk mempercepat skenario model yang disesuaikan pada lokasi geografis yang spesifik dan kondisi lingkungan.

Model-model ASA memiliki aneka aplikasi seperti ditunjukkan kepada peserta SWI. Staf ASA memamerkan aplikasi model-model untuk menanggapi situasi-situasi tertentu seperti tumpahan minyak, operasi pencarian, dan penyelamatan. Selama demonstrasi, model, yang disebut OILMAP, digunakan untuk memprediksi gerakan minyak di bawah kondisi tertentu. Lalu suatu basis data yang disesuaikan yang terhubung dengan sistem GIS memberi kesempatan pada tim Penjaga Pantai untuk menyiapkan perlengkapan untuk membersihkan tumpahan minyak. Model lain, SARMAP, berguna bagi aplikasi pencarian dan penyelamatan. Model ini, didasarkan pada prinsip serupa dengan OILMAP, menggunakan algoritma yang dirancang sedemikian rupa untuk mensimulasikan obyek yang spesifik (kapal, pesawat, dan lain-lain) untuk memprediksi gerak dari benda-benda tersebut di bawah kondisi lingkungan tertentu. SARMAP mengidentifikasi pola pencarian yang sangat mirip dengan gerakan benda yang hilang tersebut. Versi yang disesuaikan memungkinkan tim penyelamat untuk memberikan bantuan melalui basis data dan sistem GIS.

Kunjungan ke ASA membuktikan bahwa teknologi tersedia untuk memprediksi secara statistik potensi dampak tumpahan minyak dari berbagai kegiatan pembangunan dan kecelakaan. Semua ini penting untuk reaksi darurat namun juga bisa digunakan dalam pengembangan pernyataan dampak lingkungan (EIS) untuk pembangunan yang akan datang. Melalui EIS, kita dapat memperkirakan resiko terhadap lingkungan dalam suatu pembangunan, sehingga dapat dibuat suatu persiapan untuk menghadapi keadaan darurat. Pada sejumlah kasus, resiko diperkirakan sedemikian tinggi sehingga pembangunan dibatalkan.

Masih di Rhode Island, sebagai kelanjutan dari kunjungannya ke Washington, D.C. dengan Divisi Respon Kantor Penjaga Pantai AS, Laksamana Busran Kadri mengunjungi kantor USCG di New London, CT. pada pengarah awal, Pejabat Perwira, Lt. Paterson, menjelaskan lingkup operasi dari kantor tersebut dan peran kuncinya dalam pengawasan kelautan dan keamanan di perairan antara Rhode Island dan New York. Laksamana diajak berpatroli ke Fichers Island (NY) di mana beliau diberi informasi tentang koordinasi antara USCG dan lembaga lain yang berwenang (seperti polisi) dan mengenai penyediaan logistik pada ruang lingkup wilayah patroli yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya selama puncak musim kunjungan wisatawan. Acara ini jelas sekali merupakan hal penting dari Studi Wisata bagi Laksamana Kadri yang mencatat pentingnya mengembangkan kapasitas yang serupa di Indonesia sebagai bagian dari kontrol monitoring dan sistem pengawasan kelautan yang menyeluruh.

• Negara Bagian Washington, 20-22 September 2000

Di Negara Bagian Washington, grup SWI mempelajari pengalaman Puget Sound Water Quality Action Team dan Program Pengelolaan Watershed Nisqually (PPWN). Program ini menunjukkan keberhasilan pendekatan pada pengelolaan DAS dan teluk dan memberi kesempatan bagi para peserta SWI untuk berdiskusi dengan staf mengenai pembangunan dan implementasi kedua program tersebut. Staf Washington menerangkan mengenai peran pemerintah, komunitas yang beragam dan sektor swasta dalam inisiatif peran serta. Kunjungan lapangan menggambarkan strategi pengelolaan pesisir dan intervensi yang relevan pada pengelolaan teluk, termasuk perbaikan, praktek pengelolaan tanah yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan pelabuhan, penyuluhan dan peran serta publik dan pandangan unik akan kepemilikan tanah dan tanah tenggelam (*submerged land*).

Puget Sound adalah bagian kritis dari kondisi kesehatan perekonomian Negara Bagian Washington. Akses transportasi lewat Pelabuhan Seattle menghubungkan wilayah tersebut secara ekonomis dengan perkapalan dunia. Puget Sound dan kenyamanan publik yang ditawarkan punya peran dalam mendorong keberhasilan perekonomian yang luar biasa dari Washington. Hasilnya, mengembangkan program teluk pemukiman untuk Puget Sound merupakan langkah biasa untuk Negara Bagian.

Puget Sound Urban Bay Program (UBP) atau Program Perkotaan di Wilayah Teluk, dikordinasikan oleh Puget Sound Water Quality Action Team, membahas banyak masalah penting yang dihadapi oleh pengelola teluk yang lokasinya berdekatan dengan wilayah pemukiman. Masalah-masalah seperti kontaminasi racun, perbaikan dan perlindungan habitat, keterlibatan penduduk setempat dan kerjasama industri dan fasilitas pengolahan limbah, pemerintah setempat dan yang lainnya merupakan kunci perlindungan teluk pemukiman. Seperti juga di Puget Sound, koordinasi itu sendiri merupakan suatu hal yang sulit dalam situasi teluk pemukiman. Bagi Puget Sound ada lebih dari 15 perundangan besar dari pemerintah federal dan negara bagian, banyak peraturan tambahan dari federal, negara bagian dan lokal dan juga yurisdiksi dan kepentingan Suku Indian.

Tujuan utama dari program perkotaan di wilayah teluk Puget Sound Water Quality Action Team adalah melindungi kesehatan manusia, melindungi ekosistem kelautan dan estuaria, memperbaiki wilayah yang rusak dan melindungi pemanfaatan teluk dari dampak kontaminasi racun dan buruknya tata guna tanah (misalnya penangkapan kerang). Hal ini dicapai melalui tiga cara: 1) Mengidentifikasi wilayah tertentu yang perlu diperhatikan; 2) Mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi, catatan historisnya, dan tekanan-tekanan; dan 3) Menentukan tingkat masalah dan tindakan untuk mengurangi sumber kontaminasi serta melindungi dan memperbaiki habitat.

Sebuah proses kerja sama diperlukan untuk mencapai ke tiga tujuan di atas. Langkah pertama adalah membentuk kelompok kerja antar lembaga. Kelompok kerja ini terdiri dari wakil Suku Indian, badan federal, negara bagian dan lokal. Mereka mengumpulkan komitmen dari pelaku kunci, menyediakan informasi teknis dan ilmiah, menjamin koordinasi antar badan dan program, membuat rencana kegiatan dan meninjau kemajuannya apakah sesuai dengan jadwal rencana kerja.

Langkah kedua adalah mendirikan komite penasihat masyarakat (CAC). Anggota CAC adalah ahli pengamat lingkungan, pelaku bisnis dan asosiasi industri, kelompok penangkap ikan rekreasi dan komersial, pemilik perahu dan lainnya. CAC menyediakan umpan balik bagi rencana kegiatan dan tindakan kelompok kerja antar badan, membantu menentukan dan memastikan masalah yang menjadi perhatian masyarakat, dan diseminasi (penyebaran) informasi pada penduduk dan kelompok konstituen tertentu.

Langkah ketiga adalah mendirikan Tim Pengawas Perkotaan di Wilayah Teluk (Urban Bay Action

Team, UBAT). UBAT meliputi satuan tugas lapangan staf teknis dari pembuat peraturan yang sesuai, pengelolaan pesisir dan badan perencana. UBAT memfokuskan pada identifikasi masalah, implementasi rencana tindakan, mengajak gerakan kebersihan secara sukarela dan restorasi lingkungan.

Faktor kunci keberhasilan program Puget Sound Urban Bay Action Team adalah mengembangkan rasa kepemilikan di antara para penduduk setempat melalui penyuluhan dan keterlibatan langsung dengan masalah Puget Sound. Tim ini harus menggalakkan kerjasama di antara pihak-pihak yang bertanggungjawab atas program pengawasan Puget Sound. Faktor penting lain adalah menjadikan sumberdaya yang terpilih untuk mengembangkan dan mendukung tim pengawas dalam melaksanakan dan mengawasi kemajuan action plan-nya. Tak kurang penting adalah dukungan pada pembersihan sukarela oleh pihak pelaku pencemaran, sekaligus jaminan kewenangan yang cukup dari pembuat undang-undang untuk menghentikan, dan jika perlu, menghukum pelanggar di wilayah Puget Sound.

Seperti dijelaskan dalam garis besar program UUPZP, pencemaran sumber daya *non-point* (tak beraturan) akhirnya diidentifikasi sama buruknya dengan pencemaran beraturan di wilayah pesisir. Pencemaran *non point* biasanya berawal di hulu dalam jumlah kecil seperti sisa oli yang dibuang ke got, kontaminasi storm water, sedimen yang terbawa dari penebangan hutan, tinja binatang, limbah rumah tangga, limbah kimia pertanian, atau buangan yang tidak diolah dari kapal atau perumahan. Karenanya, UU Air Bersih AS mengajak NOAA dan USEPA melalui UUPZP tahun 1990 mengatur pencemaran *non-point source* yang mempengaruhi zona pesisir. Bagi tim Puget Sound Urban Bay Action dan Program Perkotaan di Wilayah Teluk Puget Sound, pencemaran *non point source* diatur melalui Program Kendali Daerah Aliran Sungai (WAP).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah geografis yang membawa aliran air (dan segala yang terbawa) ke sungai atau sekumpulan air seperti teluk dan pesisir. Perencanaan DAS penting untuk penanganan pencemaran *non-point source*. Air mengalir dari semua sumber di daratan ke dalam DAS yang akhirnya bermuara di Puget Sound sehingga semua kegiatan di daratan punya potensi untuk berdampak di Sound. Selain itu, pencemaran *non-point source* dan kontaminasi dengan mudah terbawa ke dalam sumber air di dasar tanah, sungai dan sungai kecil yang dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, termasuk air minum, memancing dan kegiatan mencari makan lainnya. Keterlibatan lokal dan kontrol atas desain program DAS dan implementasinya menjadi hal yang penting karena dari sinilah pencemaran *non-point source* bermula.

Pengembangan dan implementasi rencana aksi DAS setempat adalah pusat dari program *non-point source* Rencana Pengelolaan Kualitas Air Puget Sound. WAP Puget Sound memanfaatkan komite setempat untuk bekerja sama menentukan masalah dan pemecahan atas masalah kualitas air dan habitat dalam lingkungan DAS mereka. Insentif dana disediakan untuk pemerintah setempat menggerakkan rencana watershed. Pemerintah lokal ini memilih komite pengelolaan DAS, terdiri dari staf pemerintah setempat, staf distrik konservasi air, wakil sukuk Indian, pelaku bisnis, individual dan kelompok yang tertarik. Komite lokal ini menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk membuat rencana pengelolaan DAS.

Rencana aksi DAS lokal meliputi inventarisasi dan karakterisasi DAS dan sumberdayanya, identifikasi masalah, cita-cita dan tujuan, strategi untuk mengendalikan pencemaran *non-point source*, strategi untuk menjalankan rencana, termasuk keuangan, jangka waktu, pertanggungjawab dan kesempatan peran serta masyarakat.

Kunci keberhasilan terletak pada rencana kerja yang baik dan bisa dilaksanakan. Pemerintahan

setempat, warganegara, pelaku bisnis dan pihak-pihak lain harus bekerja sama mengatasi kendala yang mengancam nilai ekonomis dan ekologis di Puget Sound. Hal ini meliputi kurangnya dana, tentangan dari kelompok tertentu dan kurangnya komitmen para pelaku utama. Dengan bergabung di komite, semua pihak dapat memberikan komitmen dan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang telah disetujui. Departemen Lingkungan Hidup Negara Bagian Washington menjalankan program DAS di bawah pengawasan Tim Pengawas Kualitas Air Puget Sound. Negara bagian dan badan federal lainnya memberi bantuan teknis dan juga keuangan. Yang harus dicatat adalah peran perusahaan kertas dan kehutanan komersial yang aktif berperan dalam merencanakan kelangsungan pengelolaan DAS. Penebangan hutan dibatasi hingga 120 hektare. Wilayah dengan keistimewaan khusus (air terjun, situs arkeologi, anak sungai dan sungai besar) semua dimasukkan dalam ruang lingkup kehutanan.

Untuk memahami pendekatan pengelolaan DAS dengan lebih baik, kelompok SWI diajak mengunjungi ke Pusat Penafsiran Sungai Nisqually (Nisqually River Interpretive Center) di Suaka Alam Nisqually untuk menghadiri presentasi Program Pengelolaan Sungai Nisqually (NRMP). NRMP adalah usaha multi lembaga dalam melindungi Sungai Nisqually sebagai kontributor utama DAS ke Puget Sound. Lebih dari 50 persen air yang mengalir ke selatan Puget Sound berasal dari Sungai Nisqually. NRMP dibentuk tahun 1987 setelah Badan Pembuat UU Negara Bagian Washington menyetujui Rencana Pengelolaan Sungai Nisqually, yang menetapkan budaya unik, historis, lingkungan hidup dan sumber daya ekonomis di Lembah Sungai Nisqually. Rencana ini mengawali pendirian Dewan Sungai Nisqually, suatu Dewan Penasehat Warganegara dan berasosiasi dengan organisasi non profit.

Dewan Sungai Nisqually adalah badan koordinasi utama program. Kedua puluh anggota yang dipilih mewakili beraneka kepentingan termasuk Suku Indian Nisqually, perusahaan kehutanan komersial dan pabrik kertas, badan pemerintah setempat, negara bagian dan federal, perusahaan utilitas (air, listrik, gas, dan sebagainya) dan militer. Dua puluh satu warganegara duduk di dalam Komite Penasehat Dewan Warganegara sebagai wakil dari seluruh penduduk sepanjang sungai. Dewan ini mengadakan pertemuan secara reguler dan masyarakat diundang untuk hadir dalam rapat-rapat tersebut.

Proyek Program Pengelolaan Sungai Nisqually meliputi:

- Perjanjian Daratan Lembah Sungai Nasional: perjanjian ini melindungi daratan sepanjang koridor Sungai Nisqually melalui wilayah pribadi, non pemerintah. Perjanjian ini melestarikan daratan lewat akuisisi langsung baik melalui pembelian atau penghibahan, dan pembangunan zona penyangga konservasi sepanjang tepi sungai.
- Proyek Penyuluhan Sungai Nisqually: bidang ini berorientasi pada program penyuluhan lingkungan hidup yang memberi penyuluhan pada murid-murid di sepanjang lembah sungai akan pemahaman kualitas air dan masalah terkait dan menyadari peran mereka sebagai warganegara di lembah tersebut. Proyek ini menyediakan bahan kurikuler dan pendidikan untuk guru, instruksi pengawasan kualitas air dan bermacam proyek lainnya.
- Yayasan Pusat Penafsiran Nisqually: suatu penyuluhan dan pusat penafsiran (interpretive center) dibentuk dengan jalan setapak dan pameran yang memperagakan pada pengunjung kepentingan dan peran Sungai Nisqually bagi Puget Sound dan wilayah sekitarnya. Pusat ini memiliki jalan setapak sepanjang 11 kilometer untuk dijelajahi pengunjung untuk melihat kehidupan di sungai dan alamnya, sekitar 80.000 hingga 100.000 pengunjung datang setiap tahunnya dengan staf profesional berjumlah lebih dari 70 relawan.
- Berita Sungai Nisqually: Buletin yang terbit setiap tiga bulan mengandung informasi mengenai Lembah Sungai Nisqually dan Kegiatan Dewan Nisqually.
- Pengawasan Lembah Nisqually: program ini dibuat untuk mendidik penduduk sepanjang sungai akan tanggung jawab mereka menjaga sungai. Dalam program ini tersedia nomer telepon yang

bisa digunakan penduduk untuk melaporkan pelanggaran seperti pembakaran ilegal, pembuangan sampah ilegal dan kegiatan ilegal lain yang mengakibatkan dampak negatif pada ekosistem sungai dan lembah sungai.

- Proyek Rambu-rambu: Dewan telah mendirikan rambu-rambu pada lokasi di mana jalan federal, negara bagian atau jalan desa melintasi Lembah Sungai Nisqually untuk membentuk kesadaran nilai DAS.
- Pengawasan Kualitas Air: karena setengah dari jumlah air bersih mengalir ke selatan Puget Sound, maka kualitas air di Nisqually dimonitor secara reguler.

Program Pengelolaan Sungai Nisqually merupakan satu contoh dari sekian banyak program pengelolaan DAS berbasis lokal yang didukung oleh tim Puget Sound Urban Bay Action dengan bantuan badan lain.

Kunjungan terakhir dalam perjalanan ke Negara Bagian Washington adalah mengunjungi Otorita Pelabuhan Seattle. Otorita Pelabuhan memiliki kewenangan mirip dengan pemerintahan lokal melalui pembentukan Distrik Pelabuhan khusus dengan pejabat dan dewan terpilihnya sendiri. Meskipun begitu, sejumlah besar peraturan di Pelabuhan masih tunduk pada perundangan Seattle. Pelabuhan ini memiliki infrastruktur sendiri dan secara penuh bertanggung jawab atas setiap pencemaran di Puget Sound yang berasal dari kegiatannya. Kualitas air di dan sekitar Pelabuhan dimonitor baik oleh Otorita Pelabuhan dan oleh kontraktor dari luar untuk menjamin terjaganya kualitas air.

Berdasarkan Otorita Pelabuhan, sedimen yang terkontaminasi dalam batas-batas Otorita Pelabuhan telah dibersihkan seperlunya. Namun, pengerukan membutuhkan biaya besar di AS sehingga Pelabuhan memfokuskan pada pencegahan, dengan cara menyewa dua tenaga yang mendatangi seluruh penyewa Pelabuhan dan kapal-kapal yang berlabuh sedikitnya satu kali seminggu untuk membicarakan pencegahan polusi dan kontaminasi. Kelompok SWI sangat terkesan mendengar bahwa usaha pencegahan tersebut sedemikian efektif sehingga air di dalam pelabuhan dan di sekitar kapal bisa dipakai untuk berenang.

Tingkat kualitas air dianggap sangat penting bila melihat keseluruhan pembangunan pantai di Seattle. Pelabuhan dan tempat berlabuh kapal berada bersebelahan dengan café dan restoran dan gang-gang terbuka dengan pemandangan Puget Sound. Akses publik telah dijaga dengan hasil yang bernilai sangat tinggi bagi pantai dan wilayah pelabuhan Puget Sound. Akses publik ke Puget Sound dalam wilayah kota merupakan penghasil pajak utama bagi Seattle dan Negara Bagian Washington lewat pemanfaatan lokal dan turisnya.

Transferabilitas ke Indonesia

Pembangunan di Amerika Serikat dalam periode ini, meskipun terdapat sejumlah perbedaan, juga memiliki sejumlah kemiripan dengan situasi di Indonesia saat ini. Selama dekade enampuluhan, jumlah penduduk Amerika meningkat sangat cepat yang menimbulkan akibat menyolok karena terjadi dalam waktu yang amat singkat. Di Indonesia, populasi di pesisir saat ini juga tumbuh pesat. Dan dengan krisis keuangan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, meskipun ekonomi Indonesia juga tumbuh dan nampaknya tingkat pertumbuhan akan lebih dari 5 persen, sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan di wilayah dekat pesisir di negara ini.

Televisi, buku-buku dan media lain berperan kritis di AS dalam mendukung gerakan pemanfaatan sumber daya pesisir dengan lebih bijaksana dan saat ini menjadi lebih lazim di Indonesia dengan kian longgarnya kontrol atas arus informasi yang membuat masyarakat paham informasi. Organisasi non pemerintah berwawasan lingkungan berkembang subur di AS selama tahun enampuluhan saat usaha-usaha pembangunan pesisir dicanangkan dan mulai tumbuh dan diharapkan menambah pengaruh politik di Indonesia di masa yang akan datang.

Sementara pada tingkat kapasitas yang berbeda, Amerika Serikat telah menunjukkan kemungkinan untuk menyusun program dan mencapai hasil yang terukur dalam waktu dua puluh hingga tiga puluh tahun. Lewat pendekatan program (misalnya proyek demi proyek) yang digabungkan dalam UU, UUPZP merancang kerangka integratif dan penyerahan mandat secara hukum yang diperlukan untuk menempatkan prioritas pengelolaan zona pesisir di antara pemerintah negara bagian dan lokal. Selain itu, UUPZP menjamin kelangsungan sumberdaya dan program di luar politik, kepentingan khusus dan pengaruh jangka pendek dari para pembuat keputusan untuk mencapai hasil untuk jangka panjang.

Pada saat UUPZP dibentuk di AS, banyak perundangan terkait lainnya yang sedang disusun untuk menangani berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun begitu, UUPZP mengembangkan kerangka kerja yang kokoh dan transparan bagi konstituensi — dari universitas hingga pemerintah sampai LSM — mereka tahu posisi mereka dan bahwa mereka bisa ikutserta dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan pesisir. UUPZP memastikan konteks khusus pengelolaan zona pesisir di balik latar belakang perundangan tersebut dan “suara legislatif” yang sebaliknya tidak terfokus pada pengelolaan pesisir. Pada waktu UUPZP dibuat, perundangan lainnya ini dan perdebatan pro-kontra di belakangnya mirip sekali dengan yang terjadi di balik perundangan baru di Indonesia (misalnya UU No. 22/1999).

Meskipun UUPZP tahun 1972 menciptakan konteks bagi pengelolaan pesisir di AS, dan menyediakan panduan yang cukup bagi pemerintah negara bagian dan lokal untuk memulai perencanaan pesisirnya, masih cukup tersedia kelonggaran untuk pemerintah desentralisasi dalam hal pembuatan keputusan penting dan kritis. Hal ini sangat penting di AS yang, meskipun wilayahnya merupakan suatu benua, zona pesisirnya sangat luas dan beraneka. Dalam hal ini, zona pesisir AS hampir serupa dengan zona pesisir Indonesia. Tingkat fleksibilitas yang tersedia di AS memungkinkan diversitas ekologi dan

budayanya diakomodasi dan disempurnakan. Untuk alasan yang sama, pelajaran ini tentunya berlaku pula di Indonesia: menyediakan program yang memungkinkan dan meningkatkan keanekaragaman budaya dan ekologi.

Masih ada satu unsur lain yang memperlihatkan kesamaan antara AS dan Indonesia dalam masalah pesisir. Jumlah populasi yang semakin meningkat yang tinggal di wilayah atau di dekat pesisir, langsung berdampak pada sumberdaya pesisir dan mengkaitkan ekonomi nasional dari kedua negara pada kesehatan dan kelangsungan produktivitas ekosistem pesisir.

Dengan sejumlah kemiripan di atas, masih ada perbedaan besar yang diterima oleh SWI: Amerika Serikat memiliki pengalaman hampir sepanjang 30 tahun dalam pengelolaan pesisir yang berawal melalui perundangan federal. Perubahan UU Pengelolaan Pesisir AS berlanjut hingga saat ini. Perubahan ini memiliki sejumlah elemen kunci yang dapat menginformasikan usaha yang baru di rintis Indonesia dalam mengembangkan program pengelolaan pesisir terpadu untuk memenuhi kriteria minimum yaitu “melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan bila mana mungkin, mengembalikan atau meningkatkan, sumberdaya zona pesisir Nasional bagi generasi masa kini dan yang akan datang”, sekaligus mengajak pemerintah setempat dan masyarakat melaksanakan kewenangan penuh mereka bagi sumberdaya tersebut berdasarkan otonomi daerah.

Bersamaan dengan itu Indonesia memerlukan cara untuk mengelola secara lokal sekaligus melaksanakan kepentingan regional dan nasional, dan memberikan bagi para praktisi lokal sumberdaya yang sesuai, secara teknis dan finansial.

Pelajaran Bagi Desentralisasi Pengelolaan Zona Pesisir

4.1 Latar Belakang: Desain Program SWI

Memperkokoh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan tujuan utama dari kerangka kerja tahun keempat dan kelima Proyek Pesisir. Hal ini bisa dicapai dengan membentuk keberhasilan program lapangan *Proyek Pesisir* di Lampung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur dan dukungan langsung pada DKP melalui penugasan Penasehat Senior bidang Kebijakan (SPA) pada departemen ini. SPA akan membantu menyusun peraturan yang menitikberatkan pada pengelolaan pesisir terpadu pada tingkat menteri dan direktur jenderal dengan tugas utama membantu membangun UU pengelolaan pesisir nasional yang baru.

Seiring dengan pemberian bantuan pada DKP, penting bagi *Proyek Pesisir* untuk melanjutkan dukungan pada program-program yang dijalankan bersama dengan rekan pemerintah dan LSM lainnya. Ini mencakup organisasi dan badan-badan yang memegang peran penting dalam rencana pelaksanaan proyek yang sudah berjalan, dan rencana-rencana lain yang akan ditentukan kelak. Program pengelolaan zona pesisir di seluruh dunia membagi fungsi pengelolaan pesisir pada berbagai departemen dan kementerian. Pemilihan peserta SWI didasarkan pada hal ini dan dipilih individu-individu di antara departemen-departemen di Indonesia yang berperan penting demi tujuan CRMP USAID. Pendekatan ini melanjutkan kontribusi *Proyek Pesisir* dalam mencapai tujuan USAID bagi CRMP. Hal ini dinyatakan dalam Strategi Kelangsungan Proyek (LoPS) dari *Proyek Pesisir*: "... secara positif mendukung desentralisasi yang koheren dan efektif pembangunan pesisir dan kelautan di Indonesia."

Di dalam tujuan keseluruhan dari desentralisasi pembangunan dan pengelolaan pesisir dan kelautan, kata kunci dalam LoPS adalah "koheren", yang dalam hal ini bermakna terpadu dan berkesinambungan. Bercermin pada hal ini, *Proyek Pesisir* dirancang dengan dua jalur struktur: 1) Membangun praktek terbaik dalam situasi dan konteks yang beragam pada tingkat lokal; dan 2) Bekerja pada tingkat nasional untuk melembagakan pembangunan pesisir di dalam strategi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia secara menyeluruh. Ini berarti mengkaitkan pelajaran-pelajaran yang diterima dengan cara mengembangkan praktik terbaik di lapangan dengan kebijakan nasional yang mendukung pengulangan dan kelangsungan praktik tersebut untuk jangka panjang. Hal ini berarti mengkaitkan kebijakan nasional dengan praktik terbaik dari mana pun di seluruh dunia. Kunjungan lapangan selama SWI dipilih untuk mendukung strategi LoPS Proyek Pesisir.

Proyek Pesisir menghubungkan jalur lokal dan nasional dalam proyek dengan cara menggabungkan tema-tema. Tema-tema ini secara tersendiri menggambarkan kerangka kerja proyek. Di sini, keseluruhan tema proyek disingkat menjadi lima tema berikut untuk kemudahan diskusi.

- Riset dan Pengembangan (untuk mengembangkan praktek terbaik dalam pengelolaan zona pesisir)
- Kebijakan dan Kondisi yang Memungkinkan/Enabling condition (untuk mendukung reformasi kebijakan dan integrasi)

- Pengokohan Kelembagaan (dan pengembangan kapasitas)
- Pendidikan dan Pelatihan (untuk mendukung implementasi pengelolaan zona pesisir)
- Diseminasi (penyebaran) Informasi, Pendidikan dan Penjangkauan/Outreach (untuk mendukung pengembangan konstituensi pengelolaan zona pesisir)

Tema-tema di atas memandu kegiatan proyek dan juga sumberdaya yang terfokus di luar area proyek. Meskipun masih kurang sesuai, tema-tema ini mewakili sebagian besar area yang perlu dikembangkan dalam program pengelolaan pesisir nasional. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Urusan Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil dan Direktorat Jenderal Pariwisata, dukungan USAID (lewat *Proyek Pesisir*) merupakan katalis penting untuk mengawali pembangunan kebijakan yang koheren melalui pelaksanaan tematik ini.

Keistimewaan menonjol dari SWI adalah tujuan untuk menggarisbawahi bermacam-macam aspek yang berbeda dari area tematik dalam hal struktur program dan integrasi kelembagaan di AS. Selain itu, program ini menyoroti struktur pendekatan pengelolaan pesisir yang koheren, terutama berkaitan dengan integrasi dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar tingkat dalam pemerintahan pada sistem desentralisasi penuh. Bagian berikut ini membahas aspek SWI dan merupakan pembelajaran dari kunjungan wisata ini agar lebih mudah dicerna bagi pengguna dokumen ini.

4.2 Pembelajaran

4.2.1 Riset dan Pengembangan

Seperti dinyatakan dalam UU Pengelolaan Zona Pesisir tahun 1972, Amerika Serikat telah lama menyadari pentingnya sumberdaya pesisir dan kelautan bagi kelanjutan kesehatan ekonomi AS. Bertahun-tahun lamanya, program semacam Program Universitas Sea Grant NOAA (1966) menjalankan riset dengan dukungan pemerintah AS dan sektor swasta yang mengkaitkan pertumbuhan ekonomi dan konservasi dan pemanfaatan secara bijaksana sumberdaya pesisir dan kelautan. Program Universitas Sea Grant dikerjakan dalam tiga bidang utama: 1) Teknologi maju bagi produk komersial dan prosesnya (sebagai contoh, keamanan pangan akan ekspor hasil perikanan); 2) Produksi hidangan laut; dan 3) Pengembangan ekonomi pesisir.

Bukti bahwa AS menganggap penting riset pesisir dan kelautan adalah dari jumlah dana yang dialokasikan oleh Kongres AS sebesar 56 juta dolar pada tahun 1998 dan 57 juta dolar tahun 1999 bagi program riset Sea Grant. Digabungkan dengan pemberian dana dari sumber lain, program Universitas Sea Grant menghabiskan 99,2 juta dolar di tahun 1998 dan 99,6 juta di tahun 1999. Sementara badan pemerintah lainnya mengalami penyusutan lingkup dan pengaruh, program Universitas Sea Grant bahkan meningkat berdasarkan kebutuhan untuk melanjutkan perluasan pesisir dan ekonomi berbasis kelautan dengan dasar peningkatan pengetahuan ilmiah. Pentingnya hal ini bagi pembangunan ekonomi di Indonesia tidak bisa dianggap remeh.

Program Cagar Alam Estuaria Nasional, yang diciptakan melalui UUPZP telah berkembang menjadi Sistem Pelestarian Riset Estuaria Nasional (NERR). NERR saat ini meliputi 22 situs pelestarian terpilih di 18 negara bagian dan teritori dengan luas daerah hampir 440.000 are, terdiri dari perairan kuala, lahan basah dan lahan atas (*uplands*). Tujuan sistem pelestarian ini adalah menyediakan contoh wilayah dari indikator habitat utama dan ekosistem untuk laboratorium riset lapangan. Tujuan riset NERR adalah meningkatkan pemahaman akan ekosistem dan fungsi spesies, dan menciptakan kesempatan bagi penyuluhan umum mengenai masalah daerah estuaria. Kerjasama antar federal-

negara bagian diadakan untuk memperluas wilayah NERR. Gubernur negara bagian mencalonkan wilayah untuk dipertimbangkan dan NOAA menetapkan apakah suatu wilayah yang dicalonkan akan digabungkan dalam NERR, berdasarkan pertimbangan apakah wilayah tersebut merupakan pesisir yang kritis atau habitat estuaria dan kesesuaiannya untuk riset jangka panjang serta manfaat penyuluhannya. Wilayah tersebut kemudian dipakai untuk riset Universitas Sea Grant, dan juga oleh riset yang didanai oleh pemerintah negara bagian dan swasta atau LSM.

Universitas-universitas di Indonesia merupakan sumberdaya untuk menjembatani celah antara pertumbuhan ekonomi, dan pembicaraan dan kelangsungan pembangunan sumberdaya kelautan dan pesisir Indonesia. Jaringan Perguruan Tinggi Kelautan Indonesia (INCUNE) yang diawali oleh Proyek Pesisir dan saat ini didukung lebih lanjut dengan dana dari Yayasan David & Lucille Packard dari AS, membuka langkah awal bagi pengembangan jaringan universitas di Indonesia demi pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat pembangunan pesisir yang berkesinambungan. Anggota INCUNE yang ada di setiap daerah utama dengankoordinasi sentral antar anggotanya melalui Institut Pertanian Bogor (IPB). Dengan dukungan yang tepat dan dana pemerintah, universitas INCUNE yang ada dapat mengembangkan jaringan mereka dan berperan melalui infrastruktur kelautan yang layak dan modern, dan serangkaian produk pesisir dan kelautan berdasarkan aplikasi ilmiah dalam pengelolaan pesisir dan teknologi maju dalam pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, pengembangan jaringan INCUNE bisa meningkatkan kapasitas profesional Indonesia mengurangi ketergantungan pada ahli dari luar dan membangunkapasitas regional untuk mendukung pemerintahan yang baik di daerah menurut UU No. 22/1999 mengenai Otonomi Daerah. Pembangunan jaringan ini akan:

- Berperan dalam mengembangkan dan mempromosikan kesinambungan pembangunan pesisir dan lautan dan pemanfaatan sumberdaya;
- Meningkatkan batas-batas pengetahuan dengan hasil riset terapan dan kegiatan survei;
- Mendidik ilmuwan baru dan manajer sumberdaya pesisir dan lautan;
- Melatih dan mendukung profesional sumberdaya pesisir dan lautan dan pembuat kebijakan;
- Menawarkan layanan lebih luas lagi pada komunitas pesisir dan lautan dan pengguna sumberdaya;
- Menyediakan ahli dalam hal teknis dan memberi informasi pada sejumlah besar klien sektor swasta dan publik;
- Mengelola, meningkatkan dan menyebarkan informasi kritis menuju pemahaman fungsi ekosistem pesisir dan kelautan dan pemanfaatan yang tepat.

Riset untuk mendapatkan data ilmiah untuk mendasarkan monitoring program pesisir dan keputusan sumberdaya pesisir dan kelautan harus menjadi tujuan utama Pemerintah Indonesia. Seperti terlihat dalam setiap pertemuan dengan manajer dan ketua program pengelolaan pesisir, pelaksanaan monitoring penting untuk mengukur keberhasilan program pengelolaan zona pesisir. Namun, karena komponen programnya luas dan kurangnya informasi ilmiah yang terinci, seringkali monitoring yang dilaksanakan juga harus meluas. Perbaikan ekosistem secara langsung sulit dilakukan dalam hal peningkatan atau penurunan. Sejumlah indikator yang baik sudah tersedia namun riset yang sedang dikerjakan berguna untuk memahami lebih jauh rejimsistem alami dari ekosistem pesisir dan kelautan dan hubungan antara peristiwa dalam ekosistem dan perilaku manusia. Pegawai Kantor Kelautan dan Perikanan Nasional (National Marine Fisheries Service/NMFS) sangat menekankan perlunya data dan pembuatan keputusan berdasar ilmiah dalam pengelolaan perikanan. Staf NMFS menggambarkan masalah ini dengan pengalaman AS dengan badan penasihat perikanan regional (RFACs). Tinjauan terakhir dari kemajuan badan ini dalam memelihara sediaan ikan mengungkapkan bahwa sebagian besar merupakan kegagalan karena kurangnya unsur ilmiah dalam keputusan pengelolannya. Badan ini kebanyakan mengurus penambahan produksi ikan daripada mengidentifikasi dan memelihara hasil. Karena kurangnya data ilmiah, sejumlah populasi ikan di AS berkurang. Akibatnya, saat ini NMFS diharapkan menangani pengelolaan berdasarkan prinsip

pengawasan, bila tidak cukup data untuk mengidentifikasi secara jelas tingkat hasil penangkapan ikan.

Mengembangkan pusat riset dengan dukungan pemerintah penting untuk mendapatkan data ilmiah yang diperlukan untuk pengelolaan kelautan dan pesisir, tetapi penting juga untuk menyediakan penghubung atau titik awal bagi temuan riset dan dukungan lain dari sektor swasta, yayasan dan donor internasional. Laboratorium Kelautan MOTE di Florida didirikan dengan dana awal dari NOAA. Laboratorium Mote dirancang sebagai fasilitas riset yang berdiri sendiri lengkap dengan seluruh perlengkapan yang diperlukan dalam mengerjakan riset. Selain itu, desainnya didasarkan pada anggaran dan biaya operasional yang rendah. Namun, laboratorium ini telah meningkat menjadi pusat riset yang terkemuka yang mana dana dari luar, dana non pemerintah dapat disalurkan untuk riset kelautan dan pesisir, sehingga mempengaruhi pendanaan awal dan menyediakan pusat pelatihan dan riset yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pengawasan dan kemampuan membagi data dalam dan antar organisasi lewat sistem informasi pengelolaan terpadu dibutuhkan untuk perubahan pengelolaan pesisir dan kelautan di Indonesia. Suatu keistimewaan tetap dari semua program yang dikunjungi adalah integrasi dan pembagian informasi di dalam dan antar badan. Contohnya, di Florida Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup (DEP) menyimpan dan setiap lima tahun memperbaharui peta sumberdaya alam zona pesisir negara yang meliputi inventaris wilayah alami. DEP menyediakan informasi ini bagi badan lokal dan negara bagian lain dengan tanggung jawab perizinan, perencanaan dan pengawasan pesisir untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Memorandum Kesepahaman (MoU) juga merupakan suatu perangkat umum untuk berbagi informasi dan mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga. Pengumpulan dan pengelolaan data selalu distandardisasi untuk menjamin ketersediaannya antar lembaga. Standardisasi pengelolaan informasi dalam beberapa lembaga akan menjamin akses yang lebih luas bagi data pengelolaan pesisir dan kelautan di Indonesia.

4.2.2 Kebijakan dan Kondisi Yang Memungkinkan (*Enabling Condition*)

Sejak tahun 1966 telah ada suatu evolusi berkelanjutan dari kebijakan pengelolaan zona pesisir dan integrasi program yang berakhir pada satu dari program pengelolaan pesisir paling efektif di dunia. Diskusi dengan para profesional dalam pengelolaan pesisir selama wisata mengungkapkan sejumlah pelajaran inti yang diterima melalui evolusi dari program ini.

Tindakan pada tingkat nasional melalui UU Pengelolaan Zona Pesisir Nasional merupakan tindakan tunggal paling penting yang mempromosikan pengelolaan pesisir terpadu di AS dan berakibat pada 99 persen dari seluruh program. Berdasarkan UU No. 22/1999, Otonomi Daerah akan diberlakukan mulai 1 Januari 2001. Menurut UU ini, pemerintah provinsi dan kabupaten akan memiliki tingkat otonomi baru untuk kendali atas sumber daya pesisir dan kelautan. Pelaksanaan UU No. 22/1999 merupakan kesempatan bagi pemerintah pusat Indonesia untuk membantu mendeskripsikan peran, menjamin pemanfaatan sumberdaya tersebut dengan efisien, mengkoordinasi antar lembaga, mengatur pembagian informasi yang efektif, dan menjauhkan konflik dan duplikasi usaha. Lewat perundangan nasional yang serupa dengan UU Pengelolaan Zona Pesisir AS tahun 1972, Pemerintah Indonesia dapat menetapkan agenda pengelolaan pesisir nasional yang membuat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten memusatkan perhatian, usaha dan sumber keuangan pada pengelolaan pesisir dalam sikap yang koheren. Hal ini dapat menjamin bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian pada akses yang seimbang dan kelangsungan pembangunan pesisir, sekaligus menyediakan fleksibilitas tak terbatas dalam hal pengaturan administratif dan organisasi. Seperti di

AS, penting bagi perundangan nasional di Indonesia untuk melakukan fungsinya lewat peran sukarela berdasarkan insentif utama. Satu insentif yang paling berguna adalah persyaratan bagi pemerintah pusat untuk menyesuaikan dengan rencana pengelolaan pesisir propinsi dan lokal setelah rencana tersebut disetujui oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini, perundangan nasional masih memegang kewenangan penuh atas sumberdaya pesisir propinsi dan kabupaten dan menyediakan cukup fleksibilitas dalam desain program dan pelaksanaannya. Perundangan pengelolaan pesisir nasional menjamin rencana pengelolaan pesisir sekaligus mengatasi dan menangani masalah nasional. Termasuk juga ancaman kerusakan pesisir, penurunan kualitas air, daerah estuaria, hilangnya tempat pembibitan ikan, kesadaran dan peran serta publik/masyarakat, dan pembangunan pantai demi perekonomian nasional. Seperti di AS, hal ini bisa diatur sampai tingkat tertentu oleh semua pemerintahan pesisir setempat. Namun, menentukan standar minimum penting demi menjamin proses rencana pengelolaan dan penting untuk mengikutsertakan dan mempertimbangkan perekonomian setempat, propinsi, regional dan nasional dan tujuan konservasi.

Pengawasan dan sertifikasi ulang merupakan elemen penting untuk dimasukkan dalam program pengelolaan pesisir nasional berdasarkan peran serta sukarela. Seperti ditegaskan oleh para pemuka pesisir AS di tingkat pusat dan negara bagian, program pengawasan yang baik merupakan sesuatu yang penting bagi pemerintah federal untuk menentukan apakah kepentingan negara (dan kepentingan daerah pada beberapa kasus) sudah terpenuhi. Selain itu, dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan semakin kita memahami interaksi antara ekosistem dan kegiatan manusia, program pun harus dimodifikasi dan disempurnakan untuk mengakomodasi informasi terbaru. Di Indonesia, seperti juga di AS, tanpa tinjauan program secara berkala (misalnya setiap lima tahun) kecil kemungkinan bagi propinsi atau kabupaten untuk menyempurnakan program mereka. Di tingkat pusat, propinsi, atau kabupaten (atau tingkat desa – dalam hal sertifikasi rencana pengelolaan) harus ada ketentuan pengawasan tahunan dan tinjauan serta sertifikasi ulang dalam jangka waktu yang layak (biasanya lima tahun).

“Prinsip pencemar membayar (denda)” merupakan sarana kebijakan yang penting untuk menjamin pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan besar pada lingkungan hidup, yang dibayarkan untuk mengganti rugi biaya perbaikan dan hilangnya nilai hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Program Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam (NRDAs) dan UU Pencemaran Minyak (OPA) adalah perangkat kebijakan penting yang didasarkan pada “prinsip pencemar membayar (denda)”. Berdasarkan NRDAs dan OPA, pihak yang menyebabkan kerusakan besar pada sumberdaya alam bertanggung jawab akan perbaikan sumberdaya alam tersebut dan pelayanan di luar penilaian hukuman yang biasa. Dengan kata lain, pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem harus membayar biaya perbaikan lingkungan hidup yang bisa berlaku bertahun-tahun dan bukannya membayar denda satu kali saja. Hal ini menimbulkan kesadaran yang lebih tinggi pada anggota masyarakat dalam menjauhi tindakan yang membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan tersebut juga berakibat pada pembangunan program secara menyeluruh atas penilaian kerusakan, menggunakan analisa sistematis dan melibatkan tokoh masyarakat untuk mendapatkan penilaian sumberdaya pesisir. Akibat penilaian atas kerusakan (seperti Exxon Valdez di Alaska) telah mengubah drastis perilaku perusahaan, termasuk pembuatan program pencegahan pencemaran di sebagian besar industri.

Pemberian insentif dana merupakan persyaratan bagi pemerintahan setempat untuk menjalankan perencanaan pengelolaan zona pesisir. Dalam pelaksanaan program pemerintah federal memperoleh porsi cukup besar dari pendapatan pajak di AS. Pajak ini dapat dipakai sebagai insentif untuk

mengawali program tertentu bagi kepentingan nasional. Hampir semua program pengelolaan negara bagian dan lokal dimulai dari insentif atau pajak federal yang diberikan oleh pemerintah federal AS. Kabarnya pemerintah pusat Indonesia akan memegang sejumlah kecil pajak berdasarkan UU No. 25/1999 mulai Januari 2000. Namun demikian, insentif dana merupakan mekanisme insentif kuno yang biasa dipakai oleh pemerintah federal di seluruh dunia dalam menggalakkan minat terhadap masalah nasional. Hal ini bisa dilakukan bila pemerintah negara bagian atau propinsi menggunakan insentif bantuan atau dana lain sebagai mekanisme untuk mengajak pemerintah setempat menangani masalah dalam lingkup negara bagian atau regional. Untuk merangsang pembangunan program pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia, baik secara vertikal ataupun horisontal, insentif keuangan yang tepat harus diberikan di tingkat pusat, propinsi dan terutama tingkat kabupaten. Insentif ini harus diterapkan secara transparan dan konsisten dengan kerangka kerja perencanaan zona pengelolaan pesisir berdasarkan perundangan nasional yang dibuat.

Pola pengelolaan progresif dapat menghasilkan kemitraan antara otorita pengembangan pelabuhan dan pemerintah lokal, propinsi dan nasional, dan harus menjadi fokus utama bagi pembuat kebijakan. Pelabuhan bisa menjadi kontributor utama dalam penurunan kualitas air di pesisir dan pantai. Dari pertemuan dengan Otorita Pelabuhan Seattle terungkap sejarah dan contoh untuk mengelola pelabuhan di Indonesia dengan tujuan memperbaiki atau mencegah terjadinya situasi seperti ini. Otorita Pelabuhan Seattle, yang berada di bawah pemerintah setempat namun memiliki infrastruktur sendiri, bertanggung jawab penuh atas setiap pencemaran di Puget Sound akibat kegiatannya. Sementara itu, pelabuhan ini mendapat kewenangan tanggungjawab pengelolaan seperti pemerintah lokal lainnya dengan dewan terpilih dan kewenangan penegakan hukum internal berkenaan dengan pencemaran dan dampak pada Puget Sound. Kewenangan tersebut termasuk pula pengawasan dampak atas kegiatan pelabuhan dan bertanggung jawab atas pelanggaran penggunaan pelabuhan. Sebelum Otorita Pelabuhan memegang kendali, kualitas air sangat buruk dan menyebabkan masalah serius dalam wilayah pelabuhan.

Kegagalan Indonesia memenuhi traktat internasional dalam perlindungan kelautan dan konvensi sumber daya pesisir yang mana Indonesia termasuk pihak penandatangan menimbulkan konsekuensi serius bagi kegiatan ekonomi. Ekspor ke sejumlah negara bergantung pada kepatuhan pada traktat internasional mengenai kelangsungan produk tertentu dan perlindungan atas spesies langka atau yang terancam punah. Pertemuan dengan staf Departemen Luar Negeri AS menegaskan perlunya Indonesia tetap mematuhi traktat spesies kelautan internasional dan konvensi lainnya, seperti perlindungan penyu hijau laut. Dalam banyak kasus, sertifikasi berjangka menjadi syarat kelanjutan ekspor produk perikanan ke AS dan negara berkembang lainnya.

Sesuai dengan konsep pencemar membayar, konsep "pengguna membayar" juga menjadi hal penting dalam memperlancar aliran devisa yang mendukung perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir. Contohnya, di Florida Keys, sekitar 2,5 juta pengunjung datang setiap tahunnya dengan kontribusi keuangan terhadap perekonomian sekitar 1,2 miliar dolar per tahun. Sebagian dari sumbangan perekonomian ini berupa pajak atau biaya pengguna yang dibuat khusus untuk pengelola sumberdaya pesisir yang menarik pengunjung. Sebagai contoh, kapal pesiar yang berlabuh di Florida Keys yang dianggap sebagai pengguna lingkungan dikenai ongkos 3 dolar per penumpang. Ongkos ini dibuat lewat kontrak langsung dengan perusahaan kapal pesiar tersebut sehingga proses yang transparan terjamin. Ongkos lain dikenakan pada harga sewa kamar hotel yang menghasilkan pajak lebih banyak untuk Cagar Alam Florida Keys. Melalui jenis-jenis pengaturan ini, perlindungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dibayar oleh mereka yang langsung memanfaatkan dan menikmatinya. Di Indonesia, kita menemukan juga jenis sistem ini. Biaya pengguna baru-baru ini dikenakan terhadap turis yang mengunjungi Taman Laut Nasional Bunaken di Sulawesi Utara. Sebagian besar pengunjung

ke lokasi seperti ini akan senang dikenai sejumlah kecil biaya untuk memastikan kelangsungan pemanfaatan dan pengelolaan yang bijaksana atas sumber daya yang mereka nikmati.

Pendekatan berjenjang pada penetapan wilayah pesisir menawarkan keuntungan besar dalam hal pemanfaatan sumberdaya manusia dan pengelolaan sumberdaya alam. Banyak negara bagian di Amerika Serikat menggunakan pendekatan berjenjang pada perencanaan spasial di zona pesisir. Sistem jenjang ini mirip dengan kerangka perencanaan berbentuk piramid yang dipakai dalam Proyek Evaluasi dan Perencanaan Sumber Daya Laut (MREP – Dutton, Duff, dkk., 1998). Berdasarkan piramid ini, tiap tingkat/ jenis perencanaan membentuk hirarki instrumen perencanaan, memberikan tempat multi faset pada perencanaan pesisir. Piramid mungkin sekali menjadi fokus inti dari peraturan nasional interim (Keputusan Menteri) atas pengelolaan zona pesisir yang akan menjadi kunci awal perundangan pesisir nasional yang sedang diajukan di Indonesia.

Berdasarkan sistem-sistem ini, daratan yang lebih dekat ke pesisir diatur menurut panduan yang lebih spesifik untuk pembangunan dan penggunaannya. Hasilnya adalah proses perizinan yang lebih efisien, karena perizinan terhadap area daratan yang tidak terlalu dilarang (*less restricted*) yang letaknya lebih jauh dari pesisir akan diproses lebih cepat dan bisa lebih luas pemanfaatannya. Ini memberi kesempatan pada staf untuk lebih memfokuskan perhatian mereka pada masalah-masalah perizinan yang lebih kritis di area yang lebih peka di zona pesisir.

Integrasi antara pemerintah pusat, propinsi, distrik dan lokal dalam hal koordinasi, perencanaan, pendanaan dan implementasi program merupakan persyaratan dalam mencapai program pengelolaan pesisir Indonesia yang menyatu dan terpadu. Seperti di AS, Indonesia sangat membutuhkan pemanfaatan yang luas dari hubungan administratif propinsi-kabupaten bagi perencanaan efektif dan pengaturan atas pengelolaan sumberdaya pesisir. Baik selama dan setelah pembuatan program pengelolaan pesisir lokal atau kotamadya (kota atau kotapraja), bantuan teknis yang terkoordinasi dari pemerintah propinsi, dan jika perlu, tingkat nasional sangat penting. Kemitraan multilevel antara pemerintah setempat, propinsi dan nasional merupakan kerjasama *win-win* dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan kelangsungan pembangunan, terutama ketika sumberdaya keuangan dapat digabungkan untuk mencapai tujuan yang penting bagi semua lapisan masyarakat. Contoh yang baik dalam hal ini adalah pendirian Cagar Alam Laut Nasional Florida Keys.

4.2.3 Kelembagaan dan Penguatan

Semua program pengelolaan pesisir di seluruh dunia biasanya mempunyai badan pengendali atau organisasi yang menangani pekerjaan sehari-hari dan mengawasi implementasi program pesisir. Meskipun begitu, segenap tanggung jawab pengelolaan pesisir tidak pernah diletakkan pada satu kementerian atau departemen. Tanggung jawab pemerintah dibagi secara vertikal maupun horisontal melalui kerjasama antar berbagai organisasi. Penempatan kelembagaan dan programatik dan pembangunan adalah bagian penting dalam mengembangkan program pengelolaan pesisir yang berhasil. Sejumlah pelajaran mengenai pengokohan kelembagaan dan programatik ditemui selama perjalanan SWI.

Pentingnya badan konsolidasi di tiap tingkat pemerintah yang berfokus secara khusus pada pengelolaan pesisir dan kelautan digarisbawahi di semua tingkat pemerintahan dan setiap badan yang dikunjungi. Hal ini memberikan koordinasi di mana perencanaan pesisir setempat, koordinasi regional dan kepentingan nasional dapat dimonitor dan dipadukan. Badan konsolidasi tersebut menjamin konsistensi dengan rencana pengelolaan pesisir setempat, hubungan dengan badan yang

tepat berkaitan dengan masalah pelanggaran peraturan dan negosiasi dan menjamin transparansi pada saat dalam keadaan timbul konflik antar pengguna sumberdaya pesisir. Kantor dan staf yang berdedikasi pada pengelolaan pesisir akan sangat meningkatkan kepatuhan yang lebih luast terhadap rencana pengelolaan pesisir, konsistensi dengan prioritas pembangunan regional dan nasional dan penyelesaian konflik yang efektif. Kantor ini juga menjamin bahwa keahlian profesional dibentuk dan siap menangani masalah paling utama dalam pengelolaan sumberdaya.

Kegiatan bersama yang dijalin melalui Memorandum Kesepahaman dan mekanismelain, membuka kesempatan luar biasa bagi Indonesia untuk mengakses keahlian dan dukungan lain seperti data ilmiah. Setiap organisasi yang dikunjungi memberikan informasi berharga dan sangat antusias menjalin hubungan dengan peserta SWI sehubungan dengan pengelolaan pesisir dan kelautan di Indonesia. Staf pemerintah pusat, negara bagian dan lokal di Amerika Serikat, LSM dan wakil sektor swasta menyadari pentingnya lingkungan pesisir dan kelautan Indonesia bagi kesehatan ekosistem dunia. Secara nyata semua badan dan pihak-pihak yang dikunjungi menawarkan dirinya untuk memberikan dukungan tambahan dan informasi untuk membantu pembangunan program pengelolaan pesisir terpadu di seluruh nusantara. Memorandum Kesepahaman (MoU-terlampir) yang ditandatangani selama SWI merupakan bukti dari keinginan Amerika Serikat untuk membantu. Meski demikian, nilai dari hubungan dan MoU terletak pada tindak lanjut dan implementasi dari perjanjian tersebut dan tindak lanjut dengan kontak profesional yang dibuat selama SWI. Dengan memanfaatkan jalinan kegiatan lewat MoU dan jaringan profesional lain, keahlian dan bantuan disediakan untuk mempercepat upaya pembangunan pengelolaan pesisir di Indonesia.

Rencana Pengelolaan Daerah Khusus (SAMPs) disebarkan di seluruh rencana pengelolaan pesisir di AS dan sangat cocok untuk program pengelolaan pesisir di Indonesia berdasar UU No. 22/1999. SAMPs dapat digunakan untuk melindungi serangkaian habitat yang penting untuk pemanfaatan setempat dan juga pariwisata, dan kadang digunakan untuk melindungi hak-hak penduduk asli, masalah yang cukup penting di Indonesia. SAMPs punya banyak bentuk dan nama dan memiliki sejumlah unsur program untuk mencapai sejumlah tujuan. SAMPs secara alternatif memasukkan cagar alam laut, daerah perlindungan kelautan atau lahan basah, suaka alam, daerah khusus, dan lain-lain, dan semuanya memberikan tingkat kekhususan lebih tinggi dalam hal pemanfaatan yang dapat diterima. Berdasarkan UU No. 22/1999, pemerintah setempat memiliki kewenangan untuk membuat SAMPs yang didukung oleh peraturan lokal. Ini berlaku terus hingga pemerintahan tingkat desa. Lewat dukungan dari USAID di Proyek Pesisir, tiga desa di Sulawesi Utara telah mempunyai cagar alam laut yang tertutup penggunaannya. Model ini menawarkan kesempatan besar untuk diaplikasikan di Indonesia; contohnya di desa di Lampung dan program tingkat propinsi dan program berbasis DAS di Kalimantan Timur yang didukung oleh Proyek Pesisir.

*Pemerintahan setempat di Indonesia harus segera memulai perencanaan spasial efektif dan program pengaturan tata guna lahan untuk mencegah biaya tinggi di masa depan dalam hal kerusakan lingkungan dan ekosistem pesisir dan hilangnya devisa akibat hilangnya kesempatan memanfaatkan pesisir bagi pariwisata dan produk kelautan. Staf pengelolaan pesisir di Big Pine Key, Florida dan di Negara Bagian Washington mengakui sulitnya melaksanakan proses ini karena banyaknya kepentingan penduduk setempat yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan spasial. Meski demikian, mereka juga menyetujui pentingnya perencanaan tata guna lahan pesisir yang mereka sadari sebagai kesalahan mereka duapuluh tahun silam. Kekeliruan ini berakibat pada hilangnya devisa dan meningkatnya biaya pengelolaan yang dipikul pemerintah setempat. Indonesia memiliki model yang bagus untuk memulai proses tersebut. Dengan bantuan USAID melalui *Proyek Pesisir*, Propinsi Lampung telah membuat peta pesisir yang telah dijadikan model bagi semua propinsi pesisir Indonesia. Ini adalah langkah pertama menuju perencanaan spasial yang terinci dan efektif,*

dan menandai bahwa pendekatan tersebut bisa dilaksanakan dan diterapkan di Indonesia.

Pembangunan jaringan wilayah perlindungan kelautan dan estuaria yang melintas sepanjang tepi pantai Amerika Serikat, dan yang mencakup wilayah-wilayah habitat kritis dalam perairan dan teritori AS, menjadi model pelestarian habitat dan keanekaragaman hayati. Sistem pelestarian di Amerika Serikat, kini meliputi 22 lokasi pelestarian di delapan belas negara bagian dan teritori dengan luashampir 440.000 are perairan estuaria, lahan basah dan *upland*spesisir, menjadi model buat Indonesia. Penerapan dan perlindungan wilayah tersebut dibagi di antara lembaga dan sangat efektif dalam menjamin habitat kritis dan daerah pembiakan. Proses pembuatan sistem ini meliputi inventarisasi wilayah yang ada, identifikasi kekurangan pada sistem dan daerah yang terlupakan, pembangunan pengelolaan berbasis ilmiah untuk daerah tersebut, dan mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan wilayah perlindungan. Daftar daerah perlindungan yang ada dan status terkini dari efektivitas pengelolaan harus disempurnakan untuk Indonesia, dilanjutkan dengan identifikasi kekosongan ekosistem kritis pada jaringan ini. Lewat pendekatan ini, perencanaan sumber dayakelautan Indonesia merupakan holistik dan mempertimbangkan interaksi di dalam dan antar segenap kepulauan sehingga lebih mendekati pendekatan menyeluruh pada kelangsungan kontribusi pesisir dan kelautan bagi perekonomian nasional dan lokal.

Harus diperhatikan bahwa membuat jaringan pelestarian laut di Indonesia, sementara ada tugas penting yang kritis yang harus ditangani segera, tidak harus mengikuti sistem Amerika Serikat dalam hal pembuatan pelestarian yang meliputi daerah yang luas. USAID dan Proyek Pesisir menunjukkan penerapan dari pendekatan tersebut di tiga desa di Sulawesi Utara yang telah membangun cagar alam laut berbasis masyarakat dan perangkat pendukung. Desa lain di Pulau Sebesi di Propinsi Lampung juga telah mulai mengikuti model tersebut.

Proses perizinan yang lengkap dan jelas dibutuhkan bagi kontrol pembangunan yang efektif di zona pesisir. Seperti digambarkan di Rhode Island, membuat dan menerapkan program perizinan bagi pengembangan pesisir adalah proses yang rumit dan sulit. Namun perizinan penting untuk melindungi ekonomi saat ini dan mendatang dan nilai-nilai masyarakat di zona pesisir. Program perizinan harus meliputi perizinan yang berbeda untuk setiap kegiatan yang berbeda, penetapan wilayah segenap zona pesisir lewat proses transparan dan debat publik demi menjamin terlaksananya proses transparan, dan prosedur yang disederhanakan sehingga setiap orang dapat dengan mudah memahaminya. Program harus bisa dijalankan dalam konteks lokal.

Supaya bisa dijalankan, sistem perizinan pesisir harus mendapat dukungan konstituen lokal dan memberi kewenangan penduduk setempat untuk berperan serta dalam pelaksanaan program. Salah satu aspek yang sangat penting dalam peran serta masyarakat adalah ketentuan di dalam program untuk menanggapi secara cepat transparan, semua komplain dan pelanggaran dan menangani dampak kumulatif dari pembangunan yang tengah berlangsung. Program perizinan lokal (dan juga propinsi dan nasional) harus ditulis dalam bahasa yang luas sehingga fleksibilitas akan masalah yang belum diatur tidak akan mengganggu proses perizinan.

Pariwisata berbasis pembangunan multi fungsi di pesisir dan pantai adalah sumber devisa utama yang saat ini belum berkembang di Indonesia, yang memiliki potensi ekonomi hebat dan akan mengakibatkan dampak besar jika perencanaan pesisir terpadu tidak segera dijalankan di Indonesia. Indonesia harus segera mengembangkan pariwisata pesisir dan program multifungsi untuk mencegah kehilangan potensi besar perekonomian dan biaya-biaya di masa datang. Seperti disaksikan oleh peserta SWI, di Washington, D.C., Baltimore, Florida, Rhode Island dan Negara Bagian Washington, pariwisata dan pembangunan pantai multi fungsi mendatangkan aliran devisa besar

untuk pemerintah setempat dan negara bagian. Di Florida Keys saja hasilnya 1,2 miliar dolar setahun dari pajak pariwisata. Di Negara Bagian Washington, Pelabuhan Seattle berada di tengah-tengah sederetan café dan restoran yang dikunjungi oleh penduduk setempat dan turis. Perairan di Pelabuhan Seattle bisa dipakai untuk berenang bersebelahan dengan kapal-kapal besar yang berlabuh di dok. Juga, fasilitas Akuarium Baltimore telah terbukti menjadi mesin penghasil uang bagi renovasi pusat kota dan menjadi lokasi yang menarik masyarakat setempat dan turis.

Di Rhode Island, badan pengembangan pariwisata mempromosikan wilayah pesisir Rhode Island yang asli lewat program pemasaran yang dirancang khusus bagi segmen-segmen individu. Hasilnya, pariwisata menjadi industri yang stabil dan penting di Rhode Island dan menyelamatkan Negara Bagian dari resesi akibat menurunnya industri penting lain seperti industri pertahanan dan manufaktur. Di semua pesisir negara bagian, pajak dari pariwisata dan pemanfaatan pantai dan sumberdaya pesisir menjadi alasan utama pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan pesisir. Pesisir Indonesia dan sumberdaya pantainya jauh lebih luas dari yang ditemukan di AS dan menawarkan potensi yang luar biasa besarnya bagi pengembangan multiguna yang berkelanjutan.

Program pengelolaan pesisir berbasis DAS diperlukan untuk menjamin kesehatan dan produktivitas ekonomi perkotaan di wilayah teluk. Hal ini ditunjukkan oleh pendekatan berbasis DAS terpadu oleh Tim Pengawas Kualitas Air Puget Sound dalam mengatasi dampak kualitas air Puget Sound. DAS yang dijadikan proyek pengelolaan teluk pemukiman rumit dan di Puget Sound melibatkan lebih dari 15 perundangan federal dan negara bagian, sejumlah peraturan tambahan federal, negara bagian dan lokal dan juga yurisdiksi dan kepentingan Suku Indian. Hal ini analog dengan tanggungjawab administratif di banyak teluk pemukiman di Indonesia dan menjadi model bagaimana kewenangan administratif dan manajerial dapat diintegrasikan untuk mencapai perlindungan perkotaan di wilayah teluk dan pembangunan yang berkelanjutan. Model ini memerlukan pembentukan suatu kantor atau tim dengan tanggungjawab khusus untuk mengkoordinasikan pengelolaan perkotaan di wilayah teluk melalui perencanaan DAS. Melalui kelompok kerja antar lembaga, tim ini kemudian mengarahkan proses identifikasi wilayah, identifikasi historis dan masalah tekanan yang sedang dialami wilayah tersebut, dan menentukan tingkatan masalah serta tindakan untuk mengurangi sumber kontaminasi, melindungi dan memperbaiki habitat dan rencana bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Pencemaran *non-point source* berperan dalam kontaminasi di perkotaan di wilayah teluk. Sumber ini biasanya berawal di hulu dari tumpahnya oli ke got, kontaminasi *storm water*, sedimen dari pembersihan ladang tanpa daerah penyangga sungai, limbah kimia pertanian dan rumah tangga dan buangan yang tidak diolah. Dalam menangani masalah tersebut, pemerintah setempat di Indonesia harus pertama-tama disadarkan akan masalah tersebut dan dijadikan rekan pada setiap program yang dicalonkan. Lalu, pemerintah setempat tadi membuat program pengelolaan DAS mereka sendiri yang dipahami dan didukung oleh warga setempat. Seperti pada program DAS Sungai Nisqually Negara Bagian Washington, mungkin pemerintah propinsi atau kabupaten berminat untuk membeli tanah kritis bagi pelestarian kualitas air di DAS atau perkotaan di wilayah teluk yang menjadi tempat pelimpahan buangan DAS. Dukungan USAID melalui *Proyek Pesisir*, bekerja sama dengan pemerintah setempat, telah memulai program pengelolaan DAS di Balikpapan berfokus pada perlindungan dan mengurangi tekanan di Teluk Balikpapan. Pertemuan telah diselenggarakan dan rencana sedang disempurnakan untuk mendirikan sebuah LSM baru dengan fokus utama pada pengelolaan DAS. Ini menjadi model untuk perkotaan di wilayah teluk lain namun juga memiliki implikasi luas bagi pengelolaan kualitas air di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Tim Puget Sound telah diajak bergabung untuk mendukung inisiatif Proyek Pesisir di Teluk Balikpapan dan telah setuju (lewat Memorandum Kesepahaman yang ditandatangani di Seattle dalam perjalanan

SWI) untuk suatu dukungan dalam jangka panjang.

4.2.4 Diseminasi (penyebaran) Informasi, Pendidikan dan Keunggulan

Sangat penting bagi program berbasis Indonesia untuk menyebarkan informasi ke negara-negara di luar Indonesia tentang pembangunan CZM dan pemerintahan yang baik. Pejabat Amerika Serikat dan para pengelola pesisir merasa terkejut ketika peserta Indonesia memberi pengarah mengenai kemajuan dan perkembangan baru berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan kelautan di Indonesia. Hal ini menandai pentingnya program untuk menyebarkan informasi positif tentang pembangunan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam ke negara lain. Interaksi antara profesional pesisir dan kelautan Amerika Serikat dan peserta SWI Indonesia merupakan aspek keberhasilan SWI.

LSM dan media berperan penting dalam mengawasi dan melangsungkan pengelolaan pesisir di semua tingkat pemerintahan. LSM di Amerika Serikat memegang peran besar dalam menggerakkan masyarakat mengenai masalah pesisir dan kelautan di tingkat lokal, menyediakan tenaga sebagai relawan untuk mendukung program nasional dan negara bagian, dan penyuluhan menyeluruh baik terhadap penduduk setempat maupun pengunjung wilayah pesisir. Selama lebih dari 30 tahun, LSM, bersama dengan media, telah menjadi konstituensi politis penting yang mempengaruhi kebijakan nasional, negarabagian dan lokal secara mendalam. Proses yang sama sedang berlangsung di Indonesia ketika LSM dan media menemukan kebebasan baru dalam berekspresi. Ada kesempatan luar biasa memanfaatkan kekuatan LSM dan media untuk menyebarkan informasi secara cepat dan mencapai tingkat penyuluhan masyarakat yang perlu untuk membina program pesisir terpadu di Indonesia. Pemerintah di semua tingkat harus segera menjadikan kedua sektor tersebut sebagai mitra untuk mengetahui nilai publik dan menggapai aspirasi masyarakat dalam kaitan dengan sumberdaya pesisir dan kelautan.

Partisipasi komunitas, universitas, LSM dan sektor swasta dalam pengelolaan pesisir dan kelautan penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program pengelolaan pesisir. Partisipasi publik dan peran LSM merupakan komponen yang selalu ada dari program pengelolaan zona pesisir di AS. Peran pemerintah pusat dan negara bagian dalam menjamin proses keikutsertaan yang besar dalam pengelolaan pesisir ditonjolkan pada setiap kunjungan. Dengan menjamin bahwa proses partisipasi masyarakat dan peranan LSM masih dijalankan, badan pemerintah memperbesar kapasitas manajemen mereka dan mendapat dukungan luas untuk inisiatif pengelolaan pesisir. Peserta SWI berkali-kali menyaksikan bahwa pengelolaan bersama (*co-management*) yang efektif diperoleh melalui partisipasi masyarakat yang efektif pula. Pertemuan diadakan antara peserta SWI dan badan warganegara AS dan LSM yang memegang peran utama dalam pelaksanaan seluruh aspek program pengelolaan pesisir. Termasuk mengatur dan menyuarakan nilai masyarakat berkenaan dengan pengelolaan pesisir yang, bila tidak begitu, tidak akan dipedulikan. Yang paling utama di antara program negara bagian adalah pendekatan dalam menyelesaikan konflik, koordinasi dan proses keharmonisan (termasuk konsistensi program pengelolaan zona pesisir oleh badan negara bagian). Pelajaran untuk Indonesia termasuk memfokuskan pengembangan program baru untuk keikutsertaan masyarakat, terutama yang berdasarkan UU No. 22/1999 dan bekerja sama dengan pemerintah setempat menetapkan standar minimum untuk transparansi dan partisipasi masyarakat.

Program pendidikan masyarakat adalah kunci untuk menggali dukungan dan konstituensi masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan kelautan. Hal ini sering dikombinasikan dengan *penghasil devisa*. Selama kunjungan ke Akuarium Baltimore dan ke NOAA/ Ekshibisi Ekspedisi Geografis Nasional di Florida dengan Dr. Sylvia Earle, peserta SWI menyaksikan secara langsung nilai dari program penyuluhan masyarakat. Seluruh peserta SWI mendapat seperangkat bahan dan

gagasan yang menunjukkan: a) bagaimana menjalin dan membangun konstitusi demi pengelolaan zona pesisir, dan b) bagaimana agar masyarakat tertarik dalam jangka panjang. Generasi penerus konstituen dibangun secara progresif dengan cara memperbaharui masalah pengelolaan zona pesisir, dengan memperbaharui masalah menjadi program pendidikan masyarakat yang lebih progresif, dan dengan menjaga agar masalah pengelolaan zona pesisir menonjol di media lokal. Indonesia membutuhkan pendidikan masyarakat serupa yang terorganisir dan sistematis dan usaha unggul dan harus berusaha menjadikannya elemen inti dari semua inisiatif pengelolaan zona pesisir.

Kesimpulan dan Rekomendasi Program

5.1 Ringkasan Temuan

Dengan adanya perubahan politik dan administratif selama empat tahun belakangan ini, Indonesia kini tepat berada pada jalur baru pengelolaan pesisir dan kelautan. Jadwal SWI membuat pelajaran yang diterima siap untuk dipetik dan dilanjutkan oleh peserta Indonesia. Dengan pengalaman selama tiga puluh tahun dalam pengelolaan pesisir dan kelautan terpadu, walaupun tidak semuanya berhasil, Amerika Serikat menyajikan laboratorium hidup yang menarik untuk diteliti dan dipelajari oleh Indonesia.

Selain skala dan tingkat pembangunan yang berbeda, perjalanan observasi ini telah menggambarkan banyak sekali unsur kunci yang, meskipun bila diteliti satu persatu masih kurang sesuai, keseluruhannya dibutuhkan untuk program pengelolaan pesisir dan kelautan yang efektif dan terpadu. Pilihan tempat yang dikunjungi SWI sesuai dengan pendekatan dua-jalur (*two tracks approach*) Proyek Pesisir untuk mengembangkan pengelolaan pesisir di Indonesia; a) pertemuan yang difokuskan pada praktik teladan (*best practice*) di berbagai wilayah geografis dan tematik, dan b) pertemuan yang berfokus pada pengembangan suatu kebijakan nasional.

Barangkali agak mengejutkan karena pengalaman Amerika Serikat memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia dalam hal pengembangan program pengelolaan pesisir, meskipun kesamaan itu terpisah oleh jangka waktu. Tahun limapuluhan dan enampuluhan Amerika Serikat mengalami perubahan radikal dalam akses informasi oleh masyarakat umum dan kewenangan politik dari masyarakat. LSM dengan agenda politik lingkungan hidup banyak berkembang dan masalah lingkungan dikaitkan langsung dengan hak asasi dan keinginan masyarakat setempat akan pemanfaatan sumberdaya pesisir. Peran pemerintah pusat juga berkembang ke arah rasa tanggungjawab yang lebih besar atas perlindungan bagi hajat hidup masyarakat banyak, yaitu sumberdaya masyarakat yang dimiliki oleh semua warganegara AS, pemenuhan kebutuhan bukan saja generasi saat ini namun juga generasi penerus. Badan-badan pemerintah baru saat itu didirikan untuk menangani kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul sebagai akibat perubahan sosial dan politik.

Kesamaannya dengan Indonesia sangat jelas. Dengan tumbangnya Pemerintah Orde Baru, akses informasi di Indonesia mungkin, dalam ukuran relatif, berkembang lebih cepat dari yang terjadi di AS lewat penggunaan Internet dan media massa lainnya. Badan pemerintah baru seperti Departemen Kelautan dan Perikanan dibentuk bersamaan dengan Otonomi Daerah dan Fiskal yang mengubah proses pembuatan keputusan bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. LSM Indonesia, apalagi partai politik, juga tumbuh subur.

Meskipun begitu, peristiwa-peristiwa tersebut bukannya tidak sama dengan gerakan yang terjadi di AS seputar masalah lingkungan hidup dan sosial tigapuluh hingga empatpuluh tahun lalu. Hasilnya, peristiwa kewenangan kelembagaan, organisasi, hukum dan masyarakat pada pengalaman AS menjadi target, atau model, bagi pembangunan pengelolaan pesisir dan kelautan terpadu Indonesia. Hal ini dengan jelas dibicarakan pada Lampiran F yang berisi evaluasi, observasi dan rencana peserta yang dihasilkan dari kunjungan ini.

Ada tiga kesimpulan langsung dan signifikan dari SWI. Yang pertama mencakup materi dan dokumen. Lima boks buku-buku, brosur, dokumen panduan, perundangan, dan informasi lain dikirim ke Indonesia dan menjadi warisan tertulis dari pengalaman AS (dan SWI). Yang kedua meliputi hubungan profesional antara peserta SWI dan profesional pengelolaan kelautan dan pesisir di Amerika Serikat. Jalur ini merupakan jalur terbuka, melalui jalur ini terjadi arus informasi komunikasi dua arah sehingga kerjasama antara kedua negara dapat ditingkatkan. Ketiga, dan mungkin merupakan hasil paling penting ditinjau secara individu, adalah pengetahuan dan visi yang kini tersimpan di benak peserta SWI dalam hal pengelolaan pesisir dan kelautan terpadu. Yang dimaksud dengan "terpadu" di sini berhubungan dengan integrasi badan pemerintah secara vertikal dan horisontal, informasi teknologi terpadu dan pembagiannya, dan integrasi dan kewenangan publik dan LSM sebagai hasil dari tiga puluh tahun AS mengimplementasikan UU Pengelolaan Zona Pesisir tahun 1972.

5.2 Rekomendasi Program Hasil dari Studi Wisata Internasional ke Amerika Serikat

1. Dengan ditandatanganinya Memorandum Kesepahaman pada saat SWI, diharapkan terjadi pertukaran informasi dan personil yang sangat berharga. Hal ini harus aktif dilaksanakan antara kedua penandatangan. Proyek Pesisir harus membantu mitra Indonesiannya dalam mengimplementasikan MOU ini dan akses sumberdaya yang tercakup di dalamnya. Termasuk juga melanjutkan koordinasi bantuan antara TPKAPS dan program pengelolaan pesisir dan teluk berbasis DAS di Kalimantan Timur. Meliputi juga kelanjutan Proyek Pesisir melalui jaringan Coastal Resources Center (CRC) Universitas Rhode Island untuk meningkatkan hubungan yang terjalin dan dukungan pada kerjasama melalui pelaksanaannya. Kesempatan khusus dan janji kerjasama dan dukungan dari Pengelolaan Pesisir Kelautan dan Pesisir Kantor NOAA.

Dalam menjalankan Strategi Kelangsungan Proyek Pesisir, di mana mungkin dan konsisten, bantuan khusus harus diberikan untuk melaksanakan MoU hasil dari SWI. Bantuan ini tidak akan bermanfaat jika tidak dikuatkan lagi dengan inisiatif independen dan mandiri dari badan pemerintah yang merupakan pihak penandatangan MoU. Disarankan bagi semua lembaga yang dicantumkan dalam MoU untuk membuat prioritas dalam anggaran tahunan mereka untuk kegiatan lanjutan berkaitan dengan MoU.

2. Banyak kontak profesional dan tawaran untuk bertukar informasi dan bantuan terjalin selama studi wisata di luar MoU yang resmi. Mereka juga mewakili sektor-sektor yang penting demi mendapatkan bantuan jenis lain bagi pengembangan program pengelolaan pesisir di Indonesia. Proyek Pesisir dan mitra Proyek Pesisir (misalnya, peserta SWI) harus aktif menindaklanjuti hubungan tersebut sesuai dengan tujuan pengelolaan zona pesisir Indonesia.
3. Bahan yang didapat selama studi wisata harus disebarluaskan (lihat Lampiran H) di antara pengelolaan pesisir Proyek Pesisir dan mitra kelautan di Indonesia dan dipromosikan pada seminar dan kegiatan lain yang sesuai. Proyek Pesisir harus mengevaluasi bahan yang didapat dan mengidentifikasi mana yang cocok untuk ditiru dan didistribusikan lebih luas lagi. Selain itu, salinan dari seluruh bahan harus disimpan dalam perpustakaan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) di IPB (partner nasional dari Proyek Pesisir) dan salinan dari laporan ini harus disebarluaskan ke seluruh Jaringan Perguruan Tinggi Kelautan Indonesia (INCUNE).
4. Peran UU Pengelolaan Zona Pesisir Amerika Serikat dalam mengembangkan dan

mengintegrasikan pengelolaan pesisir di AS sangat dalam. Melalui UUPZP, pemerintah pusat berperan dalam menggerakkan pemerintah negara bagian dan lokal untuk menegakkan kewenangan mereka atas sumberdaya pesisir sekaligus memenuhi standar minimum lewat sertifikasi sukarela untuk proses yang transparan, peran publik dan perlindungan kepentingan masyarakat. Melalui jalur nasionalnya, Proyek Pesisir harus menjamin usaha untuk mengembangkan perundangan sejenis di tingkat pusat. Usaha ini harus diimplementasikan dalam persekutuan dengan peserta SWI yang saat ini menjadi kundi “memori kelembagaan” yang mana gagasan SWI dapat diwujudkan dalam perundangan pengelolaan zona pesisir Indonesia di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan lokal.

5. Perundangan pengelolaan pesisir negara bagian dan lokal merupakan implementasi aktual dan perangkat pembuat keputusan bagi pengelolaan pesisir di AS. Proyek Pesisir harus mendukung pengembangan perundangan pengelolaan pesisir model propinsi dan kabupaten sesuai dengan standar minimum dan mencapai tujuan pengelolaan pesisir.
6. Pelajaran yang diterima yang dijelaskan secara garis besar pada laporan ini datang langsung dari pengalaman SWI dan observasi peserta selama perjalanan. Pelajaran tersebut harus diperiksa ulang secara teliti selama konteks pengembangan Kerangka Kerja Lima Tahun Proyek Pesisir. Di mana mungkin, sumber daya dan tugas proyek harus berjalan sejajar dengan pelajaran tersebut. Pelajaran ini harus memperkokoh inisiatif dan program Proyek Pesisir pada setiap kesempatan, terutama dalam publikasi lebih lanjut dan dalam serangkaian seminar tindak lanjut baik di tingkat pusat maupun propinsi.
7. Laporan ini harus disebarluaskan pada USAID dan organisasi donor lainnya dalam memperkenalkan kesempatan yang ditemui selama SWI pada badan donor lainnya untuk mendapat dukungan untuk kegiatan dan lebih lanjut lagi menunjukkan keuntungan dari pertukaran multilateral.
8. Laporan ini sendiri menampilkan sumberdaya tak ternilai karena menunjukkan dan menggambarkan sejumlah pendekatan akan pengelolaan pesisir yang dapat diterapkan di Indonesia. Karena itu laporan ini harus disebarluaskan pada rekan Proyek Pesisir dan badan pemerintah untuk merangsang terjadinya dialog dan koordinasi sekitar masalah kunci. Laporan ini harus disampaikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Kependudukan dan Infrastruktur, dari mana peserta SWI berasal dan yang memiliki peran signifikan pada perencanaan dan pengelolaan zona pesisir. Versi ringkasan dari laporan ini harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar bisa lebih dipahami.
9. Dalam menciptakan program nasional yang mencakup semua unsur yang diperlukan bagi program pengelolaan pesisir terpadu di seluruh Indonesia, anggaran tingkat pusat, propinsi dan kabupaten harus disejajarkan dengan prioritas yang tepat. Laporan ini harus digunakan untuk menginformasikan proses perencanaan dan anggaran kerja pada setiap tingkat pemerintahan, khususnya dalam hal membuat perundangan pengelolaan pesisir di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, dan mengembangkan program yang spesifik, individual seperti cagar alam laut dengan basis masyarakat yang menawarkan potensi luar biasa dalam konteks Indonesia.

Lampiran A

**Pernyataan Minat
antara
NOAA
dan
Departemen Kelautan dan Perikanan**

Pernyataan Minat untuk Mendalami Kerjasama dalam Masalah Kelautan dan Pesisir Antara Departemen Kelautan dan Perikanan RI (DKP) dan Kantor Kelautan Nasional Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA)

Menimbang bahwa kedua pemerintahan tengah membahas draft pertama dari Pernyataan Bersama pada Agenda Bersama AS-Indonesia tentang Lingkungan Hidup yang akan meliputi masalah-masalah pesisir dan kelautan:

Menimbang bahwa NOAA telah berpengalaman selamatigapuluh tahun dalam urusan pesisir negara bagian yang mengelola urusan kelautan AS:

Menimbang pentingnya LSM seperti misalnya Coastal Resources Center Universitas Rhode Island AS, yang mana Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisirnya – Proyek Pesisir – memegang peran central dan penting dalam memandu DKP dalam pengurusan kelautan;

Mengingat, lingkungan hidup pesisir dan kelautan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masing-masing negara;

Mengingat, konsentrasi dari kegiatan manusia yang kian besar di wilayah pesisir menyajikan tantangan atas ekosistem pesisir dan penduduk yang bergantung padanya;

Mengingat, NOAA dan DKP merupakan pengurus negara dalam masalah lingkungan pesisir dan kelautan;

Mengingat, ke dua pemerintahan telah memilih jalan untuk menghidupkan kepengurusan kelautan;

Kedua lembaga ini akan menilai kesempatan demi kolaborasi yang menguntungkan kedua belah pihak demi menyebarkan kapasitas yang layak dan pembentukan lembaga pengelolaan pesisir dan kelautan. Pihak-pihak ini setuju untuk meneliti topik-topik kepentingan yang mungkin meliputi namun tidak terbatas pada yang berikut:

- Mempertimbangkan hubungan kolaborasi pada: pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan yang terlindungi termasuk; terumbu karang; monitoring dan evaluasi; analisa resiko ancaman kerusakan pesisir dan kelautan dan perencanaan mitigasi; penanggulangan tumpahan limbah berbahaya dan restorasi; layanan ilmu dan teknis; penyuluhan; navigasi yang aman; program Bantuan Dana Kelautan; masalah perikanan (riset, penerapan peraturan); dan pemetaan zona eksklusif dan pengawasan;
- Memberi kesempatan untuk: penggantian personel, pelatihan dan kolaborasi; saran prosedural dan analisa kebijaksanaan bagi implementasi regional dari pengelolaan pesisir terpadu;
- Mengusulkan kerjasama ini sebagai suatu komplemen pada hubungan yang sudah terbina dengan universitas dan LSM di wilayah tertentu, seperti Universitas Rhode Island, Proyek Pesisir dari Coastal Resources Center;

- Melaksanakan pertemuan lanjutan untuk membahas kepentingan bersama;
- Meneliti kemungkinan untuk menjalin memorandum kesepahaman yang tidak mengikat bagi kegiatan bersama di masa yang akan datang;
- Pernyataan minat ini bukan merupakan dokumen yang mengikat secara hukum dan tidak mengandung sumberdaya.

Sarwono Kusumaatmadja
Menteri
Departemen Eksplorasi Kelautan

D. James Baker
Under Secretary for Oceans and Atmosphere

Lampiran B

**Memorandum Kesepahaman
antara
Universitas Rhode Island
dan
Departemen Kelautan dan Perikanan**

MEMORANDUM KESEPAHAMAN

OLEH DAN ANTARA:

COASTAL RESOURCES CENTER (CRC), UNIVERSITAS RHODE ISLAND,
GRADUATE SCHOOL OF OCEANOGRAPHY, NARRANGANSETT, RHODE
ISLAND, AMERIKA SERIKAT

DAN

DIREKTORAT URUSAN PESISIR, PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL,
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN, JAKARTA, INDONESIA

Mengingat: CRC didirikan pada tahun 1971. Pusat studi ini dibuat untuk merancang strategi demi pengelolaan lingkungan pesisir yang efektif di seluruh dunia. Tujuan CRC diwujudkan melalui serangkaian tindakan dalam program lapangan, riset dan pendidikan, komunikasi, dan pelatihan dan penyuluhan; dan

Mengingat: Pada awal tahun 2000, Pemerintah Indonesia membentuk departemen baru bernama Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengintegrasikan wewenang dan pengambilan keputusan dalam masalah kelautan pada satu badan nasional. Di bawah kementerian ini, suatu Direktorat Urusan Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil didirikan untuk menyusun dan menerapkan pendekatan efektif atas pengelolaan pesisir dan kelautan terpadu; dan

Mengingat: Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah AS sebagai rekan dalam Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Indonesia (Coastal Resources Management Project), sebuah proyek pengelolaan pesisir berjangka 7 tahun yang didanai bersama oleh United Agency for International Development (USAID) dan Pemerintah Indonesia; dan

Mengingat: CRMP Indonesia diimplementasikan melalui Coastal Resources Center (CRC) Universitas Rhode Island dan CRC-URI telah mengikatkan dirinya pada kelangsungan kerjasama jangka panjang dengan lembaga di Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

Bersama ini disetujui bahwa:

CRC dan Direktorat Urusan Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil setuju untuk mempelajari cara untuk berbagi pengalaman dan informasi sehubungan dengan pengelolaan, perbaikan dan perlindungan pesisir, daerah estuaria, teluk dan perairan.

Kerjasama ini bisa meliputi setiap bidang pengelolaan pesisir atas kepentingan bersama, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan kebijakan nasional; penyuluhan dan keterlibatan masyarakat; praktik-praktik manajemen terbaik bagi pembangunan; monitoring program dan lingkungan; dan masalah teknis.

Kerjasama bisa berupa program atau ilmiah dan mencakup:

- Kunjungan balasan oleh pengelola pesisir, peneliti dan mahasiswa;
- Analisa riset dan kebijaksanaan terapan;

- Tinjauan mengenai materi dan rancangan; dan
- Tindakan lain yang berpangkal pada keuntungan bersama.

Selanjutnya, para pihak dalam perjanjian ini mengetahui bahwa:

Setiap proposal kegiatan bersama yang merupakan bagian dari MOU ini harus diajukan untuk disetujui dan diintegrasikan pada kerangka kerja kedua pihak.

Implementasi dari setiap kegiatan bersama harus bergantung pada persetujuan kedua pihak untuk menjalankan kegiatan tersebut. Persetujuan akan diberikan, dengan dasar:

- Konsistensi dari tujuan kegiatan yang diajukan terhadap tiap pihak dan MoU; dan
- Kesiediaan dan persetujuan para pihak untuk mengalokasikan sumber intern yang diajukan untuk kegiatan tersebut dan/ atau mencari dana dari sumber lain yang akan memberikan alokasi sumberdaya untuk melakukan kegiatan tersebut.

Kegiatan khusus yang disetujui oleh kedua pihak harus dinyatakan secara tertulis dalam perjanjian yang mengemukakan dan secara jelas menjelaskan peran, tanggung jawab dan kontribusi tiap pihak sehubungan dengan kegiatan tersebut. Begitu perjanjian ditandatangani oleh para pihak, dokumen ini akan berperan sebagai instrumen penggerak bagi kegiatan bersama.

Salah satu pihak dapat, kapan saja, mengakhiri perjanjian ini.

MOU ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/ diperbaharui atas persetujuan kedua pihak secara tertulis.

Dengan ini perjanjian ditandatangani tanggal 18 September 2000
Pihak-pihak

Universitas Rhode Island

Departemen Kelautan dan Perikanan

Dr. Robert Carothers
Rektor

Sarwono Kusumaatmadja
Menteri

Universitas Rhode Island
Pusat Sumber Daya Pesisir

Direktorat Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan

Mr. Stephen B. Olsen
Direktur

Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS
Direktur Jenderal

**Memorandum Kesepahaman
antara
Rhode Island Coastal Resources
Management Council
dan
Propinsi Lampung**

MEMORANDUM KESEPAHAMAN

ANTARA

COASTAL RESOURCES MANAGEMENT COUNCIL
WAKEFIELD, RHODE ISLAND

DAN

BADAN PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG (BAPPEDA),
INDONESIA

Mengingat, Coastal Resources Management Council (CRMC) telah berpengalaman selama 30 tahun dalam merencanakan dan mengimplementasikan program terpadu bagi pelestarian, perlindungan, pembangunan dan bila mungkin perbaikan sumberdaya pesisir Rhode Island bagi generasi masa kini dan penerusnya; dan

Mengingat, Rhode Island merupakan bagian dari US National Oceanic and Atmospheric Administration dan program Negara Bagian dijalankan melalui CRMC; dan

Mengingat, pemerintah federal melalui US National Oceanic and Atmospheric Administration dan United Agency for International Development tertarik untuk berbagi pengalaman mengenai Program Pengelolaan Pesisir Nasional secara internasional; dan

Mengingat, Coastal Resources Management Council (CRMC) tertarik untuk berbagi pengalaman dan mempelajari hasil program dari negara lain; dan

Mengingat, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah AS sebagai rekan pada Coastal Resources Management Project (CRMP), suatu proyek pengelolaan pesisir berjangka tujuh tahun yang didanai bersama oleh United State Agency for International Development (USAID) dan Pemerintah Indonesia dan diimplementasikan melalui Coastal Resources Center Universitas Rhode Island; dan

Mengingat, Propinsi Lampung merupakan fokus dari CRMP untuk mengelola lahan pesisir dan perairan dan BAPPEDA Lampung tertarik dalam berbagi pengalaman dan mempelajari hasil program dari negara lain.

Bersama ini disetujui bahwa:

- a) CRMC dan BAPPEDA Propinsi Lampung setuju untuk mempelajari cara-cara berbagi pengalaman dan informasi sehubungan dengan pengelolaan, perbaikan dan perlindungan atas pesisir, daerah estuaria, teluk dan perairan.
- b) Kerjasama bisa berupa program atau inisiatif ilmiah atas keuntungan bersama, seperti:
 - β Kunjungan balasan;
 - β Analisa riset dan kebijaksanaan terapan;
 - β Kegiatan lain yang berazas pada keuntungan bersama.

Implementasi: Implementasi dari setiap kegiatan bersama harus disetujui oleh kedua pihak untuk menjalankan kegiatan tersebut. Setelah suatu kegiatan khusus disetujui oleh kedua pihak, selembar surat perjanjian harus dibuat yang mengemukakan secara jelas peran, tanggung jawab dan kontribusi tiap pihak sehubungan dengan kegiatan tersebut. Begitu perjanjian ditandatangani oleh para pihak, dokumen ini akan berperan sebagai instrumen penggerak bagi kegiatan bersama.

Pemutusan: Salah satu pihak dapat, kapan saja, mengakhiri perjanjian ini.

Masa berlaku: MoU ini berlaku selam lima (5) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/ diperbaharui atas persetujuan ke dua pihak secara tertulis.

Dengan ini perjanjian ditandatangani tanggal 20 September 2000
Pihak-pihak

Michael M. Tikoian

Wakil Dirjen RI Coastal Resources
Management Council

Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS

Direktorat Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan

Grover J. Fugate

Direktur Eksekutif
RI Coastal Resources Management Council

Harris Hasyim

Ketua
BAPPEDA Lampung

**Memorandum Kesepahaman
antara
Puget Sound Water Quality Action Team
(Tim Pengawas Kualitas Air Puget Sound)
dan
Propinsi Kalimantan Timur**

MEMORANDUM KESEPAHAMAN

ANTARA

PUGET SOUND WATER QUALITY ACTION TEAM
OLYMPIA, WASHINGTON
NEGARA BAGIAN WASHINGTON

DAN

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, INDONESIA

Mengingat, Puget Sound Water Quality Action Team telah berpengalaman selama 15 tahun dalam perencanaan dan penerapan program terkoordinasi demi melindungi dan memperbaiki kualitas air dan sumberdaya biologis di wilayah Puget Sound; dan

Mengingat, program Puget Sound Water Quality Action Team merupakan bagian dari Program Daerah Estuaria Nasional Lembaga Perlindungan Lingkungan AS; dan

Mengingat, pemerintah federal melalui Lembaga Perlindungan Lingkungan (EPA) dan United State Agency for International Development (USAID) tertarik untuk berbagi pengalaman secara internasional dalam program daerah estuaria nasional; dan

Mengingat, Puget Sound Water Quality Action Team merasa tertarik untuk berbagi pengalaman dan mempelajari hasil program pada negara lain; dan

Mengingat, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah AS rekan pada Coastal Resources Management Project (CRMP), suatu proyek pengelolaan pesisir berjangka tujuh tahun yang didanai bersama oleh United State Agency for International Development (USAID) dan Pemerintah Indonesia dan diimplementasikan melalui Coastal Resources Center Universitas Rhode Island; dan

Mengingat, Propinsi Kalimantan Timur merupakan fokus dari CRMP untuk mengelola lahan pesisir dan daerah estuaria dan tertarik dalam berbagi pengalaman dan mempelajari hasil program dari negara lain.

Bersama ini disetujui bahwa:

- c) Puget Sound Water Quality Action Team dan Propinsi Kalimantan Timur setuju untuk mempelajari cara-cara berbagi pengalaman dan informasi sehubungan dengan pengelolaan, perbaikan dan perlindungan atas pesisir, daerah estuaria, teluk dan perairan.
- d) Kerjasama bisa berupa program atau inisiatif ilmiah atas keuntungan bersama, seperti:
 - β Kunjungan balasan;
 - β Analisa riset dan kebijaksanaan terapan;
 - β Kegiatan lain yang berpangkal pada keuntungan bersama.

Implementasi: Implementasi dari setiap kegiatan bersama harus disetujui oleh kedua pihak untuk

menjalankan kegiatan tersebut. Setelah suatu kegiatan khusus disetujui oleh kedua pihak, selembar surat perjanjian harus dibuat yang mengemukakan secara jelas peran, tanggung jawab dan kontribusi tiap pihak sehubungan dengan kegiatan tersebut. Begitu perjanjian ditandatangani oleh para pihak, dokumen ini akan berperan sebagai instrumen penggerak bagi kegiatan bersama.

Pemutusan: Salah satu pihak dapat, kapan saja, mengakhiri perjanjian ini.

Masa berlaku: MoU ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/ diperbaharui atas persetujuan ke dua pihak secara tertulis.

Dengan ini perjanjian ditandatangani tanggal 21 September 2000
Pihak-pihak

Laksmna (Pur) Busran Kadri
Dirjen
Direktorat Monitoring, Pengawasan dan
Penerapan
Departemen Kelautan dan Perikanan

M. Asli Amin
Ketua
BAPPEDA Kalimantan Timur

Nancy McKay
Ketua
Puget Sound Water Quality Action Team



Lampiran E

Biografi Peserta

Biografi Peserta

SARWONO KUSUMAATMADJA

*Menteri Eksplorasi Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Indonesia*

Menteri Sarwono adalah Menteri pertama di Kementerian Eksplorasi Kelautan dan Perikanan yang dibentuk pada tahun 1999 dengan Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid, dan disetujui oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan menyukai penyelaman SCUBA. Beliau fasih berbahasa Inggris.

ROKHMINDAHURI

*Direktur Jenderal Urusan Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan*

Rokhmin Dahuri mendapatkan gelar sarjana di bidang Biologi Perikanan dan Manajemen dan gelar M.Sc dari Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari Institut Pertanian Bogor. Beliau menerima Ph.D dari Manajemen Zona Pesisir Universitas Dalhousie di Nova Scotia tahun 1991, dan merupakan peserta dalam Kuliah Musim Panas di bidang Pengelolaan Pesisir di Coastal Resources Center tahun 1996 di University of Rhode Island.

Sebelum bergabung dengan Kementerian Eksplorasi Kelautan dan Perikanan, beliau bertugas sebagai Wakil Rektor Perguruan Koperasi Agribisnis; Pembantu Dekan Urusan Akademis dan Penelitian, Fakultas Perikanan; dan Direktur Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) di Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 1995 beliau menerima penghargaan Pengajar Teladan Indonesia dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau juga duduk pada dewan editor pada berbagai jurnal ilmu pengetahuan internasional maupun nasional, dan telah menerbitkan sejumlah terbitan termasuk jurnal, makalah, laporan dan buku-buku dengan berbagai subyek yang berhubungan dengan isu-isu pesisir dan kelautan. Beliau fasih berbahasa Inggris.

LAKSAMANA MUDA BUSRAN KADRI

*Direktur Jenderal Pengawasan dan Perlindungan Laut
Departemen Kelautan dan Perikanan*

Laksamana Muda Kadri mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Sekolah Pertahanan Nasional Indonesia, Pendidikan Tugas Gabungan dari Angkatan Bersenjata dan Akademi Maritim Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Deputy Operasi pada Staf Angkatan Laut; Komandan Satuan Tugas Pengamanan – Kelompok Barat; Kepala Staf Kelompok Tempur Armada Laut Timur; Komandan Unit Skuadron Kapal Patroli Cepat Armada Timur; dan pernah bertugas sebagai komandan pada kapal perang.

Jalur karir militer beliau membuatnya cocok duduk sebagai Direktur Jenderal Penerapan dan Perlindungan Kelautan di Kementerian baru ini, karena sanksi hukum merupakan isu utama di seluruh kepulauan Indonesia.

DR. ALEX RETRAUBUN

*Direktur Urusan Pulau-Pulau Kecil
Direktur Jenderal Urusan Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil*

Alex Retraubun mendapat gelar sarjana dari Fakultas Perikanan di Institut Pertanian Bogor; dan gelar Master pada Pengelolaan Pesisir daerah Tropis, dan gelar Ph.D pada Ekologi Kelautan dari Universitas Newcastle di Inggris.

Selain bertugas sebagai Direktur Urusan Pulau-Pulau Kecil, beliau adalah Kepala Laboratorium Sumber Daya Perikanan dan Koordinator untuk Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan pada Universitas Pattimura. Sebelumnya beliau menjabat sebagai kepala Laboratorium Biologi Kelautan dan sebagai pengajar pada universitas.

Dr. Retraubun tercatat sebagai ilmuwan, akademisi dan manajer di bidang sumberdaya kelautan dan pesisir. Beliau telah menulis sejumlah artikel nasional maupun internasional, termasuk jurnal, makalah, laporan dan buku-buku yang berhubungan dengan ilmu dan teknologi kelautan.

IR. RUCHYAT DJAKAPERMANA

Direktur Perencanaan Spasial, Departemen Kependudukan dan Pengembangan Wilayah

Kami mohon maaf tidak mendapatkan informasi mengenai Ir. Ruchyat Djakapermana.

HARRIS HASYIM

Ketua, Badan Perencanaan (BAPPEDA) Propinsi Lampung

Harris Hasyim mendapatkan gelar sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, dan gelar masternya di bidang Studi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan dari ISS di The Hague, Belanda. Tahun 1982, di Universitas Lampung, beliau menerima Penghargaan Pengajar Teladan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Di Universitas Lampung beliau menjabat sebagai Wakil Rektor, Dekan Fakultas Pertanian dan Wakil Direktur Divisi Penelitian Pengembangan Komunitas. Sebelum menjadi Ketua Badan Perencanaan Wilayah Lampung, beliau menjabat sebagai Wakil Kepala dan Kepala Seksi urusan Ekonomi.

Hasyim secara resmi mewakili Gubernur Propinsi Lampung pada Studi Wisata ini.

M. ASLI AMIN

Ketua, Badan Perencanaan Propinsi Kalimantan Timur

Asli Amin menerima gelar sarjana Antropologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Selain mengepalai Badan Perencanaan Kalimantan Timur, beliau juga menjabat sebagai peneliti pada masalah pembangunan untuk badan tersebut. Beliau juga bekerja pada sebuah lembaga pemerintah sebagai Asisten Ketua Kesejahteraan Sosial, Asisten Ketua Kesejahteraan Masyarakat, kepala biro pembangunan sosial dan anggota DPRD Kalimantan Timur.

Selama menjabat sebagai pegawai pemerintah, beliau mengembangkan keahlian pada pembangunan pedesaan dan wilayah lewat berbagai topik-topik pelatihan seperti lingkungan hidup, peran perempuan di wilayah pedesaan, sistem keamanan sosial, dan infrastruktur perjalanan pariwisata. Amin mendapatkan medali penghargaan dari Organisasi Pramuka Nasional tahun 1984 dan 1988 dan telah dianugerahi Lencana Kehormatan RI, dan Lencana Kehormatan Revolusi RI.

Amin secara resmi mewakili Gubernur Propinsi Kalimantan Timur pada Studi Wisata ini.

JA SURUAN

Ketua, Badan Perencanaan Propinsi Sulawesi Utara

Kami mohon maaf tidak mendapat informasi mengenai JA Suruan.

Lampiran F

Evaluasi Peserta SWI

Evaluasi Peserta IST

Evaluasi Akhir

1. Pendekatan

Dalam merancang setiap kegiatan pelatihan, sangat penting untuk dapat menilai keefektifan hasil yang dicapai. Menilai hasil kadang lebih sulit untuk pelatihan yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan karena panjangnya jadwal. Namun ada beberapa cara untuk memastikan catatan informasi dan hubungan yang terjadi antara informasi yang disajikan dan kebutuhan yang harus dicapai. Satu unsur yang juga penting bagi pendidikan adalah pengulangan informasi yang diterima dalam jadwal yang singkat – sebagai contoh selama duapuluh empat jam sampai empatpuluh delapan jam. Juga amat penting bagi peserta pelatihan untuk menyusun rencana untuk menerapkan informasi yang baru diterima saat informasi tersebut masih segar dalam ingatan mereka. Dalam mencapai keduanya, Proyek Pesisir menggunakan dua langkah pendekatan.

- (a) Konkuren, evaluasi informal dan kesimpulan – bukannya menempatkan diskusi atau perencanaan sampai setelah peserta kembali ke Indonesia ketika informasi banyak yang sudah terlupakan, Studi Wisata Proyek Pesisir ke Amerika Serikat menggunakan pendekatan belajar secara berkesinambungan. Sebelum melaksanakan setiap bagian perjalanan, diberikan pengarahan untuk menjelaskan tujuan dari kunjungan yang akan dilakukan dan untuk memberikan latar belakang konteks masalah yang disajikan. Pengarahan ini diberikan dalam grup diskusi dalam berbagai bentuk tahapan yang akan menggabungkan berbagai komponen tematik yang berbeda.
- (b) Evaluasi struktur semi formal dan rapat kerja yang berorientasi padapenemuan – di pertengahan hari-hari terakhir dan di akhir wisata, diskusi semi formal dilakukan untuk merangkum pelajaran yang sudah diterima. Menggunakan orientasi penemuan atau pendekatan terarah, peserta akan diajak untuk meneliti pengalaman mereka dan penerapan apa yang bisa dilakukan di Indonesia. Di akhir wisata evaluasi terakhir dilaksanakan tepat sebelum peserta kembali ke Indonesia, dengan memberikan survei sederhana (tiga pertanyaan) untuk mendapatkan masukan dari peserta wisata. Survei ini dilaksanakan untuk perorangan dan tanggapan dibicarakan dalam kelompok untuk mendapatkan gagasan dan perspektif antara peserta SWI. Peserta diajak untuk menyiapkan ringkasan sekembalinya mereka di Indonesia untuk dibagikan pada penduduk setempat.

Tiga pertanyaan yang disampaikan pada para peserta adalah:

- (a) Tiga hal apa yang paling Anda sukai dari wisata ini?
- (b) Tiga hal apa yang kurang Anda sukai dari wisata ini?
- (c) Tiga tindakan apa yang akan segera Anda tangani setiba di Indonesia?

2. Temuan-temuan

Tanggapan dari ketiga pertanyaan tsb disajikan sbb:

(a) Tiga hal apa yang paling anda sukai dari wisata ini?

- Penjelasan tentang perencanaan pengelolaan dan pengetahuan tentang bagaimana penerapannya di AS.
- Koordinasi antar organisasi dan bagaimana perlunya mencapai tujuan.

- Kepentingan penggunaan ganda dan pelestarian perencanaan penggunaan ganda bagi pembangunan perairan dan pelabuhan.
- Kesempatan untuk menjalin MoU dengan mitra Amerika Serikat.
- Lokasi yang bagus dan sesuai dan tempat studi wisata menolong mengembangkan visi apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia.
- Wisata menimbulkan banyak gagasan baru, khususnya bagaimana memperbaiki fokus kebutuhan pesisir dan laut dan bukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang berbasis lahan.
- Memperjelas tujuan-tujuan pada kebutuhan kita untuk lebih fokus dan pesan-pesan yang kita butuhkan untuk disampaikan kepada para konstituen di Indonesia.
- Pendekatan yang sistematis pada pengelolaan pesisir di Amerika Serikat untuk disampaikan pada otonomi daerah di Indonesia.
- Tempat dan orang yang terpilih untuk pertemuan sangat tepat untuk pengelolaan pesisir Indonesia.
- Struktur perjalanan yang sistematis.

(b) Tiga hal apa yang kurang anda sukai

- Lokasi yang dikunjungi sangat tersebar, 4 sudut negara AS – terlalu jauh untuk melakukan perjalanan sehingga jadwalnya sangat padat.
- Orang-orang yang ditemui amat sesuai, tapi semuanya berasal dari bidang lingkungan pengelolaan pesisir. Akan lebih berguna bila dapat bertemu dengan orang-orang dari departemen lain dengan tanggung jawab yang berbeda seperti pengembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perencanaan-perencanaan lain.
- Pengaturan perjalanan ini kurang memenuhi standar. Sarana perjalanan kurang memadai, sebagai contoh terbang dengan kelas bisnis tidak akan melelahkan dengan jadwal ketat seperti ini.

(c) Tiga hal apa yang akan segera Anda tangani ketika Anda kembali untuk memulai tindakan?

- Segera membuat rencana untuk menerapkan pengelolaan zona pesisir dan kelautan.
- Menindaklanjuti dan menerapkan MoU dengan rekan-rekan.
- Bekerjasama dengan Proyek Pesisir, mengadakan seminar satu hari untuk penduduk setempat.
- Mengundang pembuat UU dan bekerjasama dengan Proyek Pesisir mengembangkan lokakarya dan seminar penyuluhan masyarakat.
- Melaporkan kepada gubernur apa yang dilihat dan dipelajari pada wisata ini dan pentingnya lingkungan pesisir untuk memberikan dukungan tambahan pada pengelolaan pesisir.
- Memastikan anggaran untuk manajemen pesisir telah dimasukkan dalam anggaran pemerintah daerah di berbagai propinsi.
- Melaporkan pada Menteri mengenai pentingnya Indonesia belajar dari AS.
- Segera memulai kampanye tentang hal-hal penting yang dipelajari selama wisata, khususnya bagaimana melakukan koordinasi yang lebih baik antar departemen.
- Membuka pembicaraan dengan pemerintah daerah mengenai pengelolaan pesisir terpadu karena sekarang jelas peran pemerintah pusat adalah sebagai fasilitator penerapan pada tingkat daerah.
- Membuat laporan mengenai pentingnya pemberian kode-kode daerah dan rencana pemetaan untuk daerah pesisir.
- Mengundang orang-orang penting ke kantor dan berdiskusi/ mengidentifikasi kepentingan nasional sehubungan dengan pelajaran dari studi wisata termasuk juga apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus mereka lakukan.
- Memfokuskan pada pembuatan pedoman pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pelajaran

dari Florida Keys.

- Secara formal meminta dukungan Proyek Pesisir dalam mendapatkan buku dan pedoman lainnya yang akan sangat berguna dalam menerapkan beberapa pelajaran yang diterima.
- Membantu mengembangkan UU pengelolaan zona pesisir di Indonesia.

Lampiran

Jadwal Harian Studi Wisata

Jadwal Harian Studi Wisata

WASHINGTON, D.C.

Hari 1: Selasa, 12 September 2000

5:48 pm, Mendarat di Lapangan Udara National Regan, Washington, D.C. dengan pesawat Northwest Airlines, penerbangan no. #224.

Berangkat ke Hotel Washington Monarch

2401 M Street, N.W.

Washington, D.C. 20037

Tel. 202.429.2400

Fax. 202.457.5010

Peserta menikmati santap malam mereka di Hotel Monarch atau di restoran sekitar hotel (daftar restoran tersedia pada paket pengarahan)

Hari 2: Rabu, 13 September 2000

8:00 am – 10:30 am, Sarapan dan Sambutan (Ruang Rapat Linden, Hotel Monarch)

- Pengantar: Dr. Ian Dutton, Chief of Party, Proyek Pesisir
- Sarapan
- Sambutan; Perspektif mengenai Program Pesisir AS, Ms. Lynne Hale, Wakil Direktur, Coastal Resources Center
- Pengenalan Peserta dan Harapannya, Dr. Rokhmin Dahuri, Direktur Jenderal Wilayah Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil
- Sejarah SWI dan Implikasinya untuk Kebijakan Pesisir Indonesia, Mr. Maurice Knight, Penasehat Senior Bidang Kebijakan, Proyek Pesisir

10:45 am, Berangkat ke kapal motor "Finished Business"

11:30 am – 2:30 pm, Diskusi, Kunjungan Lapangan, dan Makan Siang sepanjang perjalanan mengarungi Sungai Potomac di atas kapal Finished Business.

Peserta akan menyaksikan secara langsung masalah pesisir dan bertemu dengan tamu dari pemerintah Amerika Serikat, LSM yang bekerja di Indonesia, yayasan dan bank pembangunan.

2:30 pm – 4:00 pm, Waktu Bebas

4:00 pm, Berangkat ke Departemen Luar Negeri

4:00 pm – 5:30 pm, Rapat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat

Peserta dari Indonesia memberikan keterangan pada pejabat AS mengenai perkembangan di Indonesia dalam hal pengelolaan pesisir dan mempelajari bagaimana tugas Departemen Luar Negeri berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir Indonesia, termasuk Inisiatif Lingkungan Hidup Asia Pasifik Timur, Program Kelautan, Inisiatif Terumbu Karang Internasional, inisiatif perubahan iklim global, dan Agenda Bersama Indonesia – AS untuk Lingkungan Hidup.

Ms. Mary Beth West, Sekretaris Pembantu Deputi bidang Kelautan

Ms. Lisa Brodey, Pejabat Luar Negeri, Program Kelautan

Mr. James Caruso, Pejabat Wilayah Indonesia, Biro Asia Pasifik Timur

Mr. David Hogan, Pejabat Luar Negeri, Bidang Konservasi Kelautan

Mr. Bruce Malkin, Pejabat Luar Negeri Regional, Biro Asia Pasifik Timur

Hari 3: Kamis, 14 September 2000

8:00 am, Berangkat ke Rapat NOAA

8:30 am – 11:30 am, Pengarahan mengenai Administrasi Atmosfer Kelautan Nasional (NOAA)

Pengarahan ini berisi gambaran program pengelolaan pesisir nasional Amerika Serikat dan mekanisme secara hukum, teknis dan finansial di mana pemerintah federal berhubungan dengan pemerintah dan program pengelolaan wilayah.

- Sambutan dan Perangkat Pembantu Keputusan untuk Resiko Berbahaya dan Penilaian Ketakberdayaan, Ms. Margaret Davidson, Pembantu Administrasi, Badan Kelautan Nasional
- Program Pengelolaan Pesisir Nasional dan Sumber Pencemaran Non Point, Mr. Jeff Benoit, Direktur, NOS Office of Ocean & Coastal Resource Management
- Penanganan, Penanggulangan, dan Pencemaran Limbah Berbahaya, Mr. David Kennedy, Direktur, NOS Office of Response and Restoration
- Mengelola Perikanan Federal; Penerapan Perikanan Antar Yurisdiksi, Data Perikanan dan Proses Informasi, Mr. Trent Lamar, Pembantu Administrasi, National Marine Fisheries Service
- The Seagrant Program, Mr. Ron Baird, Direktur, SeaGrant, Kantor Oceanic & Atmospheric Research
- Diskusi Penutup, Mr. Charles Ehler, Direktur, Kantor Bidang Kelautan Nasional Program Internasional

Latar Belakang: NOAA merupakan bagian dari Departemen Perdagangan AS. Misi utama NOAA adalah menerangkan dan memprediksi perubahan pada lingkungan hidup bumi dan sekaligus juga melestarikan dan secara bijak mengelola sumberdaya pesisir dan laut AS. Selain itu NOAA juga memperkuat hubungan antara pemanfaatan lingkungan hidup dan perkembangan ekonomi. Lewat Kantor Kelautan Nasional (NOS), NOAA mengembangkan dan menyebarkan kebijakan pengelolaan kelautan dan pesisir secara efektif sekaligus menjembatani celah antara ilmu, pengelolaan, dan kebijakan publik. Kantor Perikanan Laut Nasional NOAA menjalankan program yang mendukung konservasi domestik dan internasional dan pengelolaan sumberdaya hidup kelautan (living marine resources). Penelitian kelautan, pesisir dan atmosfer dilaksanakan oleh Kantor Penelitian Atmosfer dan Kelautan NOAA, baik di dalam laboratoriumnya sendiri maupun lewat program kerjasama dengan universitas.

11:30 am – 12:30 pm, Peserta bersantap siang sendiri di dalam gedung Ronald Reagan

12:45 pm – 2:00 pm, Rapat dengan United States Agency for International Development (USAID) Peserta dari Indonesia memberikan pengarahan pada pejabat USAID dan sebaliknya diberi pengarahan mengenai prioritas AID. Masalah yang menonjol adalah: kepentingan strategis Indonesia, kepentingan sumberdaya laut dan pesisir bagi ekonomi Indonesia, pembentukan kementerian yang baru merupakan bentuk desentralisasi dan demokrasi, pemberian wewenang atas perairan pesisir pada propinsi, kepentingan usaha-usaha USAID di masa lalu dalam menciptakan perubahan tersebut, dan kepentingan masalah gender dalam agenda perkembangan USAID.

Hattie Babbitt, Deputi Administrasi

Latar Belakang: United States Agency for International Development merupakan lembaga pemerintah federal yang menjalankan program ekonomi luar negeri Amerika dan bantuan kemanusiaan. Badan ini memfokuskan pada enam area penting untuk pemulihan Indonesia dan kelangsungan pembangunan: transisi demokratis, pemulihan ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, kesehatan dan gizi, bantuan bahan makanan, dan lapangan pekerjaan. Mengingat pentingnya ekologi Indonesia secara global, USAID meletakkan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab sebagai prioritas sebagai penanganan atas kerusakan lingkungan hidup yang makin parah selama krisis berlangsung. Proyek Pengelolaan Pesisir Indonesia USAID-CRC, Proyek Pesisir, mencerminkan dukungan USAID pada pemberian otoritas pengelolaan sumberdaya. Dengan prinsip “Dari kegiatan lokal ke praktik nasional”, Proyek Pesisir kini berlangsung di tiga propinsi dan secara nasional untuk mendapatkan cara terbaik dalam pengelolaan pesisir untuk mencapai tujuan strategis dari desentralisasi dan memperkuat pengelolaan sumberdaya pesisir.

Harriet C. Babbitt adalah Deputy Administrator USAID. Sebelum bergabung dengan USAID, Duta Besar Babbitt adalah wakil tetap AS pada Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) untuk periode 1993 – 1997. Dia bekerja sama dengan wakil-wakil dari negara-negara anggota OAS lainnya dan sekretaris jenderal OAS dalam membentuk organisasi yang lebih responsif dan efektif, menekankan pada demokrasi, hak asasi, pengembangan yang berkelanjutan dan perdagangan. Duta Besar Babbitt bertugas dari tahun 1988 sampai 1993 sebagai ketua untuk Komite Amerika Latin untuk National Democratic Institute, suatu organisasi independen berafiliasi dengan Partai Demokrat yang mempromosikan pembinaan dan pertumbuhan institusi demokratis di negara asing. Sebelum bergabung dengan kantor administrasi, Duta Besar Babbitt bekerja sebagai pengacara pada Robbins & Green, P.A. dari tahun 1974 sampai 1993.

2:00 pm, Berangkat ke pertemuan jam 2:30

(contohnya: menyeberang jalan ke Rapat Dr. Baker; berangkat naik bis ke US Capitol)

2:30 pm – 3:30 pm, Rapat dengan Dr. James Baker, Undersecretary dan Administrator, NOAA
Menteri Sarwono Kusumaatmadja, Dr. Rokhmin Dahuri, Mr. Busran Kadri, Ms. Lynne Hale, Dr. Ian Dutton, dan Mr. Maurice Knight

Latar Belakang: Dr. James Baker adalah Administrator NOAA dan Undersecretary untuk Laut dan Atmosfer, Departemen Perdagangan AS. Beliau aktif dalam Biro Terumbu Karang AS dan menjabat sebagai Direktur Komite Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Lembaga Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Nasional dan merupakan mantan anggota Lembaga Presiden pada Perkembangan Yang Berkelanjutan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Presiden Lembaga Bersama Kelautan, Dekan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Washington, dan di fakultas-fakultas Universitas Harvard dan Universitas Rhode Island.

Mengunjungi US Capitol di waktu bebas

Dr. Alex Retraubun, Mr. Harris Hasyim, Mr. Asli Amin, Mr. J. Saruan, Mr. Deni Ruchyat

3:30 pm, Berangkat ke gedung Hart Senate untuk mengikuti seminar

(contohnya: berjalan kaki dari Capitol ke Hart; berangkat naik bis dari Gedung Perdagangan ke Hart)

4:00 pm – 6:00 pm, Seminar Publik di Gedung Hart Senate, dilanjutkan dengan Resepsi

Melalui presentasinya, "Era Baru Untuk Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan di Indonesia", Menteri Sarwono Kusumaatmadja memberikan informasi pada Komunitas Perkembangan Internasional di Washington mengenai perubahan yang terjadi di Indonesia dan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

6:00 pm, Kembali ke hotel

Malam, waktu bebas

Hari 4: Jumat, 15 September 2000

8:30 am, Berangkat ke Akuarium Baltimore

Laksamana Kadri dengan Mr. Maurice Knight berangkat ke Kantor Pusat Pengawal Pelabuhan AS

11:00 am – 1:00 pm, Wisata di Akuarium dilanjutkan dengan Makan Siang - Diskusi Meja Bundar
Wisata dan diskusi akan membahas kerja sama non profit antar pemerintah dan mempertimbangkan masalah-masalah seperti konservasi, penerangan pada masyarakat dan peran Akuarium sebagai katalis ekonomis dalam konteks pembaharuan penduduk

Mr. David Pittenger, Direktur Eksekutif

Ms. Connie Parr, Direktur Hubungan Eksternal

Mr. Glenn Page, Direktur Konservasi

Dr. Valerie Chase, Direktur Pengganti untuk Penyuluhan Konservasi

Ms. Christine DeAngelo, Kurator Mamalia Laut

Ms. Nancy Hotchkiss, Penyelenggara Pameran

Latar Belakang: Akuarium Nasional di Baltimore membuka pintunya untuk umum sejak tanggal 8 Agustus 1981. Saat ini, akuarium ini merupakan salah satu yang terbaik dan terancang dalam hal teknologi akuarium. Arsitektur bangunannya, pamerannya, program, dan struktur pengelolaannya dianggap sebagai contoh yang pasti di seluruh dunia. Akuarium ini sebetulnya telah dibangun sejak pertengahan tujuhpuluhan saat Walikota Baltimore William Donald Schaefer dan Komisaris Pembangunan Perumahan dan Komunitas Robert C. Embry mendapat gagasan dan membuktikan bahwa akuarium merupakan komponen utama pada penataan ulang Inner Harbor Baltimore secara keseluruhan. Akuarium ini merupakan tujuan wisata di Maryland yang paling banyak menghasilkan uang, dan pengaruhnya pada Negara Bagian Maryland amat besar. Pada tahun 1990 sebuah studi yang dilaksanakan oleh Departemen Ekonomi dan Pengadaan Lapangan Kerja membuktikan bahwa pengunjung Akuarium sepanjang tahun 1990 menghasilkan 128,3 juta dolar.

1:00 pm, Meninggalkan akuarium dan berangkat ke bandara Baltimore

2:55 pm, Meninggalkan Baltimore dengan pesawat US Airways nomer penerbangan #2603

5:36 pm, Tiba di Bandara Internasional Miami

Berangkat ke Resor Hawk's Cay

61 Hawk's Cay Blvd

Duck key, FL 33050

Ph. 305.743.7000

Fax. 305.289.0651 –

Makan Malam sendiri di restoran di dalam resor

FLORIDA SELATAN

Daerah Perlindungan Laut Nasional Florida Keys (FKNMS) menunjukkan pengalaman AS dalam daerah perlindungan laut (DPL) nasional, dan menonjolkan peran lembaga federal dan pemerintah dalam hal koordinasi program, pendanaan, perencanaan, dan implementasi. Intervensi pengelolaan pesisir yang mempromosikan pengembangan yang berkelanjutan berkenaan dengan pariwisata, ancaman kerusakan pesisir, dan pencemaran ditunjukkan dengan penekanan pada hal-hal spesial berkaitan dengan konteks pulau-pulau kecil. Model komunitas, universitas, swadaya, dan keikutsertaan sektor swasta dalam pengelolaan pesisir semuanya menjadi bahan telaah.

Hari 5: Sabtu, 16 September 2000

8:00 am – 10:30 am, Pengarahan mengenai Daerah Perlindungan Laut Nasional Florida Keys dalam perjalanan ke Key West

Pengarahan ini menelaah peran pemerintah pusat dan daerah dalam hal koordinasi daerah perlindungan laut nasional, pendanaan, perencanaan dan implementasinya dengan penekanan khusus pada pengalaman DPL dengan peran serta masyarakat.

Ms. Joanne Delaney, Penterjemah Riset, Daerah Perlindungan Laut Nasional FL Keys

Latar Belakang: Cagar Alam Nasional FL Keys (luasnya 2.800 mil laut persegi atau 9.500 kilometer persegi) meliputi perairan laut dan pesisir, dan tanah di dasar lautnya, yang mengelilingi teluk Florida Keys. Merupakan satu dari 13 cagar alam yang dilindungi oleh Program Daerah Perlindungan Laut Nasional, ekosistem sub tropis ini mengandung lingkungan hidup kelautan yang spektakuler, unik, dan signifikan secara nasional, termasuk terumbu karang, rumput laut, wilayah batuan keras, dan hutan bakau. Kompleks ekosistem ini merupakan dasar dari wilayah pemancingan komersial dan tujuan wisata di Florida selatan. Cagar alam ini dirancang oleh Kongres AS tahun 1990 sebagai reaksi dari ancaman kerusakan yang terus meningkat dari masa depan kesehatan dan ekologi ekosistem terumbu karang. Sebagai bagian dari pembentukannya,

suatu rancangan pengelolaan yang menyeluruh dan program perlindungan kualitas disusun untuk Cagar Alam ini dengan melibatkan masyarakat, lembaga penasehat warganegara, dan sejumlah lembaga federal, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengelolaan Cagar Alam ini disusun melalui kerjasama kooperatif antara National Oceanic and Atmospheric Administration, Departemen Perdagangan AS dan Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup Negara Bagian Florida dan Komisi Konservasi Suaka Margasatwa dan Ikan Florida. Masalah yang saat ini dihadapi oleh Cagar Alam Nasional Florida Keys adalah pemusnahan terumbu karang dan penyakit, overfishing, dan kerusakan karang terkena perahu, penyelam dan pendaratan kapal yang terjadi sewaktu-waktu. Program Cagar Alam Laut Nasional dibentuk oleh Administrasi Atmosfer dan Kelautan Nasional (NOAA). Program ini dimuat dalam Buku III Undang-undang Perlindungan Laut, Riset dan Cagar Alam untuk berperan sebagai penjaga sistem nasional dalam wilayah perlindungan laut, dan untuk melestarikan, melindungi, dan meningkatkan bio diversitasnya, integritas ekologis dan warisan budaya. Program Cagar Alam Laut Nasional melanjutkan sejarah panjang Amerika dalam melindungi sebagian wilayah khusus daratan dalam merangkul lautannya. Hal itu membawa pendekatan ekosistem kepada perlindungan lingkungan hidup kelautan dan meningkatkan suatu etika baru pada pelayanan kelautan.

10:30 am – 11:30 am, Wisata ke Ekspedisi Kelautan yang Berkesinambungan

Latar Belakang: Ekspedisi Kelautan yang bersinambungan merupakan proyek 5-tahun dalam eksplorasi dasar laut dan penemuan dunia kelautan dengan penekanan pada cagar alam kelautan nasional AS. Ekspedisi ini merupakan temuan dari Dr. Sylvia Earle, sarjana dan Explorer dari National Geographic Society. Dipimpin oleh Dr. Earle, ekspedisi ini merupakan proyek dari National Geographic Society bekerja sama dengan NOAA dan lembaga pemerintah lainnya, industri, dan badan swasta, yang didanai oleh Richard and Rhoda Goldman Fund. Ekspedisi ini mempunyai empat tujuan: eksplorasi dan penemuan, riset ilmiah, penggunaan teknologi dasar laut, dan kesadaran publik akan lingkungan laut dengan menekankan pada perlindungan spesies laut dan ekosistem.

12:15 pm – 2:00 pm, Makan Siang ala piknik dengan rekan-rekan LSM Cagar Alam Nasional Florida Keys

LSM dan juga Pusat Konservasi Kelautan, Konservasi Alam, dan Sahabat Cagar Alam berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi Cagar Alam Nasional Florida Keys. Peserta akan mendapat kesempatan untuk menyelidiki keikutsertaan ini dengan pemimpin kunci dari organisasi-organisasi tersebut.

2:30 pm – 3:30 pm, Wisata Naik Perahu mengelilingi Cagar Alam dan Pelabuhan Key West

Selama kunjungan lapangan peserta mendapat kesempatan untuk secara langsung meneliti sumber daya kelautan Florida Keys, menganalisa perangkat perlindungan sumberdaya yang dipakai oleh Cagar Alam, dan mendiskusikan tantangan dalam mengelola wilayah perlindungan kelautan yang luas dengan penggunaan ganda.

3:30 pm – 5:00 pm, Waktu Bebas

5:00 pm, Bertemu dengan Dr. Sylvia Earle

Selain karir ilmiahnya yang prestisius, Dr. Earle sangat sempurna dalam pengabdianya yang aktif pada konservasi kelautan dan penyuluhan publik dalam masalah-masalah kelautan. Dia akan bertemu sejenak dengan peserta untuk menceritakan pengalamannya tentang konservasi kelautan baik dari perspektif pemerintah maupun swasta.

5:30 pm. Berangkat ke Resor Grand Key

3990 S. Roosevelt Blvd.

Key West, FL 33040

Ph: 305.293.1818

Fx. 305.296.6962

5:30 pm – 6:30 pm, Bersiap-siap untuk Makan Malam

7:00 pm sampai 9:00 pm, Makan Malam dengan Mr. Billy Causey dan Staf Cagar Alam Florida Keys. Suatu contoh fasilitasi pemerintah pusat dan federal untuk sektor swasta, komunitas, universitas dan keikutsertaan pihak lain di luar pemerintah dalam pengelolaan pesisir akan dibahas bersama Dr. Earle dan staf Cagar Alam Florida Keys. Dr. James Murley, Direktur Pusat Masalah Penduduk dan Lingkungan Hidup, Florida Atlantic University/Florida International University.

Hari 6: Minggu, 17 September 2000

8:30 am Coastal Management Tour di South Florida dengan rute ke Miami Beach

Tur ini memperlihatkan keberhasilan perencanaan, perizinan dan intervensi terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan kegagalan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sehubungan dengan pariwisata, kerusakan pesisir, dan polusi. Perhatian khusus ditujukan pada tantangan-tantangan dalam menghadapi isu-isu tersebut dalam konteks pengelolaan pulau-pulau kecil.

James Murley, Direktur Center for Urban and Environmental Problems, Florida Atlantic University/Florida International

2:30 PM, Tiba di The Wave Hotel

350 Ocean Drive

Miami Beach, FL 33139

Telp.: 305.673.0401

Fax: 305.531.9385

Malam, Acara bebas

RHODE ISLAND

Agenda kunjungan di Rhode Island dikonsentrasikan pada program-program pengelolaan pesisir negara bagian, termasuk perspektif negara bagian terhadap desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir di AS. Perhatian khusus diberikan kepada proses perizinan dan persyaratan-persyaratan yang biasa dipakai untuk mengelola pembangunan wilayah pesisir dan perspektif hukum pada kepemilikan lahan dan penggunaan hak-hak dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pengelolaan pesisir.

Hari 7: Senin, 18 September, 2000

6:15am, berangkat ke Miami International Airport

8:05 am, berangkat dengan American Airlines nomor penerbangan 1132, tiba di NYC/LaGuardia Airport pada pukul 10:55 am

12:20 pm, berangkat dari NYC/LaGuardia dengan American Airlines nomor penerbangan 4519 menuju Providence, tiba di Providence pada pukul 1:30 pm

Selama 20 tahun, Coastal Resources Center (CRC) University of Rhode Island telah melaksanakan pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkesinambungan. Dari kerja lapangan, CRC belajar cara menyusun dan menjalankan konsep dan perangkat pengurusan pesisir. Kerjasama, pelayanan dan komitmen menjadi dasar pendekatan CRC untuk program lapangan. Semua program lapangan dibentuk dan diterapkan melalui peran serta dan pendekatan pengajaran.

Tugas CRC di Indonesia, Proyek Pesisir, merupakan bagian dari program pengelolaan sumberdaya alam USAID dan Pemerintah Indonesia. Setelah berkonsultasi dengan masyarakat Indonesia sepanjang tahun 1995-1996, proyek ini dimulai tahun 1997 dan akan terus bergulir hingga 2003. Diimplementasikan oleh CRC, Proyek Pesisir bekerja sama dengan para stakeholders, komunitas, sektor industri, LSM, kelompok akademis dan semua tingkat pemerintahan. Proyek Pesisir dijalankan di lapangan dan secara nasional ditujukan pada kebutuhan Indonesia akan pengelolaan sumberdaya pesisir yang semakin membaik. Tantangannya adalah bagaimana membuat suatu teknik pengelolaan sumberdaya pesisir yang memberi kesempatan pada pembangunan, namun

juga melestarikan basis sumberdaya ekologis Indonesia yang sangat kaya. (Ringkasan kegiatan Proyek Pesisir dilampirkan pada bagian akhir materi briefing).

4:15 pm, Berangkat ke Hotel Bay Voyage

150 Conanicus Avenue

Jamestown, RI 02835

Tel. 401.423.2100

Fx. 401.423.3209

6:00 pm, Berangkat ke Kediaman Rektor Carother

6:30 pm – 9:00 pm, Resepsi dan Makan Malam di Kediaman Rektor University of Rhode Island

Pada saat resepsi, University of Rhode Island dan Departemen Kelautan dan Perikanan RI akan menandatangani Memorandum Kesepahaman. Tamu-tamu dalam acara ini dijamu oleh rektor University of Rhode Island Dr. Robert Carothers termasuk pejabat pemerintah negara bagian dan ahli pengelolaan pesisir dari pihak pemerintah, sektor swasta, dan akademis yang memberi kesempatan pada peserta Indonesia untuk berdiskusi secara informal mengenai pendekatan dan tantangan pengelolaan pesisir.

Hari 8: Selasa, 19 September 2000

8:00 am, Meninggalkan Bay Voyage menuju CRC

8:30 am – 10:30 am, Presentasi tentang Desentralisasi Pengelolaan Pesisir di AS

Presentasi oleh Ms. Lee dan Mr. Fugate akan memberikan perspektif negara bagian pada desentralisasi pengelolaan pesisir di AS dengan menjelaskan interaksi antara pemerintah federal dan intervensi perencanaan, perizinan, dan pengelolaan yang dipakai dalam mencapai tujuan pengelolaan pesisir. Mr. Nixon akan menyampaikan ikhtisar sejarah pembangunan dalam pengurusan pesisir di AS.

Ms. Virginia Lee, Wakil Direktur, Coastal Resources Center

Mr. Grover Fugate, Direktur Eksekutif, Coastal Resources Management Council

Mr. Dennis Nixon, Profesor, Departemen Kelautan

Latar Belakang: Rhode Island merupakan salah satu negara bagian pertama yang menjalankan pengelolaan sumber daya pesisirnya setelah UU Pengelolaan Sumber Daya Pesisir tahun 1971. Rencana pengelolaan negara bagian ini disetujui oleh pemerintah federal tahun 1978. Badan Sumber Daya Pengelolaan Pesisir melaksanakan rencana dan pemerintah daerah berperan serta secara sukarela, membangun rencana pengelolaan pelabuhan daerah. Erosi pantai, aliran pencemaran, pengaruh pemanfaatan sumber daya pesisir yang dilakukan manusia, dan akses masyarakat ke wilayah tsb, merupakan masalah utama pada pesisir Rhode Island. Untuk mengatasi masalah ini, program pesisir menciptakan rencana pengelolaan wilayah khusus; membuat program perencanaan manajemen pelabuhan yang menyeluruh; dan menghimbau pengurangan kerusakan atau musnahnya wetlands.

10:45 am – 11:45 am, Diskusi Meja Bundar mengenai Pengelolaan Pesisir

Diskusi ini bertujuan agar peserta dapat bertanya pada ahli pengelolaan pesisir mengenai aspek hukum dan kelembagaan, seperti proses perizinan dan syarat-syaratnya, hak kepemilikan tanah dan konservasi, keseimbangan antara penggunaan tanah dan air, dan proses masyarakat yang dipakai dalam perencanaan dan penetapan peraturan.

Moderator: **Ms. Lynne Hale**, Associate Director, Coastal Resources Center

Panel: **Mr. Steve Olsen**, Direktur CRC

Mr. Dennis Nixon, Profesor, Marine Affairs

Mr. Grover Fugate, Direktur Eksekutif, Coastal Resources Management Council

Ms. Virginia Lee, Wakil Direktur, CRC

11:45 am, Makan Siang di CRC

12:30 pm – 5:30 pm, Tur Pengelolaan Pesisir Rhode Island

Pemberhentian pertama adalah di Applied Science Associates, suatu lembaga konsultasi ilmu kelautan. Di sini peserta akan mempelajari pengurangan limbah minyak dan tanggapannya. Tur akan dilanjutkan ke Newport Rhode Island di mana peserta akan menyaksikan sejarah unik dari pembaharuan pantai Newport dan pengelolaan pariwisata

Mr. Brian Crawford, Lead Technical Advisor, Coastal Resources Center

Ms. Virginia Lee, Wakil Direktur, Coastal Resources Center

Ms. Jennifer McCann, Marine Resource Associate, CRC

Dr. Deborah French, Senior Scientist, Asosiasi Ilmu Terapan

Akan ditentukan kemudian, Pemandu Tur Newport

6:00 pm – 8:00 pm, Makan Malam di Newport

Hari 9: Rabu, 20 September 2000

8:00 am – 9:00 am, Sarapan dengan Ms. Trudy Coxe

Sepanjang diskusi yang dipandu oleh Ms. Trudy Coxe, peserta akan mempelajari lebih dalam mengenai ketegangan kreatif antara program pengelolaan pesisir pemerintah negara bagian dan federal di AS.

Latar Belakang: Ms. Trudy Coxe adalah tokoh perintis dalam pengelolaan pesisir AS yang bekerja pada tingkat paling tinggi di pemerintah pusat dan program pemerintah negara bagian Massachusetts. Keistimewaannya dalam mengendalikan pengelolaan pesisir AS baik dari perspektif negara federal maupun negara bagian akan membantu peserta saat mereka menganalisa presentasi tur sebelumnya di DC dan Rhode Island.

9:00 am – 9:15 am, Penandatanganan Memorandum Kesepahaman antara Rhode Island Coastal Resources Management Council dan Propinsi Lampung

9:15 am – 10:15 am, Refleksi mengenai Studi Wisata Pengelolaan Pesisir Indonesia

Mr. Knight akan memandu refleksi Studi Wisata dari hari pertama hingga hari ini, dengan fokus pada pelajaran yang ditangkap dan implikasinya bagi Indonesia dan kegiatan Proyek Pesisir. Mr. Maurice Knight, Penasehat Senior Bidang Kebijakan, Proyek Pesisir

10:30 am, Berangkat ke Bandara Providence

12:00 pm, Meninggalkan Providence dengan pesawat Northwest dengan nomer penerbangan 697, tiba di Detroit jam 2:07 pm

3:25 pm, Meninggalkan Detroit dengan pesawat Northwest dengan nomer penerbangan 269, tiba di Seattle jam 5:16 pm

Berangkat ke Ramada Inn Governor House

621 South Capitol Way

Olympia, WA 98501

Tel. 360.352.7700

Fax. 360.943.9349 – Makan Malam sendiri-sendiri

WASHINGTON STATE

Pengalaman Puget Sound Action Team dan Nisqually Watershed Management Program menunjukkan keberhasilan pendekatan-pendekatan pada pengelolaan DAS dan teluk. Pertemuan membahas peran pemerintah, masyarakat setempat dan sektor swasta dalam melakukan inisiatif partisipasi. Kunjungan lapangan memperlihatkan intervensi dan strategi-strategi manajemen yang terkait dengan pengelolaan teluk termasuk restorasi, praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan, budidaya perikanan, dan tinjauan unik terhadap tanah tenggelam (submerged lands) serta kepemilikan lahan.

Hari 10: Kamis, 21 September 2000

8:00 am, Berangkat ke kantor Puget Sound Action Team

8:45 am – 11:15 am, Presentasi tentang Pengelolaan Teluk dan Estuaria oleh Puget Sound Water Quality Action Team

Penjelasan yang diberikan menyangkut pengalaman-pengalaman Puget Sound Action Team dan pendekatan program terhadap pengelolaan DAS dan teluk.

- Pengantar tentang Puget Sound Action Team oleh Mr Duane Fagergren, Deputy Director
- Pengelolaan estuaria di Puget Sound oleh Mr Steven Tilley, Planning Manager
- Monitoring lingkungan di Puget Sound oleh Mr Scott Redman, Science Coordinator
- Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Perkotaan Teluk oleh Mr Kevin Anderson, Special Project Coordinator
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, garis pantai dan tanah tenggelam oleh Mr Steven Tilley, Planning Manager

Latar belakang: Puget Sound Water Quality Action Team – suatu sub-agen Kantor Gubernur

- menghimpun para ketua dari sepuluh lembaga pemerintah, satu kota dan satu perwakilan distrik (county), satu perwakilan dari suku Indian yang diakui oleh pemerintah federal, dan perwakilan tidak resmi dari tiga lembaga federal, untuk memimpin dan mengkoordinasi upaya-upaya perlindungan lingkungan Puget Sound. Anggota Action Team bertanggungjawab untuk:
 - Menyusun suatu rencana kerja dan anggaran belanja dua tahunan
 - Mengkoordinasi program-program monitoring dan riset
 - Mengubah dan merevisi secara periodik Rencana Pengelolaan Puget Sound Water Quality
 - Mengkoordinasi implementasi Rencana Pengelolaan Puget Sound di antara lembaga-lembaga

Pengelolaan dan perlindungan atas Puget Sound rumit dan penuh tantangan.

Batas wilayah yurisdiksi harus ditentukan sementara lembaga-lembaga di tingkat negara bagian dan federal, pemerintah lokal dan masyarakat adat, kelompok bisnis, individu-individu dan organisasi-organisasi harus bersama-sama menyusun suatu strategi perlindungan. Action Team memberi dukungan terhadap program-program, dari pendidikan masyarakat hingga monitoring secara ilmiah, yang semuanya mempersatukan semua pihak dalam kelompok ini. Aksi atau tindakan untuk mengidentifikasi dan menghentikan polusi di wilayah Puget Sound merupakan fokus utama Action Team. Action Team Science Program disusun untuk memonitor, mengevaluasi dan mendokumentasikan implementasi-implementasi yang disarankan di dalam Rencana Pengelolaan untuk strategi jangka panjang dan Rencana Kerja untuk tujuan jangka pendek.

11:15 am, Berangkat ke Nisqually Wildlife Refuge

11:30 am – 2:00 pm, Penjelasan Pengelolaan DAS dan makan siang di Nisqually Wildlife Refuge.

Peserta studi wisata mendapat penjelasan tentang pengalaman Program Pengelolaan DAS Nisqually dengan penekanan khusus pada peran masyarakat lokal sebagai stakeholders program. Pengelolaan hutan di DAS juga didiskusikan.

- Pengantar tentang Nisqually Wildlife Refuge
Ms. Jean Takekawa, Manager, Nisqually Wildlife Refuge
- Meninjau Interpretive Center dan jalan setapak
Makan siang di Refuge
- Pengantar tentang Program Nisqually Watershed Management
Mr. Steve Craig, President, Nisqually River Interpretive Center Foundation
Mr Peter Moulton, Senior Staff, Nisqually River Council

- Manajemen Hutan di DAS

Mr Jack Ward, International Paper

Latar belakang : Program Nisqually Watershed Management selama ini telah menjadi model bagi pengelolaan DAS regional secara partisipatif yang berupaya menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak di bidang sumberdaya ekonomi, sumberdaya alam, dan sumberdaya budaya. Nisqually terletak di salah satu wilayah sungai-sungai Puget Sound yang paling berat degradasinya, meliputi daratan seluas sekitar 700 mil persegi, hampir 500.000 are, dan menjadi bagian dari tiga distrik (county). Sejak 1996, enam puluh lima persen dari cekungan ini dimiliki oleh swasta dan perorangan, tigapuluh persen menjadi tanggungjawab dari berbagai lembaga federal dan sisanya dimiliki oleh negara, municipal dan lembaga adat. Daerah ini menghasilkan salmon dalam jumlah besar, steelhead runs, kayu dan hasil pertanian, dan pembangkit listrik tenaga air. Nisqually Basin juga menjadi tempat tinggal bagi sejumlah spesies yang terancam punah dan dilindungi, memiliki berbagai tempat wisata, dan menghasilkan air tawar untuk memenuhi kebutuhan separuh wilayah di Puget Sound selatan.

2:00 pm Berangkat menuju Clear Creek Fish Hatchery

2:40 pm – 3:30 pm, Presentasi tentang Peran Hatchery dalam restorasi Salmon

Presentasi ini mengemukakan isu-isu yang relevan untuk langkah-langkah restorasi sebagai suatu intervensi pengelolaan teluk.

Mr. George Walter, Staf Nisqually Tribal

3:30 pm – 4:10 pm, berangkat ke Olympia

4:10 pm – 6:00 pm acara bebas

6:00 pm, berangkat ke Shelton, Washington

6:25 pm – 7:00 pm, mengunjungi Shellfish Hatchery dan Processing Plant

Kunjungan ini menekankan pada isu-isu budidaya perikanan dan praktik-praktiknya.

Mr. Bill Dewey, Division Manager, Project Management and Public Affairs, Taylor Shellfish Farms, Inc.

Latar belakang : Taylor Shellfish merupakan produser kerang Manila terbesar di Amerika Serikat dan juga mengembangbiakkan Blue mussel (kerang Biru), berbagai jenis tiram, kerang (scallop) dan kepiting. Perusahaan yang berdiri sejak 100 tahun lalu ini memiliki fasilitas budidaya perikanan yang besar dan lengkap.

7:30 pm – 9:00 pm, Resepsi dan makan malam di Xinh's Clam & Oyster House dengan tuan rumah orang-orang dari Shellfish Farms. Dalam acara resepsi ini, Puget Sound Water Quality Action Team dan peserta dari Indonesia menandatangani MoU. Diskusi dengan para tamu di acara ini berlanjut dengan fokus pada praktik budidaya perikanan serta uraian tentang perspektif Washington State yang unik terhadap isu-isu kepemilikan tanah tenggelam.

9:00 pm, berangkat ke Olympia

Hari 11: Jum'at, 22 September 2000

7:00 am – 9:00 am, berangkat menuju Seattle

9:00 am – 10:00 am, Presentasi tentang peran Pelabuhan Seattle dalam restorasi dan perlindungan Teluk Elliot. Dalam presentasi ini dijelaskan tentang manajemen lingkungan pelabuhan dalam konteks rencana pengelolaan teluk.

Mr. David Aggerholm, Manager of Health, Safety, dan Environmental Services, Pelabuhan Seattle.

Latar belakang : Pelabuhan Seattle merupakan pelabuhan terbesar dan pusat peti kemas dan kargo terbesar di West Coast. Pelabuhan Seattle merupakan perusahaan tingkat municipal yang didirikan 5 September, 1911 oleh para pemilih di King County. Port merupakan perusahaan publik dengan otoritas unik yang bergerak di lingkungan internasional. Perusahaan ini memberikan layanan pada pelanggannya demi keuntungan penduduk di King County, memberi

pertimbangan pada implikasi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dari kebijaksanaan yang dibuat.

10:00 am – 11:00 am, Refleksi Tur

Peserta akan mengevaluasi pelajaran yang ditangkap sepanjang tur dan kemungkinan diterapkannya di Indonesia. Lebih lanjut mereka akan merekomendasikan tindakan yang akan diambil sejalan dengan penerapan rekomendasi tersebut di negara mereka.

11:00 am – 12:00 am, Tur ke pantai Seattle

Tur ini memberi kesempatan pada peserta untuk menyaksikan pantai Seattle dalam konteks pengelolaan teluk.

12:00 pm, Berangkat ke Bandara Seattle

Lampiran H

**“Era Baru dalam Pengelolaan Sumberdaya
Laut dan Pesisir di Indonesia”**

disampaikan oleh

Sarwono Kusumaatmadja
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

14 September 2000
Gedung Hart Senate, Washington, D.C.

“Era Baru dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan lautan di Indonesia”

Presentasi oleh **Sarwono Kusumaatmadja**
Menteri Kelautan dan Perikanan

14 September 2000
Hart Senate Building, Washington, D.C.

**Senator Jack Reed,
Senator Lincoln Chafee,
Hadirin yang terhormat,
Ibu dan Bapak sekalian,**

Suatu kebahagiaan yang besar dan kehormatan bagi saya untuk berada di Washington bersama Anda. Seperti Anda ketahui, kita telah merencanakan untuk menyelenggarakan seminar dan studi wisata ini pada bulan April yang lalu, tetapi terpaksa harus ditunda karena adanya larangan dari Presiden kami bagi para Menteri untuk tetap di dalam negeri menghadapi berbagai persoalan nasional. Setelah IMF ditunjuk lagi pada minggu lalu, sejumlah isu tersebut masih tetap menjadi masalah yang (perlu) diperhatikan. Jadi perlu saya tambahkan bahwa ada sejumlah pejabat yang belum bisa memastikan keberangkatan mereka minggu yang lalu saat kami menyusun rencana final perjalanan ini. Itulah kesulitan yang dihadapi, khususnya oleh teman-teman di Coastal resources Center yang menyusun ulang jadwal perjalanan pada jam 23.00!

Seperti yang Anda lihat, saat ini kita tidak lagi menghadapi situasi dramatis seperti itu dan saya sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan saya kepada sponsor studi wisata ini, yaitu US Agency for International Development - Indonesia Program, pengorganisasi perjalanan, Coastal Resources Center, University of Rhode Island. Saya juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada sponsor dan penyelenggara seminar di Capitol ini, the Women's Aquatic Network, Senator Jack Reed dan Lincoln Chafee dari Rhode Island.

Saya selalu terkesan oleh adanya berbagai macam minat/kepentingan yang berbeda-beda, yang berkumpul bersama pada acara-acara semacam ini dan saya bahagia sekali bahwa Anda tertarik untuk hadir di sini siang ini. Untuk memberi kesempatan agar kita punya cukup waktu untuk berdialog, saya akan menyampaikan pidato saya secara singkat saja. Saya juga akan meminta staf dari Kementerian saya dan tiga rekan dari tingkat propinsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang nanti Anda ajukan.

Dalam menyiapkan pidato ini, saya menghadapi sejumlah kesulitan untuk menentukan mana-mana yang perlu dimasukkan dan mana yang tidak perlu, apa saja yang didiskusikan secara umum dan apa yang perlu diberi penekanan. Berbicara tentang Indonesia masa kini (berarti) membicarakan serangkaian kesempatan untuk berbicara tentang topik-topik khusus seperti pemerintahan yang baik, demokrasi, pemulihan ekonomi, keadilan sosial, pengelolaan lingkungan dan paradigma-paradigma pembangunan.

Saya memutuskan bahwa dengan minat dan kepentingan audiens yang beragam, pembicaraan saya sebaiknya terfokus pada bagaimana kemunculan Kementerian Kelautan yang pertama kali merupakan

suatu pencapaian yang berarti dan bagaimana aktivitas Kementerian kami secara kompleks saling berkaitan dengan berbagai tema yang saya kemukakan tadi. Saya akan menyampaikan secara garis besar bagaimana kementerian ini terbentuk, strukturnya, fokus kegiatannya, dan uraian tentang bagaimana aktivitas kami membuka peluang-peluang dan keuntungan-keuntungan bagi kerjasama lebih lanjut dengan lembaga-lembaga AS.

Untuk membantu Anda yang belum tahu banyak tentang Indonesia, saya menyajikan sejumlah gambaran dasar geografi negara kami, termasuk lokasi tiga propinsi yang ikut serta dalam grup wisata studi ini. Menurut pengalaman saya, sangat sedikit orang di luar Indonesia mengenal skala atau keanekaragaman negara kami. Sulit bagi bangsa yang tinggal di daerah dengan batas wilayah daratan memahami bangsa maritim yang tinggal di daerah dengan batas wilayah lautan.

Selama pertemuan awal dengan berbagai lembaga seperti NOAA dan Departemen Dalam Negeri (State Department) serta LSM, kalangan industri dan perguruan tinggi dalam perjalanan dengan kapal di sungai Potomac pagi ini, saya sangat terkejut sekaligus senang mengetahui bahwa ada di antara Anda yang tertarik terhadap Indonesia dan tahu banyak tentang isu-isu penting serta pembangunan di sana. Saya paham bahwa (sebetulnya) sudah terjalin hubungan bilateral yang baik antar lembaga seperti US-INDO Fostering.

Seperti yang terlihat pada slide berikut, Indonesia memiliki warisan maritim yang luar biasa. Jumlah kepulauan dan luas lautan yang sangat produktif dengan keanekaragaman hayatinya, khasanah budaya yang kayadan industri-industri kami, lokasi kami yang strategis dan ketergantungan kami pada produk dan jasa kelautan, semuanya menjadikan kami sebagai bangsa maritim yang penting di dunia. Namun, agak mengherankan, pembangunan kami sebagian besar terfokus pada isu-isu dan industri di daratan.

Saya membandingkan situasi kami saat ini dengan program-program kebijakan kelautan pada situasi di Amerika Serikat awal tahun 1970-an ketika program-program pengelolaan pesisir dan lautan dikembangkan untuk merespon terjadinya peningkatan degradasi ekosistem pesisir dan lautan yang serius. Situasi kami mungkin lebih rumit karena adanya tiga faktor:

- Pertama, kami harus berhadapan dengan isu-isu yang telah muncul selama bertahun-tahun sebelumnya, yang selama ini kami abaikan. Sebagai contoh, “pintu gerbang” nasional kami, Teluk Jakarta. Teluk Jakarta merupakan tempat pembuangan sampah dari penduduk kota yang jumlahnya lebih dari 22 juta orang. Selama kurang lebih 400 tahun terakhir, teluk ini tidak pernah mendapat perlindungan khusus, juga tidak ada program maupun lembaga yang secara khusus melakukan pengelolaan teluk. Akibatnya, teluk ini merupakan teluk yang paling tercemar di Asia dan memerlukan upaya restorasi besar-besaran, jauh lebih besar dibanding program-program kebersihan Boston Harbor.
- Kedua, tak seperti yang terjadi di AS, khususnya pada saat ini, masyarakat/penduduk di wilayah pesisir Indonesia masih mengalami kesulitan sebagai akibat dari krisis ekonomi Asia. Kemerosotan industri telah menutup peluang kerja bagi banyak orang dan menyebabkan migrasi ke desa-desa pesisir dimana para pekerja kini mencari nafkah sebagai nelayan dan mengurus hasil laut. Pada saat yang bersamaan, tingginya harga jual produk lautan seperti udang dan ikan pelagis ke luar negeri telah menyebabkan terjadinya peningkatan eksploitasi, yang seringkali melibatkan metode penangkapan destruktif dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Pada gilirannya, masalah ini kemudian meningkatkan konflik-konflik dengan para nelayan lokal tradisional.
- Ketiga, dan bukan yang terakhir, dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global abad ke-21, kami tidak cukup memiliki bekal kemampuan, pengetahuan dan teknologi. Satu contoh misalnya, eksploitasi atas sumberdaya lautan kami di Zona Ekonomi Eksklusif dengan

menggunakan armada penangkap ikan penjarah. Saat ini, kami memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam sistem Monitoring, Kontrol dan Surveillance untuk menyusun suatu perkiraan kerugian atas eksploitasi perikanan laut oleh nelayan luar, tetapi penting sekali bila kita menyadari potensi ZEE untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi pembangunan ekonomi.

Sebagaimana ditulis dalam artikel yang dibagikan di sini, disusun oleh Direktur Jenderal Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil, Dr. Dahuri, dalam mengembangkan sumberdaya pesisir dan lautan dengan basis berkelanjutan, kami berhadapan dengan enam tantangan besar:

- (1) Kurangnya pengetahuan atas sumberdaya pesisir dan lautan serta proses-prosesnya — berkaitan dengan tradisi sains kami, kami hanya tahu sedikit tentang prospek kelautan dan bioteknologinya.
- (2) Kurangnya penghargaan terhadap sumberdaya pesisir dan lautan — penelitian yang dilakukan oleh COREMAP dengan dan dari World Bank menunjukkan betapa berharganya terumbu karang kami dan implikasi-implikasi yang muncul setelah begitu lama tidak ada tindakan (untuk penyelamatan). Bagaimanapun, seperti halnya keputusan (untuk memebentuk) US Presidential Task Force dan International Coral Reef Initiative, kami juga menghadapi banyak kendala dalam mengubah orientasi jangka pendek di banyak industri berbasis terumbu karang;
- (3) Kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengguna sumber daya laut – artikel mengenai Pulau Talise kami sediakan sebagai contoh kasus ini – agar pengguna menyetujui sistem pengelolaan efektif memerlukan beberapa perubahan mendasar dalam pendekatan regular kami;
- (4) Tidak jelasnya kewenangan hukum dan kelemahan kerangka perencanaan dan pengendalian pembangunan – merupakan kendala kritis dalam menghadapi Otonomi Daerah sepenuhnya mulai 1 Januari tahun depan – seperti diakui pula oleh rekan-rekan saya di lembaga perencanaan tingkat Propinsi, ada tantangan besar dan masalah yang belum terselesaikan dalam membangun sistem administrasi yang baru di tingkat Propinsi, kabupaten dan daerah;
- (5) Lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan yang terpadu dan menyeluruh; dan
- (6) Kurangnya integrasi baik vertikal maupun horisontal antara inisiatif pemerintah, sektor industri, LSM dan masyarakat – hal ini merupakan masalah umum di kebanyakan negara besar, namun menjadi gabungan masalah di Indonesia karena keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan warisan model kepemimpinan “Top Down” selama lebih dari 30 tahun.

Masalah-masalah tersebut masih muncul selain dari perubahan luar biasa dalam tiga hal:

- Pertama, kami telah menyusun program akademis dan riset yang lengkap dalam ilmu kelautan dan perikanan – setiap tahun enam universitas terkemuka di negara kami kini memiliki potensi menghasilkan 1800 sarjana di bidang ini. Selain itu, kami telah membuka 2 program pasca sarjana khusus di bidang pengelolaan pesisir yang akan menghasilkan staf yang mampu menerapkan program otonomi daerah yang baru. Namun, masih ada ketidakseimbangan yang besar antara ahli yang tersedia dan kebutuhan di bidang ilmu kelautan dan teknologi – karena itu pelatihan merupakan area kunci mengenai peningkatan keahlian – melalui studi wisata ini kami berharap dapat memperkokoh hubungan dengan program terkemuka di AS dan secara global demi mendukung usaha kami;
- Kedua, sebagai kelanjutan dari UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan 25 perundangan terkait mengenai pembagian pajak, kami mulai memfokuskan cara terbaik mengintegrasikan program pengelolaan pesisir dan kelautan antara pemerintah kabupaten (yang memiliki yurisdiksi sepanjang 5 mil laut), administrasi Propinsi (dengan yurisdiksi sepanjang 12 mil laut) dan pemerintah pusat dengan yurisdiksinya pada ZEE. Sungguh bukan tugas yang mudah dan sudah pasti dibutuhkan koordinasi yang teliti di semua lapisan pemerintahan, terutama pada pembangunan perencanaan spasial lokal dan kerangka kerja yang diharuskan. Di sini saya ingin menekankan nilai bantuan USAID – di Propinsi Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Timur,

sebagai hasil dari Proyek Pesisir dan pemerintah daerah, universitas dan rekan LSM, kini kami memiliki model terkini dari pengelolaan sumberdaya pesisir Indonesia. Saya telah mengunjungi lokasi-lokasi tersebut dan menyaksikan sendiri pengaruhnya pada penduduk pesisir dan keefektifannya dalam menyebarkan kualitas sumber daya pesisir.

- Ketiga, kini muncul aspirasi akan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan yang lebih baik lagi. walaupun, atau mungkin disebabkan oleh, reaksi pemerintah yang lambat, individu, industri, peneliti, komunitas, LSM dan yang lainnya mengambil kendali dalam menyusun pemanfaatan sumberdaya dan sistem pengelolaan yang sesuai untuk daerah tertentu. Dalam rangka mendorong hal ini, departemen saya telah membentuk skema pemberian penghargaan Pesisir Nasional yang akan diadakan setiap 2 tahun – pada kesempatan pertama, pemenang utama adalah Haji Thayeb, seorang tokoh masyarakat dalam program penanaman kembali hutan bakau di Sulawesi Selatan, dan pelaksana pariwisata kelautan di Bali, kapal pesiar Bali Hai.

Saya menghibahkan anda semua untuk datang dan menghadiri Simposium Terumbu Karang Internasional di Bali bulan depan untuk bertemu tokoh-tokoh dan mengunjungi tempat-tempat di mana penduduk setempat dan LSM memamerkan kepemimpinan mereka.

Mengapa pembentukan Departemen Kelautan begitu penting bagi masa depan Indonesia? Dalam mengkaji pertanyaan ini, sangatlah penting untuk mengulangi bahwa walaupun Indonesia lemah dalam masalah politik dan aktivitas pengelolaan, laut Indonesia sangat penting bagi budaya nasional, ekonomi dan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini sudah sedari dulu disadari. Contohnya, penulis Jerman/ Belanda Rumphius sangat kagum pada keanekaragaman laut, yang mendorongnya untuk menulis mengenai kehidupan laut di bagian timur Indonesia yang diterbitkan pertama kali tahun 1704. Kabinet Keingintahuan Orang Ambon, demikian tulisan itu berjudul, telah diterbitkan kembali dalam bahasa Inggris untuk pertama kali oleh Yale University Press.

Di antara anda mungkin ada yang lebih akrab dengan buku Ekologi Laut Indonesia yang menarik – 2 buku yang menjelajahi masalah-masalah ilmu dan pengelolaan kelautan di Indonesia sejak zaman dahulu sampai masa kini.

Saya menyinggung karya-karya tersebut karena mereka menyuguhkan analogi yang tepat bagi salah satu masalah utama dalam ilmu kelautan Indonesia – kami bisa menggambarkan dengan jelas sumber-sumber kami, masalah dan potensinya, namun sebagian besar kurang efektif dalam mengimplementasikan program terkoordinasi dari kebijaksanaan nasional dan gerakan lokal yang efektif untuk memanfaatkan sumber daya secara berkesinambungan demi keuntungan penduduk Indonesia. Bagaimanakah kami mengatasi hal ini? Salah satu tugas pertama saya begitu diangkat menjadi Menteri adalah membentuk satu tim yang terdiri dari ahli-ahli yang kapabel dan berdedikasi dalam bidang tertentu dari ilmu dan pengelolaan kelautan. Lima Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal dan staf ahli senior lainnya di bawah tanggung jawab saya diambil dari banyak departemen, dari bidang akademik dan organisasi penelitian dan semuanya penuh dengan antusiasme yang besar untuk melaksanakan pekerjaan.

Mendirikan suatu Departemen yang sama sekali baru memiliki banyak keuntungan namun juga banyak tantangan. Sebagian besar waktu kami di tahun pertama dihabiskan untuk tugas-tugas kerumahtanggaan yang semua penting, namun menghabiskan banyak waktu. Baru bulan lalu, misalnya, kami pindah menempati kantor baru kami yang permanen.

Selain kesibukan dalam penerimaan staf dan penyusunan anggaran, tahun pertama kami merupakan saat yang sangat sibuk. Berbulan-bulan kami berkonsultasi dengan kelompok pemuka masyarakat di

seluruh Indonesia, mendengarkan komunitas dan tokoh-tokohnya dan berbicara dengan kelompok industri dan riset dan dengan LSM dan banyak donor dan investor yang ingin membantu usaha kami. Kami juga bekerja sama dengan anggota parlemen untuk memastikan mereka memahami dan mendukung usaha kami. Pembicaraan-pembicaraan tsb membantu kami membangun kerangka kerja yang koheren dan berfokus pada klien, detilnya dirangkum dalam lembaran yang bisa anda dapatkan dan yang sebentar lagi juga bisa dilihat di situs web Departemen kami www.indocean.com.

Program kegiatan yang ditunjukkan dalam bagian ini menunjukkan perhatian utama kami dalam menyusun rencana keseluruhan bagi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Meskipun itu hanyalah suatu permulaan. Ketika kami menemukan inisiatif baru bagi pulau-pulau kecil, proposal tsb tidak dapat diimplementasikan tanpa proses yang baik dari pemeriksaan dan konsultasi. Masih panjang perjalanan kami sebelum mencapai Kebijakan Kelautan yang lengkap atau kapasitas yang dapat dibandingkan dengan AS dalam memutuskan pertanyaan-pertanyaan rumit dalam hubungan antar departemen yang disuguhkan oleh UU yang baru atau Otonomi Daerah.

Tentu saja, besar harapan saya peserta studi wisata ini kembali ke Indonesia membawa sejumlah rekomendasi cara menentukan keseimbangan tanggung jawab di antara tingkat lembaga pemerintah yang berbeda. Saya telah meminta staf saya untuk memperhatikan secara khusus tentang:

- Bagaimana mengurangi biaya pengurusan sumber daya pesisir dan kelautan,
- Bagaimana membina lebih banyak pendekatan keikutsertaan akan pembangunan pesisir dan kelautan, dan
- Bagaimana membangun sistem pengelolaan sumber daya yang memanfaatkan teknologi yang tepat.

Satu keberhasilan yang telah tercapai adalah pembentukan Lembaga Maritim Nasional yang memberikan saran langsung pada Presiden mengenai masalah kebijaksanaan nasional. Anggota lembaga ini diambil dari 27 sektor swasta, LSM dan lembaga pemerintah dan merupakan forum terpercaya untuk mendapatkan informasi dan memberi kesempatan atau program untuk penilaian. Presiden akan mengetuai lembaga ini dan saya telah lalai akan pelaksanaan rutinnya.

Saya menyambut gembira atas kesempatan untuk mempelajari pengalaman AS dalam forum tingkat tinggi semacam itu, khususnya bagaimana mereka memperbaiki perkembangan kebijakan dan koordinasi yang baik antar program sektoral.

Hadirin sekalian, Indonesia telah menderita kesulitan yang amat besar beberapa tahun belakangan ini, termasuk di antaranya rusaknya lingkungan, kehancuran dan krisis keuangan, ekonomi dan politik. Negara kami telah mengalami perubahan radikal dari rezim yang sangat otoriter dan terpusat, menuju apa yang saat ini bisa disebut demokrasi nomer tiga terbesar di dunia, dan dengan transisi tersebut muncul harapan akan masa depan yang lebih baik, terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir.

Saya sangat terkesan dengan reaksi positif dari kedua departemen, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kini kami tengah menjalin peran koordinasi dalam kerangka pemerintahan yang lebih luas, meskipun, seperti juga program lainnya, inisiatif seperti ini memerlukan waktu dan kami terus belajar sambil melangkah. Secara konsisten saya selalu menyampaikan bahwa kita harus mempunyai harapan yang realistis dan sebaiknya tidak menjanjikan apa yang tidak bisa kita berikan.

Hal ini membuat kita harus sangat disiplin dalam menerima tawaran bantuan dari luar – kiriman bantuan baru-baru ini dari Maurice Knight, Penasehat Kebijakan badan USAID di Departemen kami merupakan contoh disiplin yang saya maksud – sampai saat ini kami hanya memiliki kemampuan

kecil untuk memanfaatkan bantuan seperti itu secara efisien, namun sekarang kami dapat melihat jalur bagi inisiatif Kebijakan Pesisir Nasional – studi wisata ini akan menjadi nilai tambah bagi inisiatif tersebut.

Sudah dari dulu saya sampaikan bahwa kami perlu mencari cara baru untuk mengelola urusan kelautan kami dan baru sekarang kami sadari bahwa akibat luar biasa dari praktek pembangunan di masa lalu – konflik sosial, kerusakan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien secara ekonomis merupakan sebagian warisan yang kami terima dan kini menjadi hambatan menuju pemulihan yang harus kami selesaikan.

Beruntung kami memiliki rekan dan pendukung yang sangat baik seperti USAID dan Coastal Resources Center yang membantu kami membangun pendekatan yang berkelanjutan dan seimbang atas pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan. Kami harapkan studi wisata ini akan membantu kami menjalin hubungan yang lebih luas dengan lembaga di Amerika Serikat, LSM dan industri, karena masih banyak yang bisa kami pelajari dari kepemimpinan global anda dalam masalah-masalah tersebut. Lebih dari itu kami juga mengharapkan konsolidasi hubungan dan kontak pribadi yang bisa mewujudkan kerjasama bilateral dalam urusan kelautan dan perikanan dapat terus membawa keuntungan dan keberhasilan kedua pihak.

Sekali lagi terimakasih pada para sponsor dan tuan rumah seminar ini.

Saya menunggu pertanyaan dan komentar dari anda dan saya harapkan dapat berbincang dengan anda semua dengan lebih santai selama resepsi.

**Daftar Pustaka dan Publikasi
yang Didapat Selama SWI**

Daftar Pustaka dan Publikasi

| No. Judul | Pengarang/Sumber |
|--|--|
| 1. 2000 Puget Sound Update Puget Sound Water Quality Action Team 7 th Report Of The Puget Sound Ambient Monitoring Program | Puget Sound |
| 2. 2001 Marine Wildlife Calendar | Center for Marine Conservation |
| 3. American's National Wildlife Refugees | U.S Fish & Wildlife Services |
| 4. Aquidneck Island Our Shared Vision | CRC/URI, Sea Grant |
| 5. Aquidneck Island Partnership Brochures | |
| 6. CMC 2001 Marine Calendar | |
| 7. Coastal Nonpoint Source Pollution Brochures | EPA (Environmental Protection Agency) |
| 8. Coastal Resources Center Information Folder | URI |
| 9. Coastal Services Newsletter Vol. 3, Issue 5 September/October 2000 | NOAA |
| 10. Coastal Stewardship: Towards the Millennium 1996-1997 The Biennial Report to Congress on Administration of Coastal Zone Management Act | NOAA |
| 11. Coastal Zone Management 25 th Anniversary 1972-1997 Accomplishment Report | OCRM, NOAA |
| 12. Coordinating Success: Strategy for Restoration of the South Florida Ecosystem | South Florida Ecosystem Restoration Task Force |
| 13. Decision Support Tools for Hazards Risk and Vulnerability Assessment | NOAA |
| 14. Ecosystem-Based Fishery Management | U.S. Department Commerce |
| 15. Evolution of Public and Private Rights to RI's Shore | URI |
| 16. Fisheries of the United States, 1998 | U.S. Department Commerce |
| 17. Florida Keys National Marine Sanctuary Brochures | NOAA |
| 18. Florida Keys National Marine Sanctuary Folders | NOAA |
| 19. Health for Oceans | Center for Marine Conservation |
| 20. Health of Puget Sound CDs | Puget Sound |
| 21. Healthy Coast Brochures | NOAA |
| 22. Living in Water, Curriculum for Grades 5-7 | National Aquarium in Baltimore |
| 23. Managing NonPoint Pollution | Puget Sound |
| 24. Marine Mammals Ashore A Field Guide for Strandings | NOAA |
| 25. Misc. Puget Sound Fact Sheets | |
| 26. Monroe County Sanitary Wastewater Master Plan Vol. 2 Appendices | |
| 27. Monroe County Year 2010 Comprehensive Plan (Policy Document) | Monroe County |
| 28. Mote News Vol. 45 No. 1 Spring 2000 | |
| 29. National Aquarium in Baltimore | Aquarium in Baltimore |
| 30. National Estuary Program: Protecting Our Nation's Estuaries | EPA (Environmental Protection Agency) |
| 31. National Ocean Service 1999 Brochure | NOAA |
| 32. National Oceanic and Atmospheric Administration | |

| | |
|--|--|
| U.S. Department of Commerce Visit of Mr. Sarwono Kusumaatmadja Information Folder | NOAA |
| 33. National Sea Grant College Program Biennial Report 1998-1999 | Sea Grant |
| 34. NisquallyDestiny Video | |
| 35. NisquallyRiver Basin Information Folder | |
| 36. NisquallyWatershed Glacier to Delta A River Legacy | NisquallyRiver Interpretive Center Foundation |
| 37. OceanusCoastal Science & Policy II | Wood Hole Oceanographic Institution |
| 38. Our Living Oceans | U.S. Department of Commerce |
| 39. Our Water, our Way of Life | Monroe County |
| 40. PublicShellfish Sites of Puget Sound | Puget Sound |
| 41. Puget Sound Water Quality Action Team Information Folder | Puget Sound |
| 42. Puget Sound Water Quality Management Plan 2000 | Puget Sound |
| 43. Puget Sound Water Quality Work Plan 2001-2003 | Puget Sound Water Quality Action Team |
| 44. Puget Soundbook | James A. Kolb, Diane Boardman |
| 45. Putting the public Trust Doctrine to Work (2 nd Edition) | David C. Slade, Esq., R. Kerry Kehoe, Esq., Jane K. Stahl, Esq. |
| 46. Rhode Island's Salt Pond Region: A Special Area Management Plan Folder | |
| 47. Saving Bays and Estuaries: A Handbook of Tactics | EPA (Environmental Protection Agency) |
| 48. Saving Inky Video | Baltimore Aquarium |
| 49. Sea Grant Presentation Slides | NOAA |
| 50. Stormwater Education Programs | Puget Sound |
| 51. Summer Institute Presentation CD | URI |
| 52. Summer Institute Presentation CDs, Audio Version | URI |
| 53. Summer Institute Publication CD | URI |
| 54. Sustainable Seas Information Folder | |
| 55. Sustaining America's Coastal Communities and Resources | NOAA |
| 56. The National Coastal Management Act Presentation Slides | NOAA |
| 57. The State of Rhode Island Coastal Resources Management Program Folder | URI |
| 58. U.S. Fisheries Management/Enforcement Presentation Slides | NOAA |
| 59. Volunteer Monitor Newsletter | |

References:

Dahuri, R. and I.M. Dutton, *Integrated Coastal Management Enters a New Era in Indonesia, Integrated Coastal Zone Management*, 1:11-16, 2000

Hunt, L.J., I.M. Dutton, and J.P. Duff, *Integrated Coastal Zone Planning and Management Manual*, Vaughn International, Canora and BCEOM, Jakarta, CD ROM (bilingual), 1998

National Coastal Zone Management Act of 1972, United States Congress, 1972



Dalam kunjungan ke Rhode Island telah d'tar datangkan perjanjian kerjasama antara:

- University of Rhode Island Coastal Management Council dan Departemen Kelautan dan Perikanan,
- Rhode Island Coastal Management Council dan Pemerintah Propinsi Lampung.



Pengundatanganan Memorandum Kerjasama antara Administrator NOAA (National of Oceanographic and Atmospheric Administration) Dr. James Baker dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmadja.



Rapak Sarwono Kusumaatmadja sedang memberikan pengetahuan ringkas tentang potensi maritim Indonesia kepada para undangan Senator Lincoln Chafee dan Jack Reed dari Rhode Island, bertempat di Departemen Negara AS.



Di Puget Sound Water Quality Action Team, Washington State, lembaga yang mengatur pengelolaan lahan lepuah, yang melibatkan lebih dari 30 EAS (dalam aliran sungai)



Berdiskusi dengan Crudy Cox, aktivis LSM dan pernah menjabat sebagai wakil rakyat.



Berkesempatan untuk bertemu dengan Dr. Sylvia Earle, *Queen Explorer in Residence for National Geographic Society.*



Hatchery ikan salmon untuk penelitian dan breeding di Washington State.



Minirgan salah satu tempat hofidaya perikanan yang memajukan industri perikanan di Amerika Serikat.



Selama kunjungan ke beberapa tempat di Daerah Perlindungan Laut Nasional Florida Keys, peserta mendapatkan banyak informasi dan gagasan dari berbagai organisasi manajemen, terutama mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil, pengendalian dampak pariwisata, serta sistem pengendalian air bersih dan pembangunan limbah.





Riset rehabilitasi terumbu karang di Marine Mammal Laboratory, South Florida.

Menteri Sarwono Kusumahatmadja, Lynn Hale (Associate Director) dan Marguerite Davidson, Prinsipal Scientist, Kantor Bidang Kelautan Nasional, menghadiri briefing dengan NOAA di Washington DC.



Maureen Knight, Senior Policy Advisor; Bakurain Fadhuri, Dirjen Yasisir dan Pelayaran Kecil PKP; Laksamana Basran Kadri, Dirjen Pengawasan dan Pralindungan Laut PKP, dan atas NS Research Ship, di Key West, Florida.